

Together We Build Better Future



Kantor Pusat

Equity Tower Building - 9th Floor
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Phone : (021) 5140 1707
Fax : (021) 5140 1708, 5140 1709
Email : corsec@bankwindu.com
Website : www.bankwindu.com



Laporan Tahunan

2011

Together We Build Better Future

Daftar Isi

3	Performa Penting 2011
4	Visi, Misi dan Nilai Budaya Kerja
5	Sekilas Bank Windu
7	Profil Perusahaan
8	Informasi Pemegang Saham
9	Ikhtisar Saham
10	Ikhtisar Keuangan
11	Peristiwa Penting
14	Penghargaan dan Keanggotaan
15	Kebijakan Strategis
17	Laporan Dewan Komisaris
20	Laporan Direksi

TINJAUAN BISNIS DAN FUNGSIONAL

22	Perkreditan
26	Treasury dan Perbankan Internasional
28	Sumber Daya Manusia
32	Teknologi Informasi
33	Manajemen Risiko

TINJAUAN KEUANGAN

36	Analisis dan Pembahasan Manajemen
----	-----------------------------------

TATA KELOLA PERUSAHAAN

40	Tata Kelola Perusahaan
67	Laporan Komite-Komite

DATA PERUSAHAAN

70	Struktur Organisasi
72	Profil Dewan Komisaris
73	Profil Direksi
74	Profil Komite-Komite
75	Pejabat Eksekutif
76	Produk, Layanan dan Tingkat Suku Bunga
79	Jaringan Kantor

LAPORAN KEUANGAN

86	Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan
----	-----------------------------------

LAPORAN KEUANGAN AUDIT TAHUN 2011



Performa Penting 2011

Melalui dukungan *Stakeholders*, Bank Windu yang telah memasuki tahun ke empat pasca merger, berhasil meningkatkan volume bisnis secara signifikan, dan menghasilkan kinerja yang baik dengan memahami aspirasi dan kebutuhan nasabah, melakukan inovasi produk dan layanan yang lebih lengkap dan menarik, serta memperluas jaringan pelayanan menjadi 73 kantor pada akhir tahun 2011.

TOTAL AKTIVA

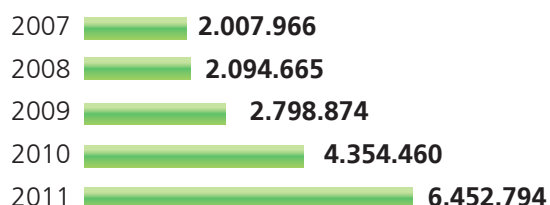
Total Aktiva tumbuh sebesar 48,19 % atau meningkat sebesar Rp 2.098.334 juta menjadi Rp 6.452.794 juta.

48.19%



Total Aktiva

(dalam jutaan IDR)



DANA PIHAK KETIGA

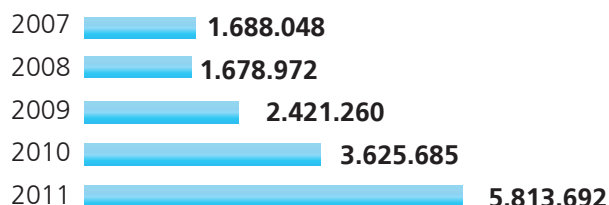
Dana Pihak Ketiga tumbuh sebesar 60,35% atau meningkat sebesar Rp 2.188.007 juta menjadi Rp 5.813.692 juta.

60.35%



Dana Pihak Ketiga

(dalam jutaan IDR)



KREDIT YANG DIBERIKAN

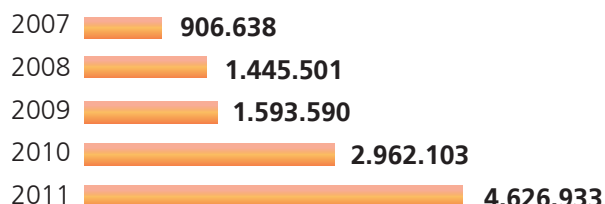
Kredit yang diberikan tumbuh sebesar 56,20% atau meningkat sebesar Rp 1.664.831 juta menjadi Rp 4.626.933 juta.

56.20%



Kredit Yang Diberikan

(dalam jutaan IDR)



LABA SEBELUM PAJAK

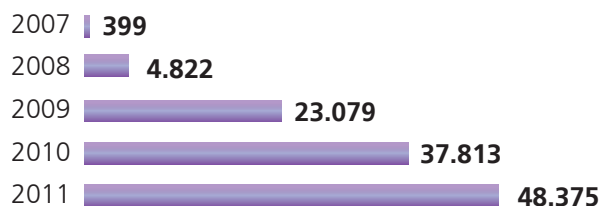
Laba Sebelum Pajak meningkat sebesar 27,93% atau Rp 10.562 juta menjadi Rp 48.375 juta.

27.93%



Laba Sebelum Pajak

(dalam jutaan IDR)



Visi, Misi, Nilai dan Budaya Kerja

Visi

Menjadi Bank Fokus Usaha Kecil Menengah Yang Terkemuka

Misi

- Memberikan layanan prima yang mengesankan bagi para nasabah, seiring kepedulian kami pada perkembangan usaha nasabah, serta menjaga hubungan yang baik.
- Memastikan ketepatan, integritas dan akuntabilitas produk dan layanan kami.
- Meningkatkan kinerja kami dengan kualitas, tanggung jawab dan tenaga kerja yang terpercaya

Nilai - Nilai

- Jujur
- Menghargai
- Peduli
- Kerja Sama Yang Baik
- Transparan

Budaya Kerja

- Berkinerja
- Bertanggung jawab
- Berintegritas
- Berkualitas
- Berkomitmen





PT Bank Windu Kentjana International Tbk (“Bank Windu”) merupakan Bank Devisa yang sahamnya telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dengan perubahan anggaran dasar perseroan terakhir berdasarkan akte No.168 tanggal 28 Juni 2011 yang telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-.AH.01.10-26005 Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011.

Hingga Desember 2011, Bank Windu telah memiliki jaringan 73 (tujuh puluh tiga) kantor yang tersebar di seluruh kota Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Sukabumi, Yogyakarta, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Batam, Lampung, Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan Denpasar. Sebagai lembaga yang bergerak pada sektor jasa keuangan, Bank Windu berkomitmen untuk melayani para nasabah, baik dalam rangka penghimpunan dana maupun penyaluran dana, serta melayani berbagai jasa perbankan, terutama mendukung sektor usaha kecil menengah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Windu selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan senantiasa berupaya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Sasaran Strategis Bank Windu meliputi:

1. Menjalankan praktek perbankan yang sehat untuk mencapai pertumbuhan usaha secara sehat dan wajar
2. Meraih pertumbuhan struktur keuangan yang sehat secara organik dan berkesinambungan
3. Mengembangkan sistem teknologi informasi/manajemen Informasi yang kuat dan handal untuk memastikan pengambilan keputusan secara efektif dan efisien
4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam struktur keuangan
5. Memastikan pelaksanaan tata kelola bank yang sehat
6. Meraih transformasi Bank Windu dengan sukses
7. Meningkatkan sumber daya manusia, budaya kerja dan manajemen perubahan

Latar belakang Bank Windu merupakan bank hasil penggabungan (merger) antara PT Bank Multicor Tbk dan PT Bank Windu Kentjana. Dalam penggabungan tersebut, pihak yang menggabungkan diri adalah PT Bank Windu Kentjana sedangkan pihak yang menerima penggabungan adalah PT Bank Multicor Tbk, dengan demikian dalam proses penggabungan tersebut PT Bank Multicor Tbk bertindak sebagai *surviving bank*. Latar belakang dari penggabungan usaha ini adalah untuk memaksimalkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing bank yang ada sehingga dapat menciptakan sinergi yang baru, baik dalam penggunaan modal, jaringan usaha yang lebih luas maupun sumber daya manusia.

Sekilas Bank Windu

Penggabungan tersebut secara legal dituangkan dalam Akta Merger No.171 tanggal 28 November 2007 dan disetujui Gubernur Bank Indonesia No.9/67/KEP/GBI/2007 tanggal 18 Desember 2007. Seluruh Anggaran Dasar Bank diubah sesuai Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan nama Bank diubah menjadi PT Bank Windu Kentjana International, Tbk, sebagaimana tertuang dalam Akta No.172 tanggal 28 November 2007, mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-00982.AH.01.02 tanggal 8 Januari 2008, dengan demikian tanggal 8 Januari 2008 merupakan tanggal efektif legal merger, yang sekaligus digunakan sebagai hari kelahiran PT Bank Windu Kentjana International Tbk.

Melalui persetujuan Gubernur Bank Indonesia No.10/9/KEP.GBI/2008 tanggal 8 Februari 2008, ijin usaha PT Bank Multicor Tbk berubah menjadi ijin usaha atas nama PT Bank Windu Kentjana International Tbk.

Tujuan dari dilakukannya penggabungan tersebut adalah:

1. Dalam rangka mendukung program Arsitektur Perbankan Indonesia untuk memperkuat permodalan dan memperluas jaringan kantor.
2. Memaksimalkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing bank peserta sehingga menciptakan sinergi yang baru.
3. Memperkuat daya saing guna menunjang pertumbuhan aktiva Bank hasil penggabungan di masa mendatang.
4. Bertambahnya jumlah cabang dan jenis-jenis produk, memungkinkan Bank hasil penggabungan untuk menjangkau jumlah nasabah yang lebih besar dan beragam.
5. Perpaduan antara pengembangan sumber-sumber pendapatan yang potensial dan dioptimalkannya pemanfaatan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pengembangan teknologi akan menghasilkan suatu skala ekonomi (*economy of scale*) yang menguntungkan bagi Bank hasil penggabungan.
6. Memiliki landasan yang kuat baik dari segi keuangan maupun sumber daya manusia yang merupakan modal untuk mengantisipasi pertumbuhan di masa mendatang.



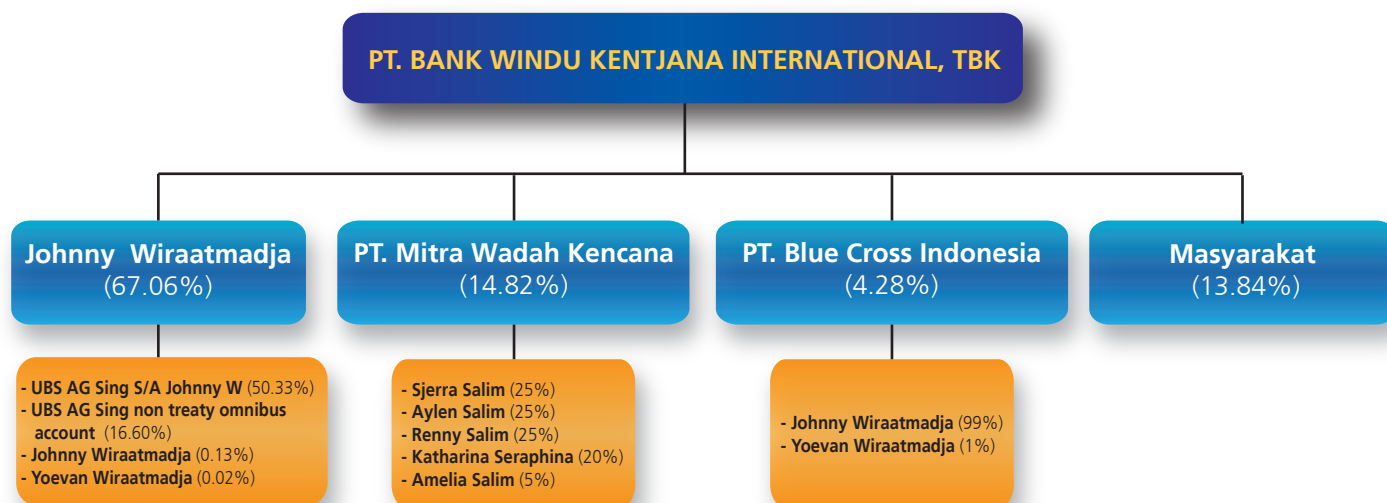
Profil Perusahaan

A tall, modern glass skyscraper with a distinctive diamond-patterned facade, identified as the Bank Windu building. The building is set against a blue sky with scattered white clouds. In the background, other city buildings and a tower are visible.

Nama Perusahaan	: PT Bank Windu Kentjana International, Tbk.
Kantor Pusat	: Equity Tower Building, 9th Floor Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia Telephone (62-21)5140 1707 Fax. (62-21)5140 1708, 5140 1709 Telex. 743224 BWK IA
Situs	: www.bankwindu.com
Email	: corsec@bankwindu.com
Hubungan Investor	: Sekretaris Perusahaan
Akte Badan Hukum	: Akta Merger No.171 tanggal 28 November 2007 dan disetujui Gubernur Bank Indonesia No. 9/67/KEP/GBI/2007 tanggal 18 Desember. Perubahan Anggaran Dasar menjadi PT Bank Windu Kentjana International, Tbk, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 172 tanggal 28 November 2007, mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00982.AH.01.02 Tanggal 8 Januari 2008 kemudian kemudian melalui persetujuan Gubernur Bank Indonesia No.10/9/KEP.GBI/2008 tanggal 8 Februari 2008, ijin usaha PT Bank Windu Multicor, Tbk berubah menjadi ijin usaha atas nama PT Bank Windu Kentjana International, Tbk.
Status Bank	: Perusahaan Terbuka dan Bank Devisa
Pencatatan Saham Kode Saham	: Bursa Efek Indonesia : MCOR
Biro Administrasi Efek	: PT Sinartama Gunita Plaza BII Menara III 12 th Floor, Jl. MH Thamrin No 51 Jakarta 10350, Indonesia
Akuntan Publik	: Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny Business License No.1219/KM.1/2011 Intiland Tower 7 th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav 32 Jakarta 10220, Indonesia

Informasi Pemegang Saham

Struktur kepemilikan saham PT Bank Windu Kentjana International, Tbk per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:



Keterangan Ringkas tentang Pemegang Saham

Johnny Wiraatmadja

Bapak Johnny Wiraatmadja pengalamannya di bidang perbankan dimulai di PT Bank Panin, Tbk sejak tahun 1979 menduduki berbagai posisi penting hingga posisi Direktur. Mulai tahun 2007 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Bank Panin, Tbk.

PT. Mitra Wadah Kencana

Perseroan Terbatas Mitra Wadah Kencana didirikan di Jakarta pada 23 November 1994 berdasarkan Akta No.38 Notaris Mellyani Noor Shandra, SH, yang telah disahkan Menteri Kehakiman No.C2-3070.HT.01.01.Th95 tanggal 27 Februari 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 30 Mei 1995 No 43 Tambahan No.4445. Perseroan dimiliki oleh keluarga Alm. Bapak Soedarmo Salim menanamkan modalnya pada PT Bank Windu Kentjana sejak 22 September 1997. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan akta perseroan, hingga terakhir, akta No.2 Notaris Stephani Maria Vianney Pangestu, SH pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham.

PT. Blue Cross Indonesia

Perseroan Terbatas Blue Cross Indonesia didirikan di Jakarta pada 29 Januari 2007 berdasarkan Akta No.90 Notaris Sugito Tedjamulja SH yang telah disahkan Menteri Kehakiman No.W7-02572.HT.01.01.TH.2007 tanggal 14 Maret 2007. Perseroan menanamkan modalnya pada PT Bank Windu Kentjana International, Tbk.

Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Bank Windu akan mengungkapkan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari Modal Disetor. Selama tahun 2011 baik Dewan Komisaris ataupun Direksi kepemilikannya tidak adanya yang melebihi dari 5% di Bank Windu, Bank Lain, Lembaga Keuangan bukan bank, namun demikian di tahun 2011 adanya kepemilikan saham kurang dari 5% di Bank Windu oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu :

- Sjerra Salim (Komisaris Utama), kepemilikan sahamnya di Bank Windu adalah 1.37%
- Syamsuar Halim (Komisaris), kepemilikan sahamnya di Bank Windu adalah 0.15%
- Tohir Sutanto (Direktur), kepemilikan sahamnya di Bank Windu adalah 0.01%

Ikhtisar Saham

Harga dan Volume Saham Bank Windu (MCOR) selama tahun 2011



Harga Saham	Tertinggi	Terendah	Harga Penutupan	Volume Transaksi
Januari	184	144	150	950,000
Februari	200	145	150	84,500
Maret	185	144	145	3,000,000
April	188	140	147	2,002,500
Mei	185	123	145	16,109,500
Juni	165	100	146	226,500
Juli	189	147	147	36,500
Agustus	180	142	150	18,500
September	190	136	136	360,000
Oktober	160	132	136	Tidak ada transaksi
November	180	137	160	25,000
Desember	205	160	187	1,187,000

HARGA SAHAM (dalam Rupiah)	2011				2010			
	Pembukaan	Tertinggi	Terendah	Penutupan	Pembukaan	Tertinggi	Terendah	Penutupan
Triwulan 1	150	200	144	145	112	120	50	107
Triwulan 2	145	188	100	146	77	165	119	152
Triwulan 3	150	190	136	136	170	185	130	151
Triwulan 4	135	205	132	187	151	200	150	150

VOLUME SAHAM	2011		2010	
	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah
Triwulan 1	3,000,000	84.500	142.500	4.000
Triwulan 2	16,109,500	226.500	1.317.500	806.500
Triwulan 3	360,000	18.000	1.969.000	259.000
Triwulan 4	1,187,000	Tidak ada transaksi	538.500	200.000

KINERJA SAHAM (dalam Rupiah)	2011	2010
Harga Tertinggi	205	185
Harga Terendah	100	50
Harga Pada Akhir Tahun	187	150
Laba per Saham Dasar	9,60	8,81

Kronologis Pencatatan Saham

Tanggal Pencatatan	Aksi Korporasi	Tambahan Saham Baru	Modal Disetor Saham	Saham yang Dicatatkan di BEI	Nilai Nominal (Rp)
16 April 2007	Modal sebelum Initial Public Offering (IPO)	-	1.429.245.170	-	100
03 Juli 2007	Initial Public Offering (IPO)	300.000.000	1.729.245.170	1.711.952.718	100
08 Januari 2008	Penggabungan Usaha (Konversi saham PT Bank Multicor, Tbk menjadi PT Bank Windu Kentjana International, Tbk)	1.013.000.000	2.742.245.170	2.714.802.718	100
08 Juli 2010	Penawaran Umum Terbatas I kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para Pemegang Saham dengan harga penawaran Rp 200 per saham	1.014.630.713	3.756.875.883	3.719.307.123	100

Ikhtisar Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

NERACA	2011	2010	2009	2008	2007
Total Aktiva	6.452.794	4.354.460	2.798.874	2.094.665	2.007.966
Kredit Yang Diberikan	4.626.933	2.962.103	1.593.590	1.445.501	906.638
Surat berharga	1.142.728	289.311	817.796	265.730	762.675
Penempatan pd Bank Lain	-	-	-	46.245	96.815
Simpanan Nasabah	5.813.692	3.625.685	2.421.260	1.678.972	1.688.048
Simpanan dari Bank Lain	26.293	131.658	22.111	45.916	1.022
Ekuitas	557.634	521.420	301.392	261.990	269.811
Kewajiban	5.895.159	3.833.040	2.497.482	1.832.675	1.738.155
LAPORAN LABA RUGI	2011	2010	2009	2008	2007
Pendapatan Bunga	490.312	337.211	252.744	204.737	165.396
Pendapatan Bunga Bersih	191.422	135.963	87.743	79.060	71.377
Pendapatan Operasional Lainnya	22.677	45.585	14.576	15.355	19.483
Beban Operasional Lainnya	177.921	147.881	80.710	84.597	64.635
Laba Operasional	36.178	33.667	21.609	9.818	26.225
Pendpt(beban) Non Op	12.197	4.146	1.470	(4.996)	(25.826)
Laba Sebelum Pajak	48.375	37.813	23.079	4.822	399
Laba (Rugi) Bersih	36.214	28.293	16.069	3.651	(4.882)
Laba per Saham Dasar (Rp penuh)	9,60	8,81	5,86	1,33	(0,49)
KUALITAS AKTIVA	2011	2010	2009	2008	2007
Aktiva Produktif	5.975.396	3.978.384	2.610.706	2.067.778	1.980.098
Aktiva Non Produktif	9.637	17.318	26.040	33.289	35.960
Total Aktiva Produktif dan Non Produktif	5.985.033	3.995.702	2.636.746	2.101.067	2.016.058
RASIO KEUANGAN (%)	2011	2010	2009	2008	2007
Permodalan					
CAR Risiko Kredit	12,66%	17,90%	17,88%	20,24%	30,90%
CAR Risiko Kredit + Pasar	12,27%	17,84%	16,88%	18,02%	30,68%
CAR Risiko Kredit + Pasar + Operasional	11,67%	17,12%	-	-	-
Aktiva Tetap terhadap Modal	31,98%	36,37%	52,07%	20,24%	24,96%
Kualitas Aktiva					
Aset Produktif Bermasalah dan Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Non Produktif	1,61%	1,90%	2,25%	1,50%	4,46%
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	1,62%	1,60%	1,57%	0,31%	3,51%
CKPN Aset Keuangan terhadap Aset Produktif *	1,42%	1,55%	1,34%	1,90%	1,30%
NPL Gross	2,18%	2,08%	2,11%	0,76%	1,72%
NPL Net	1,42%	1,12%	1,04%	0,29%	0,98%
Rentabilitas					
ROA	0,96%	1,11%	1,00%	0,25%	0,02%
ROE	6,94%	7,24%	6,03%	1,39%	-1,83%
NIM	4,62%	4,61%	4,48%	4,95%	3,73%
BOPO	92,97%	91,21%	91,92%	68,80%	73,21%
Likuiditas					
LDR	79,30%	81,29%	65,58%	86,14%	53,71%
Kepatuhan					
Pelanggaran BMPK					
a. Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b. Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelampauan BMPK					
a. Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b. Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GWM Rupiah	8,04%	9,66%	5,24%	5,03%	8,13%
GWM Valas	8,39%	1,16%	1,51%	2,17%	2,73%
PDN	1,30%	1,48%	6,72%	0,62%	2,25%
Lain-lain					
Kewajiban terhadap Ekuitas	805,34%	537,03%	828,65%	699,52%	644,21%
Kewajiban terhadap Aktiva	91,36%	88,03%	89,23%	87,49%	86,56%

* Tahun 2008 & 2007 : PPA Produktif terhadap Aktiva Produktif



Bank Windu selama tahun 2011 telah membuka Kantor-Kantor di sejumlah lokasi, berikut ini :

- 03 Januari 2011, untuk Kantor Cabang Pembantu pelayanan di Palembang.
- 24 Januari 2011, untuk Kantor Cabang Pembantu pelayanan di Semarang.
- 26 Januari 2011, untuk Kantor Kas pelayanan di Bintaro.
- 07 Februari 2011, untuk Kantor Cabang Pembantu pelayanan di Cibinong Bogor.
- 01 April 2011, untuk Kantor Cabang pelayanan di Yogyakarta.
- 11 Mei 2011, untuk Kantor Cabang pelayanan di Pekanbaru.
- 19 Mei 2011, untuk Kantor Cabang pelayanan di Bandar Lampung.
- 09 Juni 2011, untuk Kantor Cabang pelayanan di Sukabumi.
- 09 September 2011, untuk Kantor Cabang pelayanan di Gading Hibrida Jakarta.

Dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada nasabah dan masyarakat Bank Windu telah melakukan beberapa relokasi kantor di sejumlah lokasi berikut ini :

- 24 Januari 2011, melakukan relokasi Kantor Cabang Pembantu dari Gajah Mada ke Pemuda Semarang.
- 07 Februari 2011, melakukan relokasi Kantor Cabang pelayanan dari Surya Kencana ke Pajajaran Bogor, serta perubahan status Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Pembantu.
- 20 Juni 2011, melakukan relokasi Kantor Kas Menara Batavia Jakarta dari Lantai 19 ke Lantai 2.
- 27 Juni 2011, melakukan relokasi Kantor Kas dari Cideng ke Ketapang Jakarta.
- 26 Agustus 2011, melakukan relokasi Kantor Kas Kelapa Gading Hibrida ke Kantor Boulevard serta perubahan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang.



Peristiwa Penting



22 Januari 2011

Windu Peduli, .pemberian bantuan berupa sembako dan susu bayi ke Panti Jompo & Anak Kasih Ibu, di Cipayang Jakarta Timur

15 Maret 2011

Penandatanganan kerjasama *Business Partnership* dengan PT.Proarea International (Lj Hooker Indonesia).

23 Maret 2011

Penandatanganan kerjasama *Business Partnership* dengan PT.ERA Grahareality (ERA Indonesia).

06 April 2011

Penandatanganan kerjasama Bancassurance yang dilakukan oleh Bank Windu dengan Sequis Life, di Equity Tower Building Lantai 9 Jakarta.

Mei 2011

Penandatanganan kerjasama pembiayaan *Mortgage Loan* dengan PT.Taman Kota (Green Garden Residence Jakarta).

08 Juni 2011

Penandatanganan kerjasama *Business Partnership* dengan PT.Inti Cakra Propertindo (Value Property – Gading Serpong).

28 Juni 2011

Penandatanganan kerjasama pembiayaan *Mortgage Loan* dengan PT.Bumi Serpong Damai Tbk (BSD City dan Bale Tirtawan Serpong).

Juli 2011

Penandatanganan kerjasama pembiayaan *Mortgage Loan* dengan SUMMARECON GROUP (KSO Summarecon Serpong & Lakeview, Summarecon Kelapa Gading, Bekasi & Grand Orchard Jakarta).



Peristiwa Penting

07 Oktober 2011

Penandatanganan kerjasama Business Partnership dengan CV.Bangun Kota Persada (Paddy's Property-Solo).

27 Oktober 2011

Penandatanganan kerjasama "Tabungan Bersama" yang dilakukan oleh Bank Peserta seperti : Bank Windu, Bank Capital, Bank Mayora dan Bank Victoria, di Equity Tower Building Lantai 9 Jakarta.

06 Desember 2011

Windu Peduli Pemberian bantuan berupa sembako ke Panti Asuhan anak Yatim Piatu dan orang tidak mampu serta anak-anak jalanan. Dharma Widya
Lokasi : Jl. Pucak Hyang Ukir Bangli – Bali

06 Desember 2011

Windu Peduli Pemberian bantuan berupa sembako ke Yayasan Kasih Peduli Anak
Lokasi : Jl. Gunung Payung No.21 Denpasar - Bali

07 Desember 2011

Windu Peduli pemberian bantuan berupa Pengobatan Gratis bagi masyarakat kurang mampu di Desa Tista Gede. Bank Windu bekerja sama dengan Rotary Club Bali
Lokasi : Karang Asem Denpasar – Bali

08 Desember 2011

Penandatanganan kerjasama Business Partnership dengan CV.Basecamp Mandiri Realty (Basecamp Home- Bogor).

13 Desember 2011

Windu Peduli, Donor Darah Aksi Sosial melalui Donor Darah "Setetes Darah Anda Sangat Berarti Bagi Sesama"
Lokasi : Ruangan Serbag Guna Bank Windu, Equity Tower Building, Lt.9 Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot.9. Jl.Jend Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan



Penghargaan Dan Keanggotaan



22 Juli 2011

Bank Windu memperoleh Predikat "Sangat Bagus" dari majalah infoBank, atas kinerja keuangan Tahun 2010



18 Agustus 2009

Bank Windu mendapat persetujuan sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Departemen Perdagangan Republik Indonesia



27 Agustus 2008

Pengurus AEI memberikan sertifikat keanggotaan kepada BankWindu yang telah menjadi Anggota Asosiasi Emiten Indonesia terhitung sejak tanggal 23 Juli 2007



16 Juli 2008

Memperoleh Predikat "Sangat Bagus" dari majalah infoBank, atas kinerja keuangan Tahun 2007



3 Juli 2007

Tercatat menjadi Perusahaan terbuka dengan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta)



19 Juli 2007

Memperoleh Predikat "Sangat Bagus" dari majalah infoBank, atas kinerja keuangan Tahun 2006



6 Juli 2006

Memperoleh Predikat "Sangat Bagus" dari majalah infoBank, atas kinerja keuangan Tahun 2005



6 Juli 2006

Memperoleh Predikat "Sangat Bagus" dari majalah infoBank, atas kinerja keuangan Tahun 2004

Kebijakan Strategis



Sepanjang tahun 2011 situasi perekonomian Indonesia relatif baik, walaupun krisis keuangan global masih melanda dunia, yang dimulai krisis ekonomi Amerika Serikat dan Eropa, belum menunjukkan efek yang serius di Indonesia. Dengan didorong oleh penguatan konsumsi dalam negeri dan peningkatan investasi, perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 6,5% selama tahun 2011.

Sedangkan tingkat inflasi per Desember 2011 berdasarkan data Biro Pusat Statistik sebesar 3,79%, terendah di kawasan Asia Pasifik. Dalam kondisi moneter yang stabil, BI Rate diturunkan 50 basis poin oleh Bank Indonesia dari level 6,50% per Januari 2011 menjadi 6% akhir tahun 2011. Sementara itu *sovereign level* Indonesia dinaikkan oleh Fitch Ratings menjadi BBB- pada Desember 2011 dan Moody's menaikkan peringkat Indonesia menjadi Baa3 pada Januari 2012, menunjukkan peningkatan tingkat keyakinan terhadap perekonomian Indonesia.

Dengan iklim ekonomi yang kondusif selama tahun 2011, total aktiva Bank Windu berhasil meningkat 48,19% dari Rp 4,35 triliun di akhir tahun 2010 menjadi Rp 6,45 triliun di akhir tahun 2011, dengan tingkat pencapaian 117,32% dari target rencana bisnis. Demikian pula, kredit mengalami pertumbuhan besar sebesar 56,20%, yaitu dari Rp 2,96 triliun menjadi Rp 4,63 triliun atau mencapai 115,24% dari target semula. Kualitas kredit yang disalurkan masih terjaga baik dengan ratio NPL netto 1,12% pada akhir tahun 2011. Dana pihak ketiga meningkat 60,35%, dari posisi Rp 3,63 triliun menjadi Rp 5,8 triliun, atau pencapaian 123,08% dari target rencana bisnis. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Windu selama ini masih sangat baik. Kepercayaan masyarakat harus tetap dijaga dan ditingkatkan dengan peningkatan mutu layanan (*service level*), produk yang menarik, serta kebijakan suku bunga yang kompetitif. Kerja keras yang ditempuh oleh Bank Windu tersebut membuahkan hasil peningkatan Laba Sebelum Pajak sebesar 27,93%, yakni dari tahun sebelumnya dari sebesar Rp 37,81 milyar menjadi Rp 48,38 milyar.

Walaupun krisis ekonomi global diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2012, namun perekonomian Indonesia diprediksi masih mampu mempertahankan pertumbuhan PDB. Bank Indonesia optimis memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 6,2% - 6,7% untuk tahun 2012, dan *Asia Development Bank (ADB)* memperkirakan pertumbuhan sebesar 6,4%.

Kebijakan Strategis

Bank Indonesia melakukan penyempurnaan dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan *Risk Based Bank Rating (RBBR)*, yang pada intinya mendorong bank-bank agar mampu bertahan menghadapi bermacam risiko. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang berbasis risiko ini merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), rentabilitas, dan permodalan bank. Bank Indonesia juga akan fokus pada kebijakan moneter, terutama melalui suku bunga dan revitalisasi industri perbankan secara umum.

Dengan penuh keyakinan dan optimisme, dalam tahun 2012 Bank Windu merencanakan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat organisasi, mengoptimalkan jaringan kantor yang ada, serta meningkatkan volume usaha dengan tetap berasaskan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan Bank senantiasa melaksanakan praktek tata kelola perusahaan yang baik.

Sesuai dengan visi dan misi, dan memperhatikan skala bisnis saat ini, Bank Windu dalam jangka pendek dan menengah masih memfokuskan usahanya pada peningkatan pertumbuhan usaha dan optimalisasi jaringan kantor, serta mendorong penerapan *good corporate governance* dan manajemen resiko secara lebih memadai.

Arah Kebijakan Bank Windu

Kebijakan bank dalam jangka pendek diarahkan untuk mendorong :

1. Peningkatan volume usaha dengan peningkatan penyaluran kredit dan penghimpunan dana melalui *spreading* risiko yang lebih menyebar
2. Optimalisasi bisnis dari jaringan kantor yang ada
3. Terciptanya kinerja keuangan agar lebih efisien dan menghasilkan margin yang lebih baik

Kebijakan bank dalam jangka menengah diarahkan untuk mendorong :

1. Penerapan yang lebih memadai dari manajemen risiko, *good corporate governance*, sistem pengendalian internal dan fungsi kepatuhan.
2. Melanjutkan program penyempurnaan infrastruktur bank yang mencakup organisasi, SDM dan sistem

Langkah-langkah Strategis yang akan ditempuh Bank

- Peningkatan Volume Bisnis
 1. Peningkatan dan fokus pada aktivitas bisnis sesuai dengan segmentasi pasar yang dituju, disertai sistem kontrol yang memadai
 2. Perekrutan tim bisnis (*marketing force*) yang memiliki *customer based* untuk mendorong pencapaian target bisnis
 3. Peningkatan mutu layanan kepada nasabah melalui program *service excellence* ke semua kantor
 4. Pengembangan produk-produk yang sesuai dengan segmentasi pasar
 5. Peningkatan kontribusi sumber pendapatan dari Treasury
- Penyempurnaan Infrastruktur Bank
 1. Organisasi senantiasa disempurnakan sesuai dengan perkembangan perusahaan dan searah dengan sasaran yang ingin dicapai.
 2. Penyempurnaan TSI, operasional dan akuntansi, agar operasional Bank dapat lebih lancar, efisien dan akurat.
 3. Peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM yang lebih profesional dan handal.
- Peningkatan Sistem Pengendalian Internal dan Fungsi Kepatuhan
 1. Penerapan manajemen resiko dan kepatuhan yang lebih memadai.
 2. Peningkatan sistem pengendalian internal sejalan perluasan bisnis.
 3. Penyempurnaan Penerapan *good corporate governance*

Laporan Dewan Komisaris



1

2

3

1. Sjerra Salim
Komisaris Utama

2. Syamsuar Halim
Komisaris

3. Mohamad Hasan
Komisaris Independen

Laporan Dewan Komisaris

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya dan didukung kondisi perekonomian Indonesia yang kondusif dan baik kami dapat melewati tahun 2011, dengan kinerja Bank Windu yang menggembirakan. Tahun 2011 ini merupakan tahun buku keempat bagi Bank Windu sejak penggabungan usaha pada tanggal 8 Januari 2008.

Memperhatikan peta strategi Bank Windu tahun 2011, Direksi dalam menetapkan kebijakan strategis (*strategic policy*) sudah mempertimbangkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Langkah strategis yang dilaksanakan tahun 2011 secara garis besar adalah memperkuat infrastruktur IT, memperluas jaringan kantor dan upaya pertumbuhan volume usaha, baik dalam peningkatan dana pihak ketiga, maupun penyaluran kredit.

Dari hasil pengawasan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa Direksi dalam melaksanakan kebijakan strategis tersebut di atas tidak mengalami hambatan yang berarti, disebabkan semua keputusan strategis dilakukan melalui mekanisme rapat Direksi, serta tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Penilaian kami terhadap kinerja Direksi secara umum menunjukkan terkelolanya sumber daya keuangan secara baik didasarkan pada penilaian tingkat kesehatan bank dan penilaian profil risiko Bank Windu. Kondisi dan perkembangan usaha Bank Windu terlihat dari pertumbuhan total asset sebesar 48,19%, pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 60,35%, pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 56,2%, pertumbuhan laba sebelum pajak sebesar 27,93%. Disamping itu, ratio-ratio keuangan memenuhi ketentuan yang berlaku seperti : *capital adequate ratio* (CAR) dengan risiko kredit, pasar dan operasional sebesar 11,67% dari kewajiban penyediaan modal minimum 8%; kualitas kredit yang terjaga baik dengan ratio NPL neto sebesar 1,42% dibawah ketentuan 5%; net interest margin (NIM) sebesar 4,62%; sedangkan *loans to deposits ratio* (LDR) sebesar 79,3% dan ratio posisi devisa neto (PDN) sebesar 1,3%. Rencana Bisnis Bank yang disusun oleh Direksi mencerminkan pertumbuhan yang realistis.

Selain mencapai keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan aktiva-pasiva dalam beberapa tahun terakhir ini, patut pula dicatat keberhasilan Bank dalam mewujudkan beberapa kebijakan strategis yang akan sangat berguna dalam menunjang laju perkembangan operasional bank di masa mendatang. Pencapaian ini antara lain adalah, terlaksananya penggunaan *core banking system* yang baru berupa aplikasi perangkat teknologi *software system* "Temenos" yang di dunia perbankan internasional dikenal sebagai salah satu sistem yang canggih.

Di bidang sumber daya manusia (SDM), Bank telah merealisasikan program pendidikan dan pelatihan tenaga calon kader perbankan, Management Development Program yang berkesinambungan. Program ini bertujuan menghasilkan calon-calon pimpinan untuk memenuhi kebutuhan SDM di masa-masa mendatang. Program pendidikan dan pelatihan ini kini telah memasuki tahap ketiga. Perluasan jaringan cabang juga mengalami pertumbuhan yang memuaskan dari jumlah yang kini berjumlah 73 kantor tersebar di berbagai lokasi.

Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi, senantiasa mendorong kinerja perseroan dengan meningkatkan fungsi pengawasan internal, mengevaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang risiko serta mengevaluasi dan memberikan masukan atas kebijakan remunerasi dan nominasi kepada Direksi.

Dewan Komisaris selalu memantau penilaian faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan Bank meliputi aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar, serta tetap mendorong manajemen agar target-target yang disusun dalam Rencana Bisnis dapat diwujudkan. Disamping itu, Dewan Komisaris senantiasa memantau pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan *good corporate governance*. Secara umum Bank telah dapat memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Dalam penerapan *good corporate governance*, sistem pengendalian intern dan kecukupan kebijakan prosedur dari kegiatan operasional bank masih perlu disempurnakan dengan perkembangan perusahaan yang sangat pesat ini, dengan tetap mengacu ketentuan-ketentuan Bank Indonesia, termasuk dalam hal penerapan manajemen risiko.

Laporan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan kinerja Bank Windu tahun 2011 sebagaimana diuraikan dalam laporan tahunan ini, Dewan Komisaris dengan memperhatikan saran dan catatan dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko menyampaikan rekomendasi antara lain :

1. Dilakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi maupun Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan. Dalam kebijakan remunerasi dipertimbangan nilai kontribusi masing-masing jabatan terhadap pencapaian sasaran strategis; nilai kontribusi dicerminkan oleh nilai jabatan yang diperoleh dari hasil evaluasi jabatan; nilai jabatan dijadikan sebagai dasar pemberian kompensasi (remunerasi) kepada pemangku jabatan; perbedaan remunerasi mendukung terwujudnya prinsip remunerasi yang adil dan kompetitif. Disamping itu, Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi terhadap pengajuan Calon Pengurus.
2. Lebih ditingkatkan praktek tata kelola Bank yang sehat (good corporate governance) dan penerapan manajemen risiko yang meliputi risk control factor, peningkatan fungsi pengawasan internal dengan perkembangan perusahaan yang relatif pesat, akan diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha.
3. Dari hasil penilaian profil risiko yang meliputi risiko inhern (aspek kuantitatif) dan sistem pengendalian risiko (aspek kualitatif) pada setiap aktivitas fungsional, untuk parameter risiko inhern dan atau parameter sistem pengendalian risiko saat ini agar lebih disempurnakan.

Akhirnya kami masuk pada kesimpulan bahwa secara umum Direksi dan jajaran manajemen telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kebijakan dan kebutuhan Bank untuk mencapai tujuan bersama, dengan beberapa catatan untuk penyempurnaan kinerja selanjutnya. Pelaksanaan tugas Direksi dalam mengelola Bank Windu telah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih kami atas kepemimpinan Direksi, serta tak lupa penghargaan kami bagi segenap Pemegang Saham, Pengurus, Para Karyawan, Nasabah, Mitra Usaha, Masyarakat Umum dan Otoritas Perbankan atas kepercayaan dan dukungan yang besar kepada kami. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan melindungi kita semua, menyongsong masa depan dengan optimis. Amin

Dewan Komisaris,



Sjerra Salim
Komisaris Utama



Syamsuar Halim
Komisaris



Mohamad Hasan
Komisaris Independen

Laporan Direksi



Herman Sujono

Direktur Utama

Situasi perekonomian Indonesia pada tahun 2011 secara umum dalam kondisi baik, sementara krisis keuangan global yang sedang melanda dunia belum berdampak serius di Indonesia. Ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 6,5% selama tahun 2011 yang didorong oleh terutama penguatan konsumsi dalam negeri dan peningkatan investasi, sementara tingkat inflasi hingga Desember 2011 hanya sebesar 3,79% yang merupakan tingkat inflasi terendah di kawasan Asia Pasifik. Sedangkan BI Rate diturunkan dari level 6,50% pada awal tahun 2011 menjadi 6% akhir tahun 2011. *Fitch Ratings* menaikkan peringkat Indonesia menjadi BBB- menunjukkan peningkatan confident level terhadap perekonomian Indonesia, demikian pula *Moody's* menaikkan peringkat Indonesia menjadi Baa3.

Pada tahun 2011 Total Aktiva Bank Windu berhasil naik secara signifikan sebesar 48,19%, dari Rp 4,35 trilyun di akhir tahun 2010 menjadi Rp 6,45 trilyun di akhir tahun 2011, dengan tingkat pencapaian 117,32% dari target rencana bisnis. Demikian pula Kredit mengalami pertumbuhan besar sebesar 56,20%, yaitu dari Rp 2,96 trilyun menjadi Rp. 4,63 trilyun atau mencapai 115,24% dari target semula. Kualitas kredit yang disalurkan masih terjaga baik dengan ratio NPL netto 1,12% pada akhir tahun 2011.

Sedangkan Dana Pihak Ketiga yang dikelola Bank Windu selama tahun 2011 juga berkembang pesat 60,35%, dari posisi Rp 3,63 trilyun menjadi Rp 5,8 trilyun, atau pencapaian 123,08% dari target. Kerja keras yang ditempuh oleh Bank Windu tersebut membuahkan hasil peningkatan Laba Sebelum Pajak sebesar 27,93%, yakni dari tahun sebelumnya sebesar Rp 37,81 milyar menjadi Rp 48,38 milyar.

Sepanjang tahun 2011, Bank Windu telah memperluas jaringan 10 kantor baru termasuk di kota-kota baru, dengan membuka KC Yogyakarta, KC Bandar Lampung, KC Pekanbaru, KC Sukabumi, KCP Cibinong, KCP Semarang, KCP Bogor, KK Palembang, KK Pasar Segar Bintaro, KK Kelapa Gading; sehingga sampai saat ini jumlah jaringan menjadi 73 kantor yang tersebar pada kota-kota besar di Indonesia.

Meskipun situasi ekonomi global diperkirakan masih belum kondusif, namun bagi perekonomian Indonesia, dengan pasar domestik yang dominan, diprediksi masih mampu mempertahankan pertumbuhan PDB. Untuk tahun 2012, Bank Indonesia optimis memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 6,2% - 6,7%. Demikian pula *Asia Development Bank (ADB)* juga optimis memperkirakan pertumbuhan sebesar 6,4%.

Di sektor perbankan, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan *Risk Based Bank Rating (RBBR)*, yang pada intinya mendorong bank-bank agar mampu bertahan menghadapi bermacam risiko. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang berbasis risiko ini merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), rentabilitas, dan permodalan bank. Bank Indonesia juga akan fokus pada kebijakan moneter, terutama melalui suku bunga dan revitalisasi industri perbankan secara umum.

Dengan penuh keyakinan dan optimisme, dalam tahun 2012 Bank Windu merencanakan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat organisasi, mengoptimalkan jaringan kantor dan meningkatkan volume usaha dengan tetap beraskan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan Bank senantiasa melaksanakan praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pada kesempatan ini, Direksi menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua stakeholder atas kepercayaan dan dukungannya, serta atas kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini, sehingga Bank mampu mempertahankan kinerja yang baik. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Pemegang Saham dan Dewan Komisaris yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola Bank ini, serta secara khusus kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua karyawan dan karyawan, keluarga besar Bank Windu yang turut serta berpartisipasi dalam memajukan Bank ini.

Pada kesempatan ini, Direksi menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua *stakeholder* atas kepercayaan dan dukungannya, serta atas kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini, sehingga Bank mampu mempertahankan kinerja yang baik. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Pemegang Saham dan Dewan Komisaris yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola Bank ini, serta secara khusus kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua karyawan dan karyawan, keluarga besar Bank Windu yang turut serta berpartisipasi dalam memajukan Bank ini.



Herman Sujono
Direktur Utama

SIGNING CEREMONY

Bank Windu and ERA Real Estate

Jakarta, March 23rd

Kredit tumbuh sebesar 56,21 % dari Rp 2.962 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp 4.627 milyar di tahun 2011. Dilihat dari jenis penggunaannya, berikut pengklasifikasian kredit per posisi 31 Desember 2011:

Jenis Kredit	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Jutaan Rupiah	Jutaan Rupiah
Kredit Modal Kerja	2.240.924	1.600.024
Kredit Investasi	1.049.842	528.231
Pinjaman Rekening Koran	768.192	542.295
Kredit Konsumsi	121.548	15.700
Kredit Multiguna	35.287	14.734
Kredit Chanelling	23.155	44.021
Kredit Kepemilikan Rumah	273.789	141.173
Kredit Kendaraan Bermotor	88.766	56.550
Pinjaman Karyawan	25.430	19.375
Total	4.626.933	2.962.103

Perkreditan

Peningkatan penyaluran kredit merupakan agenda penting dalam realisasi rencana bisnis tahun 2011. Bank Windu secara aktif menyalurkan kredit kepada nasabah-nasabah yang sudah ada maupun calon nasabah yang potensial untuk melakukan ekspansi dan mengembangkan bisnis maupun untuk kebutuhan modal kerja, serta kebutuhan lainnya. Bank Windu terus berupaya untuk dapat membiayai sektor-sektor industri penting guna mengoptimalkan laba maupun pertumbuhan usaha, Bank Windu tetap berpedoman pada asas konservatif dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Penyaluran kredit diarahkan pada sektor-sektor yang dinilai masih potensial dan prospektif dengan fokus pada kualitas dan tingkat kemampuan pengembalian pinjaman debitur. Kebijakan dan rencana penyaluran dana perkreditan dengan risiko yang lebih menyebar (*spreading risk*) dan tidak bertumpu pada kredit-kredit skala besar telah menjadi prioritas utama Bank Windu, karena bidang ini dinilai mampu memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan Bank Windu dan membantu perekonomian Indonesia. Langkah penyaluran kredit yang dilakukan oleh manajemen sesuai dengan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam peningkatan portofolio kredit, Bank Windu menyalurkan dana ke berbagai sektor dari komersial, konsumen hingga ke sektor usaha mikro dan kecil. Bank Windu melihat semua faktor dan kondisi ekonomi ini menjadi kunci penting pertumbuhan sektor perbankan tahun 2011.

Kredit Komersial

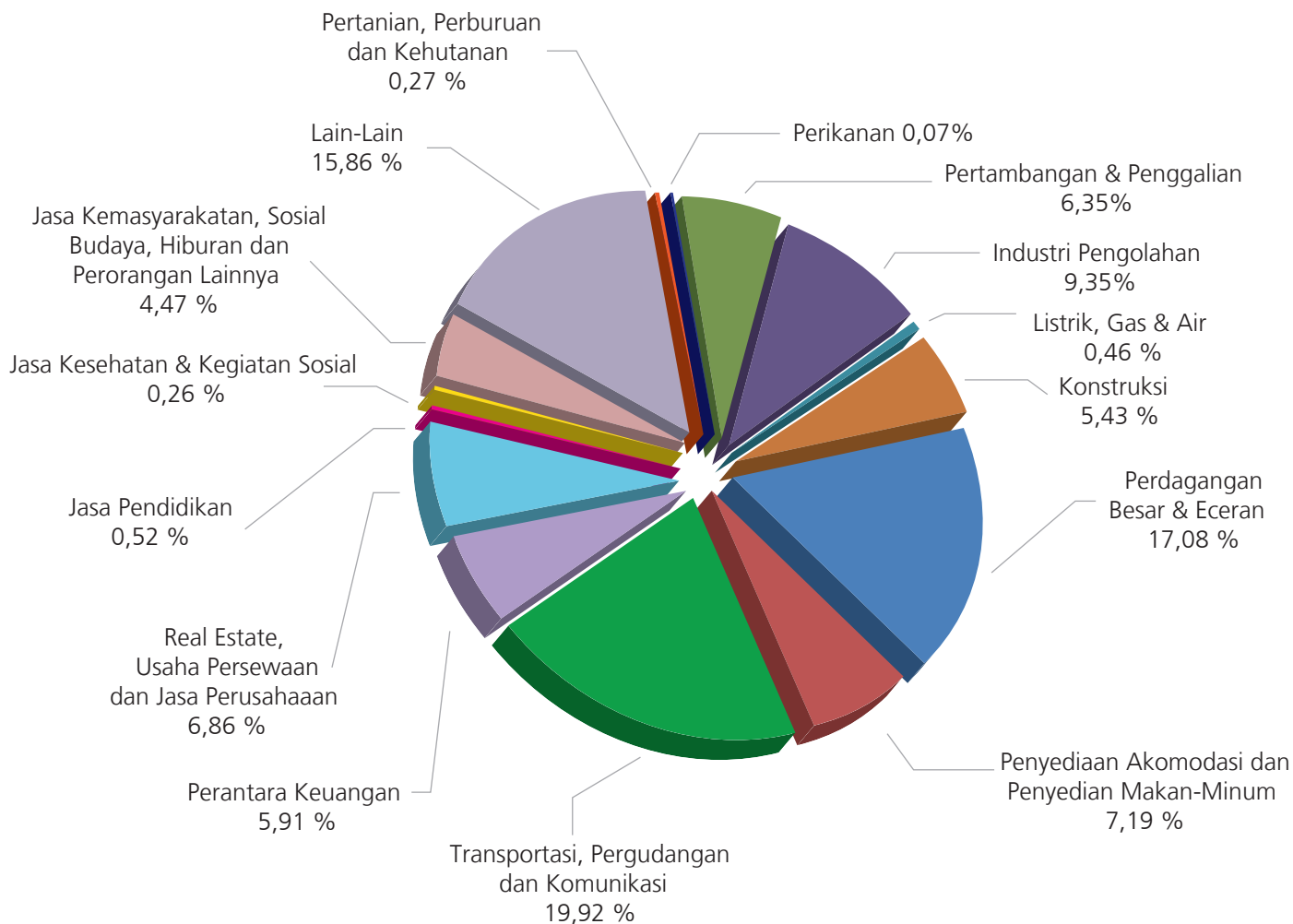
Penyaluran kredit komersial di Bank Windu merupakan pemberian fasilitas kredit untuk kebutuhan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

- **Modal kerja** adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus seperti untuk membiayai persediaan (*inventory*)/piutang/proyek atau kebutuhan khusus lainnya yang menurut evaluasi Bank Windu layak untuk dibiayai.
 - ✓ Limit kredit sesuai kebutuhan
 - ✓ Kredit dapat diberikan dalam valuta rupiah atau valuta asing
 - ✓ Jangka waktu sampai dengan maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
 - ✓ Sifat kredit revolving atau non revolving
- **Investasi** adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru dan atau kebutuhan khusus terkait investasi.
 - ✓ Limit kredit sesuai kebutuhan
 - ✓ Kredit diberikan dalam valuta rupiah dan valuta asing
 - ✓ Jangka waktu panjang (lebih dari 1 tahun) disesuaikan dengan rencana proyek
- **Trade Finance** adalah fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan transaksi bisnis ekspor - impor dan perdagangan lokal.
 - ✓ Standby LC
 - ✓ Bank Garansi
 - ✓ SKBDN

Kredit komersial Bank Windu memegang porsi penting dalam penyaluran dana ke sektor perkreditan. Hal ini menunjukkan peran serta dan kontribusi Bank Windu membantu menumbuhkan perekonomian Indonesia dengan mendorong bertumbuhnya sektor usaha di masyarakat.

Bank Windu senantiasa menjaga diversifikasi portofolio kredit untuk relatif menyebar ke berbagai sektor usaha.

Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi



Kredit berdasarkan kolektibilitas (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2011	2010
Lancar	4.427.063	2.874.087
Dalam Perhatian Khusus	53.344	26.596
Kurang Lancar	9.123	29.087
Diragukan	71.567	2.634
Macet	65.836	29.699
Total	4.626.933	2.962.103

Kebijakan penyaluran kredit Bank Windu berpedoman pada prinsip *prudential banking*. Peningkatan *portfolio* kredit ke berbagai sektor usaha potensial dan berkualitas yang mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia tetap tersebar secara merata, sehingga terhindar dari risiko yang terkonsentrasi.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap nasabah menjadi lebih cepat dan fokus, Bank Windu mengkategorikan pelayanan kredit komersial menjadi 3 (tiga) kategori :

1. Commercial Corporate : fokus pelayanan terhadap pembiayaan diatas Rp. 25 miliar
2. Commercial Regular : fokus pelayanan terhadap pembiayaan dengan fasilitas diatas Rp. 5 miliar hingga Rp 25 miliar
3. Commercial Ekspres & Commercial UMKM : fokus pelayanan pembiayaan dibawah Rp. 5 miliar.

Kredit Konsumer

Dalam rangka menyalurkan kredit konsumer, Bank Windu melalui Divisi Konsumer Banking telah menyiapkan sejumlah program yang menarik untuk nasabah, seperti *joint promotion* dengan *developer, dealer, broker* melalui media promosi. Disamping itu, guna meningkatkan penyaluran kredit melalui peningkatan fungsional marketing melalui pelatihan/training khusus untuk *sales force* yang akan memasarkan produk *consumer loan*, dengan memberikan pengetahuan atas segala aspek yang berkaitan dengan produk-produk tersebut.

Bertambahnya jumlah kantor cabang Bank Windu di berbagai kota di Indonesia telah meningkatkan daya saing Bank Windu di sektor *Consumer*. Sejalan dengan hal itu Bank Windu mengembangkan produk *inovatif* dan meningkatkan kualitas layanan. Tingkat kebutuhan nasabah terus dipantau dan hasilnya dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan terus-menerus pada produk dan layanan.

Keberadaan kantor cabang baru memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan Produk *Consumer Loan*, seperti :

- Khususnya pada produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
 - Melalui Paket KPR Khusus "*The Tiara*", melalui kerjasama pembiayaan *Mortgage Loan* dengan Summarecon Group & PT.Taman Kota (Green Garden Residence Jakarta) serta PT.Bumi Serpong Damai Tbk.
 - Melalui TOP Program (*Nation Wide*) yaitu program KPR *Take Over* Bank Windu, bagi para debitur *existing* bank pesaing khususnya yang telah melewati masa *fixed rate* (suku bunga).
 - Branch Contest 2011 "*Speed to the limit – Singapore*), melalui *appreciation program* yang ditunjukkan kepada seluruh cabang & marketing yang menjual *Mortgage Loan Products* dan mencapai target minimal yang telah ditentukan di tahun 2011.
- Kredit Multi Guna (KMG).
- Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan kredit konsumer lainnya.
Melalui program spesial Kredit Kepemilikan Mobil (KPM), merupakan program kredit pemilikan mobil dengan bunga, *Down Payment (DP)* dan biaya yang spesial.

Di tengah ketatnya persaingan di sektor konsumer, Bank Windu mengandalkan pada model bisnis yang *customer oriented* sehingga mampu memberikan produk-produk yang inovatif sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Strategi yang diterapkan Bank Windu di antaranya mengadakan kerjasama dengan sejumlah Developer Potensial antara lain Summarecon Group, Sinar Mas Group (Simas Land), Ciputra Group serta dengan beberapa Agen Properti seperti Ray White, Era, LJ Hooker, Century 21.

Di samping itu, Bank Windu juga melakukan kerjasama dengan *dealer potensial, joint financing* dengan perusahaan *multi finance*. Penyaluran kredit konsumer selain menghasilkan pendapatan bunga juga memberikan akses pada *customer base* yang luas guna melakukan *cross selling* produk dan jasa perbankan lainnya.

Kemudahan akses dan pelayanan berkualitas premium kepada nasabah maupun calon nasabah dengan fokus pada daerah-daerah yang prospektif sebagai *channel* pemasaran kredit konsumer.

Treasury

Treasury Bank Windu menjalankan fungsi pengelolaan *assets and liabilities management* (ALM), likuiditas, posisi devisa neto (PDN), giro wajib minimum (GWM) sesuai ketentuan yang berlaku. Treasury juga berperan sebagai pusat laba (*profit center*) melalui perdagangan surat berharga dan perdagangan valuta asing, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank, dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan bank.

Operasional Treasury Bank Windu terdiri dari bagian perdagangan valuta asing, pasar uang (*money market*) dan surat berharga (*fixed income securities*). Bagian Pasar Uang melaksanakan transaksi pinjaman dan penempatan uang antar bank (*money market*) dan Bagian Valuta Asing menjalankan perdagangan valuta asing. Bagian perdagangan surat berharga mengelola portofolio surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal (*capital market*). Treasury Bank Windu selalu memantau pasar untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal pergerakan harga yang dapat merugikan Bank, serta memastikan kepatuhan terhadap batasan perdagangan dan posisi devisa neto.

Treasury memegang peranan penting dalam menjaga Bank Windu dari risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko tingkat suku bunga melalui aktivitas treasury yang sehat dan dapat dipercaya dengan tetap menjaga agar eksposur risiko yang dihadapi tidak melampaui limit risiko yang telah ditetapkan. Kontribusi treasury terhadap laba bersih Bank Windu dicapai melalui pengelolaan risiko yang berhati-hati, termasuk pada transaksi valuta asing, transaksi pasar uang dan transaksi surat berharga.

Di tahun 2011, Bank Windu tetap fokus mengelola risiko likuiditas maupun risiko pasar secara berhati-hati untuk mempertahankan pertumbuhan dan kestabilan usaha. Bank juga mengkaji potensi risiko dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tertentu, terutama yang berkaitan dengan gapping suku bunga. Biaya pendanaan berhasil diturunkan secara signifikan, dengan menurunkan suku bunga deposito secara bertahap setara dengan bank-bank lain, namun tetap meningkatkan jumlah dana pihak ketiga sehingga lebih memperkuat likuiditas.

Di masa yang akan datang, Bank Windu akan mengembangkan potensi bisnis Treasury dalam memenuhi kebutuhan nasabah melalui pengembangan produk baru, melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik melalui penyempurnaan berbagai prosedur dan kebijakan Treasury.

Saat ini Treasury Bank Windu menawarkan produk dan layanan sebagai berikut:

- *FX Today, Tomorrow, Spot*
- *FX Forward*
- *Banknotes*
- *Deposit On Call*

Perbankan Internasional

Fungsi Operasional Luar Negeri memegang peranan penting dalam mendorong pendapatan *fee based income* bagi Bank Windu selama tahun 2011.

Operasional Luar Negeri difokuskan pada pelayanan jasa dan transaksi yang meliputi:

1. Kiriman Uang Luar Negeri (*Remittance*)
2. Transaksi Ekspor Impor baik dalam dan luar negeri (LC dan SKBDN)
3. Bank Garansi
4. Inkaso Luar Negeri (*Collection*)

Dalam rangka upaya untuk mendorong dan meningkatkan transaksi Luar Negeri, Bank Windu mengadakan training pelayanan jasa dan transaksi Valuta Asing serta *Trade Finance* untuk seluruh jaringan kantor Bank Windu, dengan tujuan agar layanan jasa transaksi luar negeri lebih dapat dimanfaatkan oleh seluruh nasabah.

Seiring dengan kondusifnya iklim bisnis di Indonesia, transaksi Valuta Asing dan *Trade Service* di Bank Windu diharapkan dapat ditingkatkan lagi, sehingga pendapatan dari *fee based income* di tahun 2012 pun dapat lebih meningkat.

Sarana dan prasarana telah disiapkan untuk mendukung pertumbuhan transaksi perbankan internasional, antara lain:

Implementasi *CitiDirect* dari Bank Koresponden pada sistem aplikasi Remittance / kiriman uang yang berbasis web, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru dunia.

Treasury dan Perbankan Internasional

Dalam menghadapi perkembangan di tahun 2012, langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka aktivitas perbankan internasional, diantaranya :

1. Implementasi SWIFT sebagai bentuk menuju *global community*, dengan *BIC code* "BWKIIDJA".
2. Meningkatkan aktivitas promosi trade finance melalui penyelenggaraan *Customer Gathering* di seluruh kantor cabang.
3. Menyelenggarakan pelatihan trade finance kepada semua cabang serta mengirimkan personil yang terlibat dalam *trade finance* untuk mengikuti seminar dan pelatihan yang diselenggarakan pihak eksternal.
4. Melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan nasabah serta *trend* bisnis kedepan.

Perkembangan Bisnis Operasional Luar Negeri Tahun 2011

Jenis Transaksi	Total Transaksi	Total Nominal	Equivalent Rupiah
Outgoing Remittance	12,007	\$ 658,029,608.25	Rp 5,966,683,472,792.67
Incoming Remittance	2,251	\$ 765,267,239.35	Rp 6,939,060,692,821.56
LC Import	225	\$40,559,242.87	Rp 367,770,934,762.20
SKBDN Rupiah	16	Rp 26,523,960,314.69	Rp 26,523,960,314.69
SKBDN Valuta Asing	40	\$ 3,424,810.87	Rp 31,054,472,563.73
Realisasi Export	31	\$ 115,029,640.88	Rp 1,043,031,268,679.40
Garansi Bank Rupiah	123	Rp 63,805,664,239.38	Rp 63,805,664,239.38
Garansi Bank Valuta Asing	35	\$ 1,838,252.14	Rp 16,668,351,279.45
TOTAL	14,728		Rp. 14,454,598,817,453.10





Bank Windu sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan, menempatkan sumber daya manusia sebagai aset perusahaan

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sebagai mitra strategis bertujuan untuk mendorong pertumbuhan bisnis serta mendukung upaya Bank Windu untuk memberikan yang terbaik bagi semua *stakeholder*. Bank Windu sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan, menempatkan sumber daya manusia sebagai aset perusahaan. SDM Bank Windu diharapkan memiliki kinerja, tanggung jawab, integritas, kualitas dan komitmen.

Untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, maka kegiatan pengembangan SDM difokuskan pada kegiatan-kegiatan:

1. Meningkatkan moral kerja, yaitu semangat dan motivasi kerja karyawan.
2. Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karyawan.
3. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan efisiensi kerja karyawan.
4. Melakukan kontrol serta pengendalian biaya tenaga kerja.
5. Melanjutkan penyempurnaan metode, sistem, prosedur, peraturan serta kebijakan dalam bidang SDM.
6. Menegakkan tata tertib serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan undang-undang yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
7. Mengikutsertakan pengurus dan karyawan pimpinan Bank Windu ke dalam program sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
8. Meningkatkan pemahaman segenap karyawan Bank Windu terhadap manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui program sosialisasi dan pelatihan internal sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan SDM

Program pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karyawan dirancang berdasarkan kondisi perkembangan Bank Windu yang dinamis. Peningkatan kompetensi individual dari semua karyawan Bank Windu menjadi agenda penting bagi Bank Windu. Dengan pelatihan diharapkan kualitas SDM Bank Windu akan meningkat dan dapat memberikan yang terbaik bagi para nasabah.

Program pelatihan dan pengembangan karyawan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang perkembangan bisnis. Di tahun 2011 telah diadakan 48 program pelatihan dengan jumlah 1.930 peserta, lebih banyak dibandingkan tahun 2010 berjumlah 1.628 peserta.

Sumber Daya Manusia

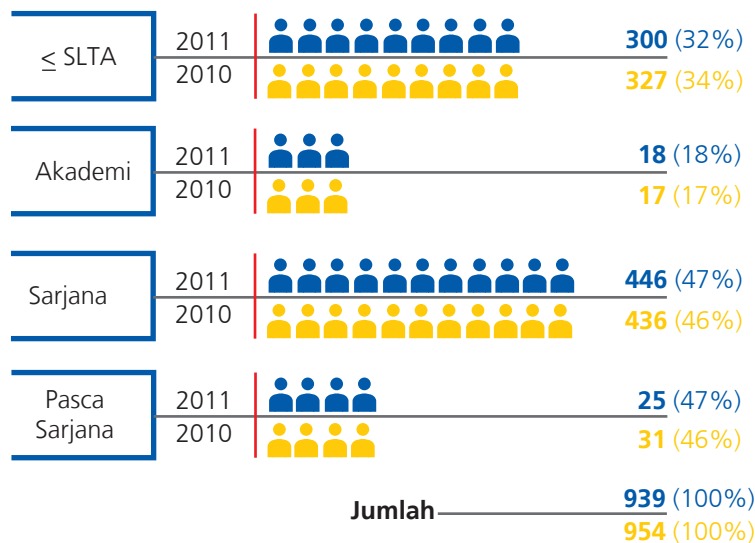
Bank Windu secara konsisten telah melakukan program pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar bank. Program pendidikan dan pelatihan selama tahun 2010 dan 2011 meliputi:

Bentuk Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta	
	2011	2010
Pendidikan Intern	1.461	1.318
Pelatihan Ekstern	469	310
Jumlah	1.930	1,628

Program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan selama tahun 2011 dengan materi-materi yang mencakup *technical skill* dan *soft skill* diantaranya : *service excellence* dan standar pelayanan, *risk management*, *APU/PPT*, *product knowledge*, *forex trading & trade finance*, pelatihan penjualan efek reksa dana, analisa kredit, aspek hukum dalam perkreditan, *IT networking*, *human excellence & self improvement*, *fraud auditing*, *legal drafting*, *internal control system* dan lain sebagainya.

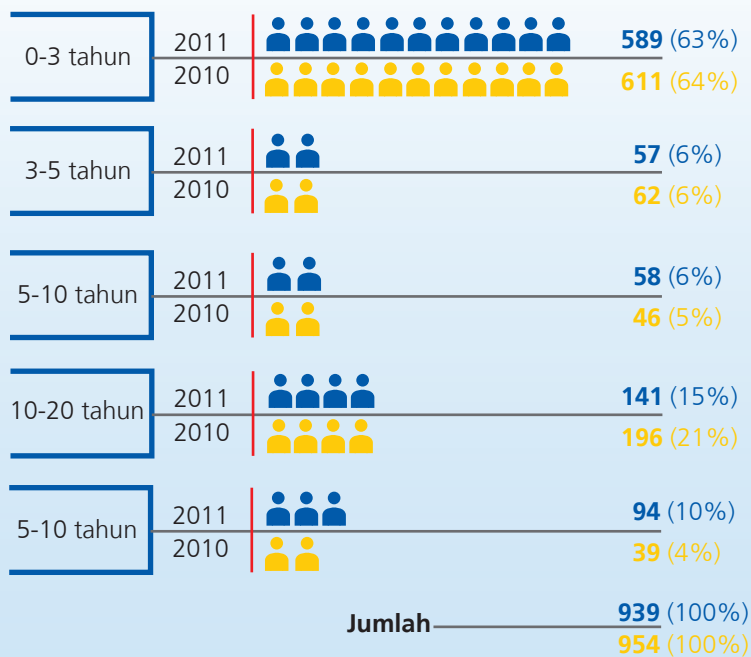
Pada tahun 2011 Bank Windu melanjutkan program pengembangan karyawan *fresh-graduate* melalui Management Development Program (MDP) yang diharapkan para lulusannya menjadi calon-calon pemimpin masa depan untuk mengisi kebutuhan SDM pada kantor-kantor Bank Windu. Para peserta program MDP dibekali dengan pengetahuan dasar perbankan secara lengkap melalui pendidikan dan pelatihan di kelas serta on the job training sebelum mereka diterjunkan pada pekerjaan utamanya.

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

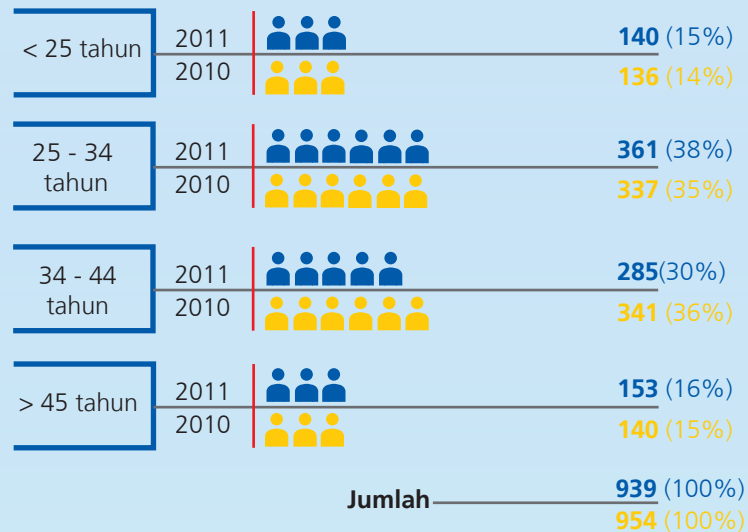




Komposisi Karyawan Menurut Masa Kerja

















Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia



Sumber Daya Manusia

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Direksi	2011		4 (0%)
	2010		5 (0%)
Kepala Divisi/ Ka Regional	2011		16 (2%)
	2010		21 (2%)
Area Manager/ Pemimpin Kantor	2011		63 (7%)
	2010		50 (5%)
Kepala Bagian	2011		69 (7%)
	2010		19 (2%)
Officer	2011		48 (5%)
	2010		366 (38%)
Staff	2011		600 (64%)
	2010		351 (37%)
Non Staff	2011		139 (15%)
	2010		142 (15%)
Jumlah			939 (100%)
			954 (100%)



Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) yang handal menjadi elemen penting dalam mendukung jalannya operasional dan bisnis Bank Windu. Pengembangan sistem dan infrastruktur TI akan terus dilakukan secara konsisten dengan tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.

Sebagai Bank yang memiliki visi jangka panjang, secara konsisten Bank Windu selalu berupaya meningkatkan kualitas produk dan layanan, dengan ditunjang Teknologi Informasi sebagai instrument yang sangat penting dalam mewujudkan upaya tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi terbaik merupakan faktor kunci untuk efisiensi yang diperlukan dalam memproses transaksi, meningkatkan akurasi dan penyediaan layanan yang memuaskan untuk berbagai keperluan perbankan para nasabah. Sinergi yang terbangun di seluruh elemen telah membuahkan pertumbuhan kinerja Bank Windu secara berkesinambungan. Untuk merealisasikan target jangka pendek di bidang Teknologi Informasi. Pengembangan TI juga didukung dengan pemilihan penyedia jasa serta peralatan teknologi yang tepat guna untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan teknologi dilaksanakan secara tersentralisasi dan terpadu.

Guna senantiasa melakukan penyempurnaan sistem teknologi informasi dari waktu ke waktu, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat tersedia secara lebih cepat, tepat dan akurat, maka pada pertengahan tahun 2012 Bank Windu telah mengganti *Core Banking System*. Bank telah mengembangkan sistem perbankan yang modern, terintegrasi dan efisien. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Bank Windu dilakukan secara terus menerus disesuaikan dengan perkembangan perusahaan, yang diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal kepada operasional maupun Bisnis Bank Windu.





Kegiatan usaha Bank Windu senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Oleh karena itu, kegiatan operasionalnya harus dikelola secara konservatif agar tidak menimbulkan potensi kerugian yang melebihi kemampuan modal Bank Windu untuk menyerapnya.

Bank Windu berupaya mengimplementasikan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka mengupayakan pertumbuhan bisnis yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan manajemen risiko merupakan bagian untuk memperkuat ketahanan serta stabilitas aktivitas perbankan, dilakukan melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian intern terhadap risiko. Bank Windu senantiasa berupaya untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang mampu mendukung proses manajemen risiko dengan baik.

Struktur Organisasi Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko di Bank Windu didasarkan pada prinsip independensi unit kerja manajemen risiko terhadap unit kerja bisnis dan unit kerja internal audit. Unit kerja manajemen risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Penerapan manajemen risiko juga merupakan tanggung jawab bagi semua unit kerja di Bank Windu, termasuk unit kerja bisnis dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sedangkan unit kerja internal audit memastikan bahwa unit kerja bisnis dan unit kerja manajemen risiko telah berfungsi secara independen dalam mengelola risiko.

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko dalam rangka pengawasan aktif penerapan manajemen risiko di Bank Windu. Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif dalam penerapan manajemen risiko, Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko. Komite ini beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang memiliki tugas membantu Direksi dalam menjalankan tugas menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, menetapkan limit risiko serta mengevaluasi penerapan manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko secara berkala mengadakan rapat dan hasil rapat komite tersebut oleh Direksi dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Strategi Manajemen Risiko

Untuk memastikan bahwa risiko dapat dikendalikan Bank Windu secara memadai, maka langkah-langkah strategis telah disusun dan dilaksanakan dalam mengembangkan sistem manajemen risiko, antara lain:

- Bank Windu telah memiliki komite-komite yang secara aktif melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko, seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi dan *Assets and Liabilities Committee (ALCO)* serta Komite Kebijakan Perkreditan.
- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan dengan memperhatikan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* serta *market best practices*.
- Penetapan parameter dan limit risiko yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Bank Windu dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko.

Manajemen Risiko

- Mengembangkan metodologi dan perangkat kerja serta sistem pelaporan eksposur risiko dari unit kerja bisnis kepada unit kerja manajemen risiko.
- Mempersiapkan *risk event database* serta melakukan *stress testing* sebagai dasar untuk melakukan kajian terhadap faktor-faktor penyebab risiko untuk mencegah timbulnya peluang kejadian risiko yang tidak terduga serta agar Bank Windu mampu mengantisipasi potensi timbulnya risiko di masa yang akan datang.
- Mengembangkan budaya sadar risiko (*risk awareness culture*) pada seluruh karyawan Bank Windu, antara lain melalui pelatihan dan sosialisasi manajemen risiko.
- Mengikutsertakan pengurus Bank Windu dan seluruh pimpinan unit kerja untuk mengikuti program sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank Windu menyadari pentingnya pengelolaan risiko sebagai pertimbangan utama untuk mencapai tujuan perusahaan. Sejalan dengan pedoman dari Bank Indonesia, Bank Windu mengimplementasikan pemantauan dan sistem pengawasan untuk 8 (delapan) jenis risiko, meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit terkait dengan potensi kerugian akibat ketidakmampuan nasabah dan atau lawan transaksi (*counterparty*) untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada Bank Windu serta risiko kredit akibat kegagalan setelahmen (*settlement risk*). Pengelolaan risiko kredit dilakukan antara lain dengan penetapan kebijakan perkreditan dan prosedur kredit serta penyaluran kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta seleksi yang ketat dalam proses persetujuan pemberian kredit. Bank Windu melakukan pemantauan terhadap kinerja debitur selama periode kredit untuk menjaga kualitas kredit. Selain itu, Bank Windu juga telah melakukan diversifikasi portofolio kredit, pengalokasian provisi yang memadai untuk menutup potensi kerugian serta selalu melakukan monitor atas penyebaran risiko yang timbul sejalan dengan pertumbuhan sektor ekonomi.

Unit kerja manajemen risiko telah mengumpulkan data debitur secara historis selama tiga tahun ke belakang, antara lain untuk menghitung tingkat probabilitas gagal bayar (*probability of default*), kerugian akibat gagal bayar (*loss given default*) dan periode identifikasi kerugian (*loss identification period*) sebagai landasan untuk memperhitungkan potensi kerugian yang dapat timbul akibat risiko kredit.

Risiko Pasar

Risiko pasar antara lain disebabkan oleh pergerakan nilai tukar dan suku bunga yang dapat merugikan, baik terdapat pada portofolio perdagangan (*trading book*) maupun keseluruhan neraca (*banking book*). Pengelolaan risiko pasar difokuskan pada pengelolaan dan pengungkapan risiko pasar yang timbul dari kegiatan treasury maupun dari posisi neraca Bank Windu sesuai dengan strategi usaha dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi dan ALCO.

ALCO bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan aktiva dan pasiva Bank Windu berdasarkan prinsip pengelolaan risiko sesuai ketentuan yang berlaku. ALCO berperan dalam membantu Direksi dalam mengawasi dan mengelola eksposur risiko pasar. Bank juga telah menetapkan limit terhadap aktivitas treasury untuk menghindari konsentrasi portofolio pada instrumen dan counterparties tertentu.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas disebabkan oleh ketidakmampuan Bank Windu untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada pihak lain. Posisi dana pihak ketiga, likuiditas asset, kewajiban kepada *counterparties* dan komitmen kredit kepada debitur merupakan potensi risiko likuiditas bagi Bank Windu. Ketidakmampuan untuk menghitung biaya dana dengan biaya yang wajar akan berdampak kepada keuntungan Bank Windu.

Pengelolaan risiko likuiditas bertujuan agar Bank Windu dapat memenuhi setiap kewajiban keuangan yang telah diperjanjikan secara tepat waktu dan selalu memelihara tingkat likuiditas yang optimal, penetapan *pricing* dan *gapping* terhadap sumber dana dan kewajiban, pengukuran dan penetapan limit risiko likuiditas serta memelihara akses pasar.

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat dalam aktivitas perbankan sehari-hari. Risiko operasional adalah potensi kerugian yang antara lain diakibatkan oleh kegagalan proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia atau adanya problem eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Bank Windu.

Manajemen Risiko

Bank Windu berupaya untuk mengantisipasi dan mengendalikan seluruh faktor yang berpotensi menimbulkan risiko operasional, antara lain dengan memastikan bahwa karyawan telah memiliki kualifikasi dan terlatih untuk fungsi yang dilakukan serta memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional telah dilakukan berdasarkan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Penetapan limit risiko dan pengembangan sistem pengendalian internal senantiasa dilakukan untuk memitigasi risiko operasional. Setiap unit kerja bertanggung jawab atas seluruh eksposur risiko yang dihadapi, pengelolaannya perpedoman pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat memperkecil potensi kerugian yang tidak diharapkan.

Unit kerja manajemen risiko telah mengembangkan dan menerapkan *Risk Control Self Assessment (RCSA)*, *Key Risk Indicators (KRI)* dan Laporan Kejadian Risiko Operasional pada seluruh jaringan kantor Bank Windu.

Risiko Hukum

Risiko hukum dapat terjadi akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang berpotensi merugikan Bank Windu. Mitigasi risiko hukum antara lain dilakukan dengan pembentukan satuan kerja *corporate legal*, dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memahami permasalahan hukum, proses *legal review* terhadap perjanjian hukum dan kontrak antara Bank Windu dengan pihak lain. Bank Windu juga telah menunjuk penasihat hukum yang kompeten apabila menghadapi permasalahan hukum atau tuntutan hukum dari pihak lain.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank Windu. Mitigasi risiko reputasi antara lain dilakukan dengan mempublikasikan informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengembangkan budaya layanan prima (*service excellence*) kepada nasabah dan menangani setiap keluhan yang disampaikan oleh nasabah kepada Bank Windu serta menyelesaikannya dengan baik.

Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Mitigasi risiko strategik antara lain dilakukan dengan kebijakan manajemen Bank Windu untuk menyusun rencana strategis dan menerapkannya secara konservatif dan berhati-hati. Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa mengikuti perkembangan usaha bank dan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis serta melakukan revisi terhadap rencana bisnis bilamana diperlukan untuk mengantisipasi perubahan perekonomian dan lingkungan bisnis.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan dapat terjadi karena Bank Windu tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan, baik eksternal maupun internal yang berlaku. Risiko ini dapat berdampak pada penenaan denda dan sanksi dari otoritas atau pengawas bank. Upaya untuk memitigasi risiko kepatuhan antara lain dilakukan dengan meningkatkan pemahaman karyawan terhadap peraturan dan ketentuan, antara lain melalui pelatihan dan sosialisasi. Peran satuan kerja kepatuhan merupakan hal penting dalam memastikan dipatuhinya kebijakan dan prosedur internal serta peraturan dan ketentuan eksternal yang berlaku.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan efektivitas manajemen risiko pada industri perbankan adalah keahlian dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko, baik yang dijalankan oleh fungsi operasional (*risk taking unit*), fungsi manajemen risiko (*risk management unit*) maupun fungsi pengendalian intern (*internal auditor*). Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih memadai, maka Bank Windu sesuai Peraturan BI No.7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 dan perubahannya Peraturan BI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, mengikutsertakan pengurus dan pejabat bank dalam program sertifikasi manajemen risiko.

Sertifikasi manajemen risiko merupakan standar kompetensi dan keahlian minimal yang wajib dipenuhi oleh pengurus dan pejabat di industri perbankan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bank dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Mengingat kompleksitas dalam kegiatan usaha, maka ditetapkan tingkatan sertifikasi yang dipersyaratkan bagi pengurus dan pejabat pada masing-masing kelompok jabatan dan kelompok bank. Bank Windu telah mengikutsertakan pengurus dan pejabat bank dalam program sertifikasi manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan pelatihan penyegaran (*refreshment training*) terhadap pengurus dan pejabat bank yang telah lulus program sertifikasi manajemen risiko.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Kinerja Keuangan di Tahun 2011

Total aktiva Bank Windu berhasil meningkat 48,19% dari Rp 4,35 trilyun di akhir tahun 2010 menjadi Rp 6,45 trilyun di akhir tahun 2011, dengan tingkat pencapaian 117,32% dari target rencana bisnis. Demikian pula, kredit mengalami pertumbuhan besar sebesar 56,20%, yaitu dari Rp 2,96 trilyun menjadi Rp. 4,63 trilyun atau mencapai 115,24% dari target semula. Kualitas kredit yang disalurkan masih terjaga baik dengan ratio NPL netto 1,12% pada akhir tahun 2011. Dana pihak ketiga meningkat 60,35%, dari posisi Rp 3,63 trilyun menjadi Rp 5,8 trilyun, atau pencapaian 123,08% dari target rencana bisnis

Bank Windu berhasil membukukan kenaikan Laba Bersih sebesar 28% dari Rp 28.29 milyar di tahun 2010 menjadi Rp 36.21 milyar pada tahun 2011. Sedangkan Laba Sebelum Pajak dibukukan sebesar Rp 48.37 milyar di tahun 2011, naik 27,93% dibandingkan dengan Rp 37.81 milyar pada tahun 2010.

Perolehan *Return On Assets (ROA)* per Desember 2011 adalah sebesar 0,96%, sedangkan tahun 2010 sebesar 1,11%. Perolehan *Return On Equity (ROE)* tahun 2011 sebesar 6,94% pada tahun 2011, sedang pada tahun 2010 sebesar 7,24%.

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan Bunga Bersih

Pendapatan Bunga Bersih meningkat sebesar Rp 55.45 milyar atau 40,79% menjadi Rp 191.42 milyar di tahun 2011 dibandingkan Rp 135.96 milyar di tahun 2010. Sedangkan Pendapatan Bunga meningkat sebesar Rp 153.10 milyar atau 45,40% menjadi Rp 490.31 milyar di tahun 2011 dibandingkan Rp 337.21 milyar di tahun 2010.

Penjabaran Pendapatan Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2011	2010
Kredit	414.999	278.518
Surat Berharga	44.347	38.936
Penempatan pada Bank Lain	10.853	7.574
Jasa Giro	2.458	536
Provisi dan Komisi Kredit	17.655	11.647
Total	490.312	337.211

Penjabaran Beban Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2011	2010
Giro	15.425	8.288
Deposito	252.449	170.632
Tabungan	17.045	11.873
Antar Bank	5.060	4.220
Lain-lain	8.910	6.235
Total	298.890	201.248

Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya pada tahun 2011 sebesar Rp 190.59 milyar di tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 148.74 milyar.

Beban Lainnya

Beban Lainnya pada tahun 2011 sebesar Rp 190.59 milyar di tahun 2011 dibandingkan posisi tahun 2010 sebesar Rp 148.74 milyar.

Laba Sebelum Pajak

Membaihnya kinerja operasional pada tahun 2011 terlihat lebih jelas pada Laba Usaha Sebelum Pajak, yang tercatat meningkat sebesar Rp 10.56 milyar atau 27,93% menjadi sebesar Rp 48.37 milyar pada tahun 2011 dibandingkan Rp 37.81 milyar di tahun 2010. Kenaikan ini seiring dengan pertumbuhan volume bisnis terutama peningkatan portofolio kredit sebesar 56,20%.

Laba Bersih

Sementara Laba Bersih pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp 36.21 milyar, meningkat sebesar 28% dibandingkan Rp 28.29 milyar di tahun 2010.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

NERACA

Total Aktiva

Total aktiva tumbuh secara signifikan sebesar 48,19% atau meningkat sebesar Rp 2.094.83 milyar, menjadi Rp 6.452.79 milyar pada tahun 2011 dibandingkan Rp 4.354.4 milyar pada tahun 2010. Tingkat pencapaian total aktiva tahun 2011 adalah sebesar 117,32% dari target rencana bisnis.

Ekuitas

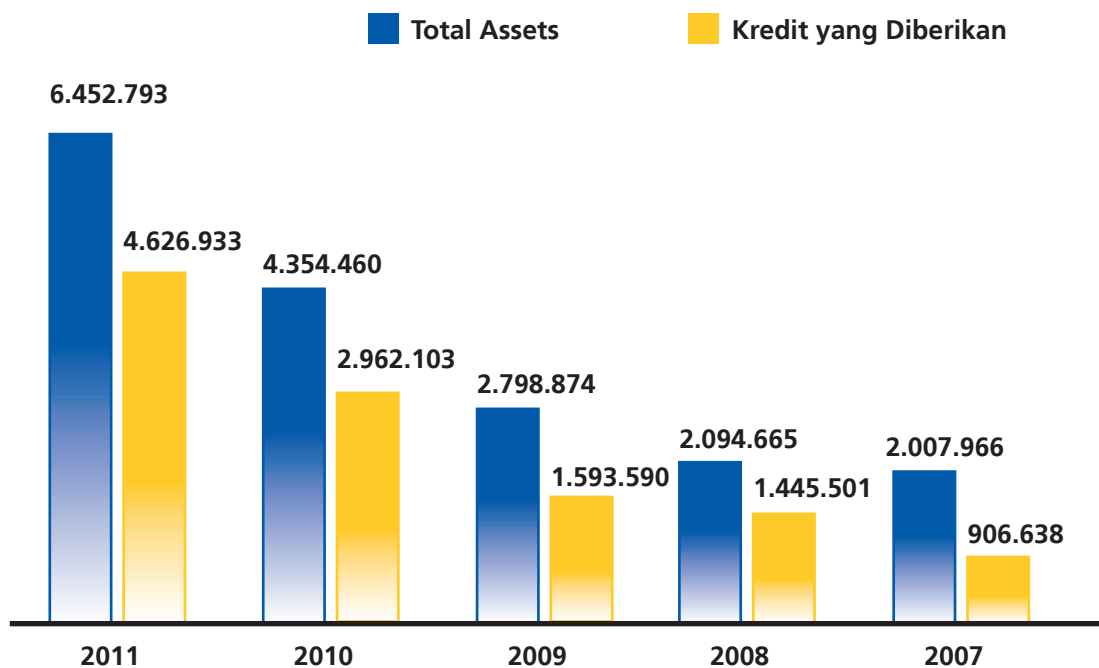
Jumlah ekuitas juga tercatat meningkat sebesar Rp 36.21 milyar atau 6,95% menjadi Rp 557.63 milyar di tahun 2011 bandingkan Rp 521.42 milyar pada tahun 2010, dengan tingkat pencapaian 99,33% dari rencana bisnis bank.

Kredit yang diberikan

Portofolio kredit yang diberikan meningkat sebesar Rp 1.664.83 milyar atau 56,20% menjadi Rp 4.626.93 milyar di tahun 2011 dibandingkan Rp 2.962.10 milyar pada tahun 2010. Realisasi penyaluran kredit tahun 2011 mencapai 115,24% dari target business plan.

Total aktiva dibanding dengan kredit yang diberikan

(dalam jutaan IDR)

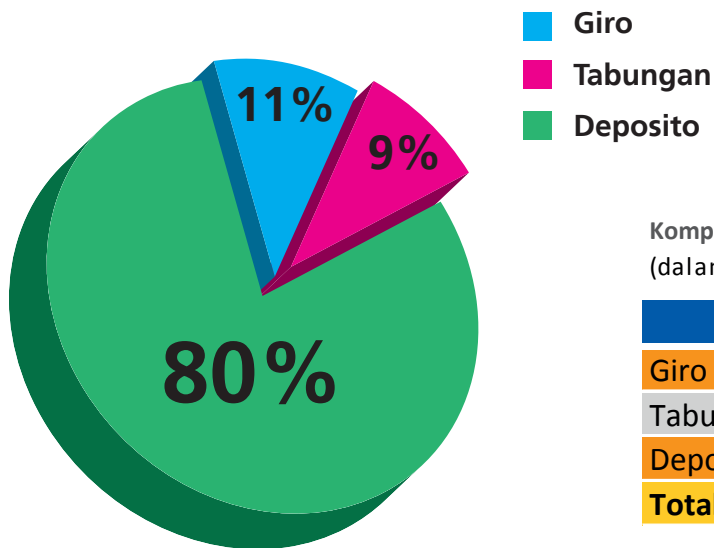


Dana Pihak Ketiga

Pada tahun 2011, Bank Windu mampu membukukan peningkatan simpanan nasabah sebesar 60,35% menjadi Rp 5.813.69 milyar, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp 2.188.00 milyar dari Rp 3.625.68 milyar di tahun 2010. Kenaikan simpanan nasabah didukung terutama oleh kenaikan deposito berjangka yang tumbuh 64,29 % menjadi Rp 4.683.33 milyar, dari Rp 2.850.66 milyar di tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi pula pada tabungan dan giro, dimana tabungan meningkat sebesar Rp 245.99 milyar atau 92,10 % menjadi Rp 513.07 milyar dari Rp 267.08 milyar di tahun sebelumnya sedangkan giro meningkat sebesar Rp 109.34 milyar atau 21,53% menjadi Rp 617.28 milyar di tahun 2011 dibandingkan dengan Rp 507.94 milyar di tahun 2010. Secara keseluruhan, peningkatan simpanan nasabah mencerminkan meningkatnya kepercayaan deposan. Realisasi pencapaian Dana Pihak Ketiga adalah sebesar 123,08% dari target rencana bisnis.

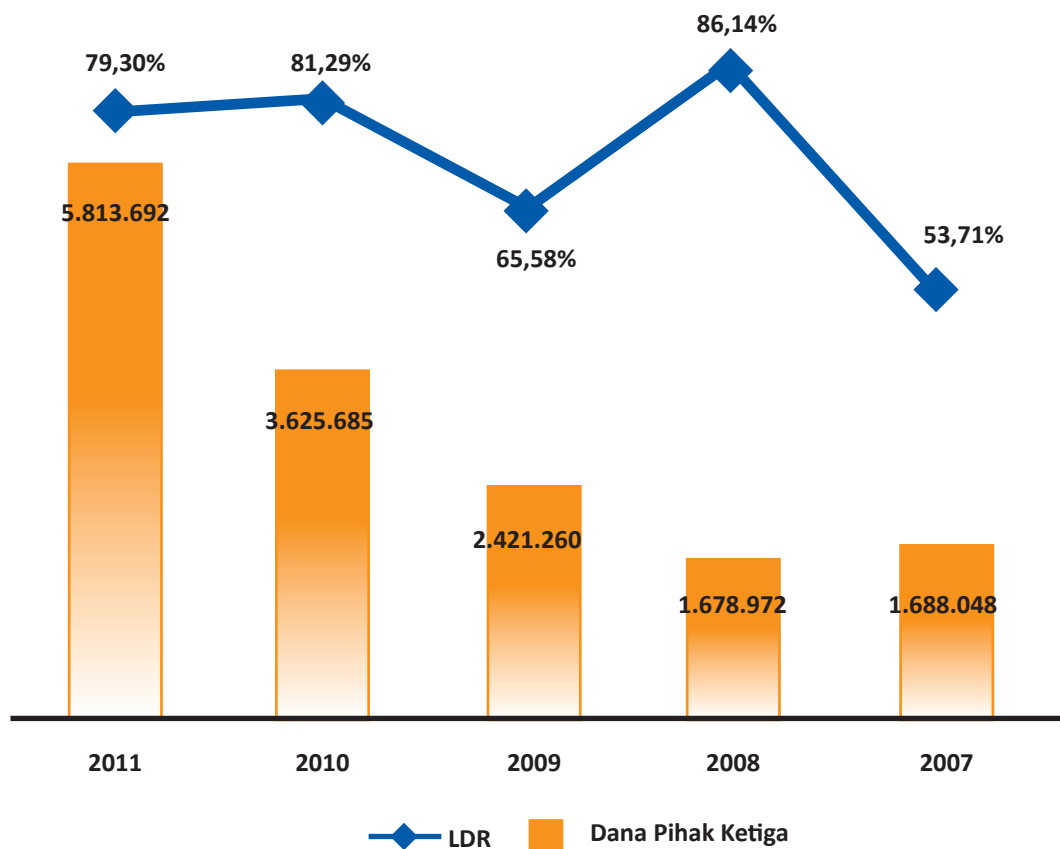
Analisis dan Pembahasan Manajemen

Komposisi Dana Pihak Ketiga



Komposisi Dana Pihak Ketiga
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2011	2010
Giro	617.282	507.940
Tabungan	513.708	267.083
Deposito	4.683.332	2.850.662
Total	5.813.692	3.625.685



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan operasional pada tahun 2011 sebesar 11,67% pada tahun 2011, sementara pada tahun 2010 sebesar 17,22%, seiring dengan kenaikan ATMR karena peningkatan penyaluran kredit secara signifikan sebesar 56,2%. Pada rencana bisnis 2012, Bank Windu merencanakan melakukan penambahan modal melalui mekanisme right issue untuk memperkuat struktur modal dan meningkatkan CAR.

Pinjaman Bermasalah

Rasio NPL (gross) per Desember 2011 sebesar 2,18%, sedangkan posisi Desember 2010 sebesar 2,08%, sedangkan NPL (net) dari 1,12% di tahun 2010 menjadi 1,42% di tahun 2011, sehingga dapat memenuhi Ketentuan Bank Indonesia yaitu NPL net dibawah 5%. Dalam penyaluran kredit Bank Windu senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman baru.

Rasio Laba terhadap Aktiva

Perolehan *Return On Assets (ROA)* per Desember 2011 adalah sebesar 0,96%, sedangkan tahun 2010 sebesar 1,11%.

Rasio Laba terhadap Ekuitas

Perolehan *Return On Equity (ROE)* tahun 2011 sebesar 6,94% pada tahun 2011, sedang pada tahun 2010 sebesar 7,24%.

Marjin Bunga Bersih

Pada tahun 2011, NIM tercatat sebesar 4,62% mengalami kenaikan sebesar 0,01% dari NIM tahun 2010 sebesar 4,61%.

Rasio Beban terhadap Pendapatan

Rasio biaya terhadap pendapatan (BOPO) posisi akhir tahun 2011 sebesar 92,97%, sedangkan akhir tahun 2010 sebesar 91,21%.

Rasio Pinjaman terhadap Simpanan

Rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) per Desember 2011 sebesar 79,30% dibandingkan 81,29% per Desember 2010.



Bank Windu menyadari, sebagai perusahaan public meyakini bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* secara luas dan menyeluruh akan berkontribusi pada profitabilitas nilai tambah bagi *stakeholder*, dan kelanjutan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Untuk itu, kami berusaha menjunjung tinggi prinsip transparansi perusahaan dan mengawasi pelaksanaan praktek-praktek GCG sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Ruang lingkup implementasi GCG di Bank Windu meliputi pemantauan dan pengelolaan terhadap strategi usaha, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan produk, layanan dan jaringan, proses manajemen risiko dan pengendalian intern.

Sebagai institusi yang bergerak di bidang perbankan dan perusahaan publik, Bank Windu dalam melaksanakan implementasi GCG berpedoman pada :

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam LK) No.IX.1.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004.
- Peraturan Bursa Efek Jakarta No. 1-A/Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004.

Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG minimal harus diwujudkan dalam:

- Efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern Bank
- Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal
- Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
- Rencana strategis Bank
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Dalam menerapkan GCG, Bank Windu berupaya untuk membangun budaya perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip tersebut senantiasa diterapkan dalam kegiatan bisnis dan pelaksanaan operasional Bank sehari-hari.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Sebagai Pedoman bagi pelaksanaan GCG, Bank Windu telah memiliki Pedoman Pelaksanaan GCG yang antara lain mengatur etika bisnis dan pedoman perilaku, Rapat Umum Pemegang Saham, pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, komite-komite penunjang Dewan Komisaris serta pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan GCG juga didasarkan pada aturan-aturan internal lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip GCG.

Pada tahun 2011 Bank Windu melakukan revisi terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk dapat mengakomodasi perubahan regulasi dan perkembangan kondisi internal Bank Windu, telah disosialisasikan melalui Surat Edaran No.003/BW/SE-DIR/V/11 Tanggal 4 Mei 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah imbalan, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta menghasilkan keputusan-keputusan penting yang sejalan dengan arah dan kebijakan Bank.

Selama tahun 2011, Bank Windu telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, meliputi:

- I. Pada tanggal 28 Juni 2011, Bank Windu menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang menghasilkan keputusan ;
 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2010 dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "Mulyamin Sensi Suryanto" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku 2010, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2010.
 2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2010 sebesar Rp 28.292.818.495,00 (Dua puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah), seluruhnya digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
 3. Mengubah dan Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

-	Direktur Utama	:	HERMAN SUJONO
-	Wakil Direktur Utama	:	HENDRI KURNIAWAN
-	Direktur -----	:	TOHIR SUTANTO
-	Direktur -----	:	nyonya SETIAWATI SAMAHITA
-	Komisaris Utama	:	nyonya SJERRA SALIM
-	Komisaris -----	:	Insinyur SYAMSUAR HALIM
-	Komisaris (independen)	:	MOHAMAD HASAN
-	Komisaris (independen)	:	DONNY PRADONO SULEIMAN *)
4. Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan dari anggota Direksi.
5. Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.
6. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2011, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut
7. Menerima baik dan menyetujui Laporan Direksi mengenai realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas I.

Pengangkatan mana efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2011, khusus untuk pengangkatan Bpk. Donny Pradono Suleiman sebagai komisaris (independen) pengangkatannya baru efektif terhitung sejak mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

*) Berdasarkan surat Surat BI No.13/126/DPB2/TPB 2-7 tanggal 8 Desember 2011, pengajuan Calon Komisaris Independen belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

8. Menyetujui Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau *Corporate Secretary*, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akte notaris tersendiri, mengenai segala keputusan agenda Rapat ini, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akte yang diperlukan, memohon persetujuan dan/atau melaporkannya kepada instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keputusan agenda Rapat di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
- II. Selanjutnya, pada tanggal 28 Juni 2011 juga telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan memutuskan keputusan penting seperti :

Menerima baik dan menyetujui : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 3 butir b menjadi sebagai berikut: "mengalihkan atau melepaskan hak dan kepentingan atau mengagunkan kekayaan Perseroan untuk jumlah melebihi Rp 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar Rupiah) atau equivalennya dalam mata uang lain sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih sebagaimana dicatat dalam neraca Perseroan yang telah disetujui oleh RUPS Tahunan Perseroan yang terakhir, dalam suatu transaksi".

Dewan Komisaris dan Direksi

Sistem pengelolaan perusahaan dilakukan secara dual-control dimana terdapat pemisahan yang jelas antara fungsi dan tanggung jawab Direksi yang bertanggung jawab atas kepengurusan Bank sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas fungsi pengawasan Bank.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank WIndu:

- Komisaris Utama : Sjerra Salim
- Komisaris : Syamsuar Halim
- Komisaris Independen : Mohamad Hasan
- Direktur Utama : Herman Sujono
- Wakil Direktur Utama : Hendri Kurniawan
- Direktur : Tohir Sutanto
- Direktur : Setiawati Samahita

Sehubungan dengan adanya hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2011, terdapat salah satu anggota dari Dewan Komisaris dan Direksi yang mengakhiri jabatannya sesuai hasil keputusan tersebut, diantaranya :

- Komisaris Independen : Maman Rachman (sampai dengan tanggal 28 Juni 2011)
- Direktur : Donny Pradono Suleiman (sampai dengan tanggal 28 Juni 2011)

Dewan Komisaris

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris sudah berjalan dengan cukup efektif. Komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 terdiri dari 4 (empat) orang; 2 (dua) di antaranya adalah Komisaris Independen. Selanjutnya, mulai tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan akhir Tahun 2011 terdiri dari 3 (tiga) orang; 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Komposisi Dewan Komisaris tersebut telah terjadi pergantian sejak diadakannya RUPS pada tanggal 28 Juni 2011 dimana salah satu Komisaris Independen mengundurkan diri, pemberhentian Direktur Kepatuhan untuk kemudian diangkat menjadi Komisaris Independen, namun demikian pengajuan Komisaris Independen baru tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Di samping itu pada Semester II tahun 2011 ini juga telah diajukan permohonan pengalihan status satu Komisaris untuk menjadi Komisaris Independen, namun tidak mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sesuai surat No.13/126/DPB2/TPB 2-7 tanggal 08 Desember 2011 perihal Komposisi Pengurus bank Saudara. Bank Windu sedang mempersiapkan kandidat untuk melengkapi kekurangan anggota Dewan Komisaris Independen untuk memenuhi komposisi tersebut.

Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan seluruh anggota Dewan Komisaris dinilai telah memadai. Sehubungan dengan persyaratan sertifikasi manajemen risiko oleh BSMR, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratannya. Anggota Dewan Komisaris Bank telah mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan keluarganya serta remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima dengan jelas, dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Tata Kelola Perusahaan

Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank Windu, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

Dewan Komisaris senantiasa berusaha untuk melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi terhadap temuan Auditor Internal, Auditor Eksternal dan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia. Pemantauan telah dilaksanakan secara optimal, termasuk dengan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapat perhatian Direksi. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris selama tahun 2011 telah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala serta memberikan nasihat kepada Direksi. Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sebanyak 7 (tujuh) kali dan rapat telah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, sehingga telah memenuhi ketentuan BI minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan telah berjalan secara independen. Semua anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi lainnya. Penggantian dan atau pengangkatan setiap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris memahami kewajibannya untuk melaporkan ke Bank Indonesia apabila terjadi pelanggaran yang dapat membahayakan usaha Bank. Namun, selama ini tidak pernah ditemukan pelanggaran peraturan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Bank, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait. Dewan Komisaris terlibat dalam mengarahkan penyusunan Rencana Bisnis Bank dan melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja serta pengaturan lainnya secara tertulis. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, antara lain dengan kehadiran di kantor Bank untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris telah dilaksanakan berdasarkan azas musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik serta telah diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait. Hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi atas aktivitas usaha bank

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris per Desember 2011 :

Nama	Jabatan	Persetujuan BI	RUPS LB	RUPS Tahunan
Sjerra Salim	Komisaris Utama	28-Des-2007	14 Januari 2010	28 Juni 2011
Syamsuar Halim	Komisaris	24-Jun-2003	14 Januari 2010	28 Juni 2011
Mohamad Hasan	Komisaris Independen	07-Jun-2010	-	28 Juni 2011
Donny Pradono Suleiman*	Komisaris Independen	-	-	28 Juni 2011
Maman Rachman**	Komisaris Independen	16-Nop-2009	14 Januari 2010	24 Juni 2010

*) Berdasarkan surat Surat BI No.13/126/DPB2/TPB 2-7 tanggal 8 Desember 2011, pengajuan Calon Komisaris Independen belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

**) Telah mengakhiri jabatannya sebagai Komisaris Independen, sesuai hasil RUPS tanggal 28 Juni 2011

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris saat ini berlaku sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Bank Windu yang akan diselenggarakan pada tahun 2011.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pedoman GCG Bank Windu mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha bank, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan arahan kepada Direksi;
3. Melakukan pengawasan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kebijakan strategis Bank Windu;
4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia serta hasil pengawasan dari pihak lain;
5. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia maksimal 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank Windu.
6. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;

Tata Kelola Perusahaan

7. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank Windu, kecuali:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Windu atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Dewan Komisaris wajib melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan, terutama dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan dan strategi Bank.
- b. Rekomendasi Dewan Komisaris
- Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko menyampaikan rekomendasi sehubungan dengan kinerja Bank Windu tahun 2011 sebagai berikut:
1. Dilakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi maupun Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan. Dalam kebijakan remunerasi dipertimbangan nilai kontribusi masing-masing jabatan terhadap pencapaian sasaran strategis; nilai kontribusi dicerminkan oleh nilai jabatan yang diperoleh dari hasil evaluasi jabatan; nilai jabatan dijadikan sebagai dasar pemberian kompensasi (remunerasi) kepada pemangku jabatan; perbedaan remunerasi mendukung terwujudnya prinsip remunerasi yang adil dan kompetitif.
 2. Lebih ditingkatkan praktek tata kelola Bank yang sehat (*Good Corporate Governance*) dan penerapan manajemen risiko yang meliputi *risk control factor* Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi; Kebijakan, Prosedur dan Limit; Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko; dan Pengendalian Intern, disebabkan situasi lingkungan eksternal yang mengalami perkembangan pesat dan internal Bank Windu yang juga mengalami perkembangan akan diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha.
 3. Dari hasil penilaian profil risiko yang meliputi penetapan tingkat Risiko dan penetapan peringkat profil Risiko mengacu dan diselaraskan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko atau *Risk Based Bank Rating (RBBR)* serta ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- c. Rapat Dewan Komisaris
- Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali selama tahun 2011, sehingga telah memenuhi ketentuan yakni minimal 4 (empat) kali dalam setahun. Berikut adalah frekuensi penyelenggaraan rapat dan kehadiran anggota pada rapat Dewan Komisaris selama tahun 2011.

Rapat Dewan Komisaris							
No	Tanggal	Agenda Rapat	SS	SH	MR	MH	DPS*
1.	10 Jan 2011	Mengadakan Inventarisasi tugas-tugas Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan, yang masih harus diselesaikan sehubungan dengan penutupan tahun 2011	✓	✓	✓	✓	x
2.	20 Jan 2011	Mengadakan koordinasi tugas-tugas Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan evaluasi efektifitas pelaksanaan tugas komite	✓	✓	✓	x	x
3.	18 Apr 2011	Melakukan pembahasan beberapa hasil pengawasan Bank Indonesia (penggantian <i>core banking system</i> ; realisasi pemanfaatan biaya pendidikan pegawai; upaya pencegahan <i>fraud</i>)	✓	✓	✓	✓	x
4.	12 Jul 2011	Pembagian tugas Dewan Komisaris, penjadwalan ulang rapat, pembentukan komite	✓	✓	x	✓	✓
5.	08 Sep 2011	Membahas persiapan rapat dengan Direksi tanggal 8 September 2011	✓	✓	x	✓	✓
6.	12 Sep 2011	Membahas hasil rapat dengan Direksi tanggal 8 September 2011	✓	✓	x	✓	✓
7.	27 Nov 2011	Kesiapan penyampaian RBB 2012, peningkatan system pengendalian risiko dan <i>internal control</i> , membahas surat Bank Indonesia No.12/108/DPB 2/TPB 2-7 Tanggal 20 Oktober 2011	✓	✓	x	✓	x
Total Kehadiran Rapat			7	7	3	6	3

Keterangan :

*) Berdasarkan surat Surat BI No.13/126/DPB2/TPB 2-7 tanggal 8 Desember 2011, pengajuan Calon Komisaris Independen belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

SS = Sjerra Salim, SH= Syamsuar Halim, MR= Maman Rachman, MH= Mohamad Hasan, DPS=Donny P.Suleiman

✓: Hadir x: Tidak Hadir

Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris telah berperan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dengan menjalankan fungsi pengarahan dan pengawasan secara baik. Selama tahun 2011, Dewan Komisaris tidak menemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank Windu.

Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah melalui PBI No.8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Bank Windu telah membentuk komite-komite penunjang Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite-komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam fungsinya membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dengan mengacu kepada pedoman dan tata tertib kerja yang telah disusun untuk masing-masing Komite.

Komite Audit

Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu:

1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern
 - b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
 - c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan Bank.

Susunan Keanggotaan Komite Audit per Desember 2011 :

Donny P. Suleiman *	Ketua
Muhammad Rusjdi	Anggota (Pihak Independen)
Rusmin	Anggota (Pihak Independen)

*) Berdasarkan surat Surat BI No.13/126/DPB2/TPB 2-7 tanggal 8 Desember 2011, pengajuan Calon Komisaris Independen belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan Pembentukan Komite Audit ini sesuai SK No.023/BW/SKEP-DIR/VIII/2011 tanggal 27 Juli 2011

Keanggotaan

Komite Audit Bank Windu beranggotakan 4 (empat) orang, yaitu 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang anggota. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen, sedangkan anggota komite adalah pihak-pihak independen yang memiliki kompetensi di bidang-bidang yang dipersyaratkan. Seluruh keanggotaan Komite Audit adalah independen sehingga tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank Windu yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pada mulanya keanggotaan Komite Audit masih mengacu pada surat keputusan pembentukan Komite Audit No.051/BW/SKEP-DIR/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan anggota : Maman Rachman Ketua (juga sebagai Komisaris Independen Bank Windu), Muhammad Rusjdi Anggota (Pihak Independen) dan Rusmin Anggota (Pihak Independen), namun sehubungan dengan adanya perubahan pengurus sesuai hasil RUPS tanggal 28 Juni 2011 telah dilakukan perubahan keanggotaannya seperti tabel di atas hingga posisi akhir Desember 2011. maka masa tugas Komite dan Anggota Komite Audit ini akan berakhir sampai dengan akhir masa tugas jabatan Komisaris Independen Bank Windu, kemudian keanggotaannya dirubah seperti tabel diatas melalui Surat Keputusan No.023/BW/SKEP-DIR/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011, namun demikian salah satu pengajuan Komisaris Independen hasil RUPS tanggal 28 Juni 2011 tidak mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sehingga perlu dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tata Kelola Perusahaan

Berikut adalah frekuensi penyelenggaraan rapat dan kehadiran anggota pada rapat Komite Audit selama tahun 2011.

Rapat Komite Audit						
No	Tanggal	Agenda Rapat	Maman Rachman*	Muhammad Rusjdi	Rusmin	Donny P Suleiman**
1.	24 Mar 2011	Membahas hasil temuan pantauan pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern tahun 2011 (Mengundang Dewan Komisaris dan Divisi Audit Internal)	✓	✓	✓	x
2.	20 Jan 2011	Membahas realisasi rencana kerja Komite Audit tahun 2010, membahas rencana kerja Komite Audit tahun 2011	✓	✓	✓	x
3.	03 Agt 2011	Membahas evaluasi kinerja penerapan Audit semester I tahun 2011 (Mengundang Dewan Komisaris)	x	✓	✓	✓
4.	27 Sep 2011	Membahas pelaksanaan rencana audit tahun 2011, membahas temuan yang perlu mendapat perhatian dan temuan-temuan yang lain yang belum ditindaklanjuti (Mengundang Dewan Komisaris dan Divisi Audit Internal)	x	✓	✓	✓

Keterangan :

*) Sebagai Komisaris Independen hasil RUPS tanggal 24 Juni 2010 dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.

**) Berdasarkan surat Surat BI No.13/126/DPB2/TPB 2-7 tanggal 8 Desember 2011, pengajuan Calon Komisaris Independen belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

✓ : Hadir x : Tidak Hadir

Komite Audit sesuai dengan tugasnya dalam tahun 2011 juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Merekomendasikan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan audit untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Mengadakan pertemuan dengan SKAI untuk membahas hasil evaluasi efektivitas pelaksanaan tugas SKAI. Cakupan penilaian meliputi organisasi dan manajemen, profesionalisme, ruang lingkup pekerjaan, pelaksanaan audit dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
5. Mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama dan SKAI untuk membahas Laporan hasil temuan dan rekomendasi audit SKAI.
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran KAP untuk Laporan Keuangan Bank Windu 2011.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengevaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang risiko oleh manajemen dengan lingkup tugas:

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko. guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Penyelenggaraan rapat sesuai dengan kebutuhan Bank.

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko per Desember 2011 :

Donny P. Suleiman *	Ketua
Muhammad Rusjdi	Anggota (Pihak Independen)
Rusmin	Anggota (Pihak Independen)

*) Berdasarkan surat Surat BI No.13/126/DPB2/TPB 2-7 tanggal 8 Desember 2011, pengajuan Calon Komisaris Independen belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan Pembentukan Komite Pemantau Risiko ini sesuai SK No.023/BW/SKEP-DIR/VIII/2011 tanggal 27 Juli 2011

Tata Kelola Perusahaan

Keanggotaan

Komite Pemantau Risiko Bank Windu terdiri dari Ketua yang juga adalah Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang anggota pihak independen yang memiliki kapasitas, kompetensi, keahlian dan pengalaman yang diperlukan. eluruhnya memiliki integritas dan moral yang baik. Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah independen sehingga tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank Windu yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pada mulanya keanggotaan Komite Audit masih mengacu pada surat keputusan pembentukan Komite Audit No.052/BW/SKEP-DIR/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan anggota : Maman Rachman Ketua (juga sebagai Komisaris Independen Bank Windu), Muhammad Rusjdi Anggota (Pihak Independen) dan Rusmin Anggota (Pihak Independen), namun sehubungan dengan adanya perubahan pengurus sesuai hasil RUPS tanggal 28 Juni 2011 telah dilakukan perubahan keanggotaannya seperti tabel di atas hingga posisi akhir Desember 2011, maka masa tugas Komite dan Anggota Komite Pemantau Risiko ini akan berakhir sampai dengan akhir masa tugas jabatan Komisaris Independen Bank Windu, kemudian keanggotaannya dirubah seperti tabel diatas melalui Surat Keputusan No.023/BW/SKEP-DIR/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011, namun demikian salah satu pengajuan Komisaris Independen hasil RUPS tanggal 28 Juni 2011 tidak mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sehingga perlu dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah frekuensi penyelenggaraan rapat dan kehadiran anggota pada rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2011.

Rapat Komite Pemantau Risiko						
No	Tanggal	Agenda Rapat	Maman Rachman*	Muhammad Rusjdi	Rusmin	Donny P Suleiman**
1.	20 Jan 2011	Melakukan pembahasan realisasi rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2010, membahas rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2011 dan membahas hasil temuan pantauan Kebijakan Manajemen Risiko	✓	✓	✓	x
2.	24 Mar 2011	Membahas hasil temuan pantauan kesesuaian antara Kebijakan Manajemen dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. (Mengundang Dewan Komisaris dan Divisi Manajemen Risiko)	✓	x	✓	x
3.	28 Jun 2011	Membahas berbagai informasi beberapa permasalahan satuan kerja yang perlu mendapat perhatian dan atau tidak oleh masing-masing Komite. (Mengundang Dewan Komisaris)	✓	✓	✓	x
4.	03 Agt 2011	Membahas Profil Risiko Semester I Tahun 2011, Persiapan Penerapan Risk Based Bank Rating (RBBR), Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di kantor-kantor cabang. (Mengundang Dewan Komisaris dan Divisi Manajemen Risiko)	x	✓	✓	✓

Keterangan :

*) Sebagai Komisaris Independen hasil RUPS tanggal 24 Juni 2010 dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.

***) Berdasarkan surat Surat BI No.13/126/DPB2/TPB 2-7 tanggal 8 Desember 2011, pengajuan Calon Komisaris Independen belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

✓ : Hadir x : Tidak Hadir

Komite Pemantau Risiko sesuai dengan tugasnya dalam tahun 2011 juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Tata Kelola Perusahaan

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Terkait dengan kebijakan remunerasi :
 1. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
 2. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- b. Terkait dengan kebijakan nominasi:
 1. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 2. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 3. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
 4. menyelenggarakan rapat Komite sesuai dengan kebutuhan Bank.

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per Desember 2011 :

Mohamad Hasan	Ketua (juga merangkap sebagai Komisaris Independen)
Syamsuar Halim	Anggota (juga merangkap sebagai Komisaris)
Andreas Basuki	Anggota (juga merangkap sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum)

Sesuai SK Pembentukan Komite Pemantau Risiko No.053/BW/SKEP-DIR/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010

Keanggotaan

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Windu terdiri dari Ketua yang juga adalah Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang anggota pihak independen yang memiliki kapasitas, kompetensi, keahlian dan pengalaman yang diperlukan. seluruhnya memiliki integritas dan moral yang baik. Seluruh keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah independen sehingga tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank Windu yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, serta dari salah satu anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris dan satu lagi dari Pejabat Eksekutif yang mewakili dari Divisi Sumber Daya Manusia.

Berikut adalah frekuensi penyelenggaraan rapat dan kehadiran anggota pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2011.

No	Tanggal	Agenda Rapat	MH	SH	AB
1.	24 Mar 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan pemberian bonus Dewan Komisaris, Direksi serta karyawan - Pembahasan penyesuaian gaji Dewan Komisaris, Direksi serta karyawan (Mengundang Dewan Komisaris)	✓	✓	✓
2.	24 Mar 2011	Pembahasan permasalahan kepegawaian (SDM), Pendidikan dan latihan pegawai, serta melakukan pengevaluasian kebijakan remunerasi. (Mengundang Dewan Komisaris)	✓	✓	✓
3.	09 Mei 2011	Pembahasan beberapa permasalahan SDM tentang rekrutmen pegawai, anggaran pengembangan SDM dan penerapan system grading. (Mengundang Dewan Komisaris)	✓	✓	✓
4.	10 Juni 2011	Pembahasan pengajuan Komisaris Independen (Bpk. Donny P. Suleiman dan Bpk. Syamsuar Halim) (Mengundang Dewan Komisaris)	✓	✓	✓
5.	11 Jul 2011	Pembahasan Pengajuan Direktur Kepatuhan (Mengundang Dewan Komisaris)	✓	✓	✓
6.	03 Agt 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Adminstrasi Personalia dan Payroll - Kebijakan Pinjaman Karyawan dan Sisdur Pinjaman - Kebijakan Rekrutmen dan Beban Tenaga Kerja - Sisdur Pinjaman Anggota Direksi - Lain-lain (Mengundang Dewan Komisaris)	✓	✓	✓

Keterangan:

✓ : Hadir x : Tidak Hadir MH : Mohamad Hasan SH : Syamsuar Halim AB : Andreas Basuki

Tata Kelola Perusahaan

Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan tugasnya dalam tahun 2011 melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang ditetapkan oleh Bank dikaitkan dengan pelaksanaannya.
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan (realisasi) pembayaran remunerasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi (untuk disampaikan kepada RUPS) dan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan (untuk disampaikan kepada Direksi).
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang akan diajukan kepada Bank Indonesia untuk kemudian persetujuan Bank Indonesia disampaikan kepada RUPS.
5. Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang akan diangkat menjadi Anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Direksi

- Jumlah dan komposisi anggota Direksi Bank Windu per 31 Desember 2011, adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Persetujuan BI	RUPS Luar Biasa	RUPS Tahunan
Herman Sujono	Direktur Utama	24-Sep-2009	14 Januari 2010	28 Juni 2011
Hendri Kurniawan	Wakil Direktur Utama	16-Nop-2009	14 Januari 2010	28 Juni 2011
Tohir Sutanto	Direktur	24-Jun-2003	14 Januari 2010	28 Juni 2011
Setiawati Samahita	Direktur	08-Feb-2010	14 Januari 2010	28 Juni 2011
Donny P. Suleiman *	Direktur	06-Feb-2001	14 Januari 2010	24 Juni 2010 Dan Berakhir 28 Juni 2011

*) Sesuai Hasil RUPS Tahunan Tgl 28 Juni 2011 dilakukan Pengangkatan dan Perubahan jabatan dari Direktur Kepatuhan menjadi Komisaris Independen efektif setelah mendapat persetujuan BI. Namun Berdasarkan surat Surat BI No. 13/126/DPB2/TPB 2-7 tanggal 8 Desember 2011, pengajuan Calon Komisaris Independen belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

- Seluruh anggota Direksi Bank Windu berdomisili di Indonesia.
- Direktur Utama Bank Windu berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional.
- Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance*, Direksi Bank Windu tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pernyataan tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan.
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Seluruh anggota Direksi Bank Windu telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Direksi bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan Bank. Tugas pokok Direksi, adalah sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengelola Bank;
2. Merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan;
3. Memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha;
4. Menguasai, memelihara, dan mengelola kekayaan Bank;
5. Menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank;
6. Melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut kepada RUPS Tahunan.

Pelatihan yang diikuti oleh Direksi

Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal	Lokasi
•Dampak Perekonomian bagi Dunia Perbankan	Bank Windu (Pembicara Pengamat Ekonomi Bp.Faisal Basri dan Motivator Hendrik Iim) LPI	29 Jan 2011	Hotel Red Top Jakarta
•Pelatihan PSAK "Sosialisasi Impairment (<i>Collective and Individual</i>) dan <i>Unwinding Interest</i> "		15-16 April 2011	Ruang Serba Guna Bank Windu Lt.9 Equity Tower Jakarta
•Pelatihan Sistem Pengendalian Internal Bank Windu	Bank Windu	27 Mei 2011	Hotel Ibis Slipi Jakarta
•Pelatihan ESQ	Bank Windu pembicara Motivator Anthony Dio Martin Talents Indonesia	22 Oktober 2011	Hotel Novotel Mangga Dua Jakarta
•Pelatihan <i>Risk Based Banking Rating</i> dan <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko		11 November 2011	Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
•Pelatihan <i>Risk Based Bank Rating</i>	Bank Windu	12 Desember 2011	Ruang Serba Guna Bank Windu Lt.9 Equity Tower Jakarta
• <i>Workshop</i> Peraturan Pasar Modal	PT.Duta Pertiwi Mukti	28 Januari 2011	Hotel Aryaduta Jakarta
•Pelatihan <i>Prudential Credit</i>	Bank Indonesia	01 Maret 2011	Menara Radius Prawiro, lantai 25 Bank Indonesia Jakarta
•Pelatihan penyusunan buku pedoman pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum sesuai PBI No.13/2/PBI/2011	Jakarta Finance Consultancy	10 November 2011	Hotel Acacia Jakarta

Komite-Komite Eksekutif di bawah Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2011, terdapat 5 (lima) komite di Bank Windu, yang terdiri dari :

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

Komite Aset dan Liabilitas bertugas mengelola aset dan kewajiban Bank. Secara lebih luas, ALCO juga memiliki tugas mengelola likuiditas, manajemen suku bunga, manajemen mata uang asing dan manajemen investasi serta manajemen gapping.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Direksi dalam menelaah kebijakan dan pendelegasian tanggung jawab untuk menentukan kebijakan dan prosedur, dan memastikan bahwa unit bisnis telah melaksanakan dengan tepat strategi yang telah disetujui oleh Direksi.

Komite Kebijakan Perkreditan

Merupakan Komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijaksanaan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan langkah-langkah perbaikan.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan penggunaan Teknologi Informasi Bank termasuk memberikan rekomendasi kepada Direksi berkaitan perumusan Rencana Strategis TI yang searah dengan Rencana Strategis Bank, perumusan kebijakan dan prosedur TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI serta memantau kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI dan kebutuhan pengguna TI untuk mendukung kegiatan usaha Bank.

Komite Kredit

Komite Kredit bertugas memberikan persetujuan kredit maupun perpanjangan kredit sampai batas kredit yang ditentukan oleh Direksi dan memelihara kualitas kredit yang diberikan sehingga penentuan kualitas kredit dan pembentukan penyisihan aktiva produktif dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank.

Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan Rapat Direksi

No	Tanggal	Agenda Rapat	HS	HK	THS	SS	DPS*
1.	20 Jan 2011	Presentasi <i>Business Plan</i> 2011; Presentasi UKM	✓	✓	✓	✓	✓
2.	01 Feb 2011	Performance Januari 2011; KPI Finalisasi; AYDA dan Jaminan lain; <i>Credit Factory Improvement, Temenos Progress, Wyatt Progress</i>	✓	✓	✓	✓	✓
3.	10 Feb 2011	<i>Key Performance Indicator (KPI)</i> ; Bonus; Biaya Gedung Kantor Cabang & Kantor Fungsional; Lain - Lain : Sistem IT-Temenos, Tabungan Bersama, <i>Spread RAK</i> , dll.	✓	✓	✓	✓	✓
4.	25 Feb 2011	Performance Januari 2011, GAP vs Target 2011; Presentasi Kadiv: Berupa <i>monitoring monthly action plan</i> & realisasi kendala - kendala (<i>consumer banking, skai, manrisk, it, credit operation & legal, treasury, sdm & ga; Regional head performance & pipeline</i>)	✓	✓	✓	✓	✓
5.	17 Mar 2011	Performance Januari s/d Februari 2011 & <i>Progress</i> UKM; <i>Progress Report Project (Commercial Credit Admin Centralization Project Jadetabek)</i>	✓	✓	✓	✓	✓
6.	25 Mar 2011	Bonus Kinerja tahun 2010	✓	✓	✓	✓	✓
7.	11 Apr 2011	Pembahasan UMK; Kredit bermasalah; <i>Management Development Program</i>	✓	✓	✓	✓	✓
8.	27 Apr 2011	<i>Credit Factory & Credit Process</i> ; Kredit Bermasalah	✓	✓	✓	✓	✓
9.	28 Apr 2011	KPI & PPAP	✓	✓	✓	✓	✓
10.	09 Mei 2011	Struktur Organisasi; KPI; Peleburan UKM ke KKB	✓	✓	✓	✓	✓
11.	18 Mei 2011	KPI; Struktur Organisasi; Kenaikan <i>salary</i>	✓	✓	✓	✓	✓
12.	01 Jun 2011	KPI & Bonus	✓	✓	✓	✓	✓
13.	16 Jun 2011	KPI, Revisi RBB, <i>Grading</i>	✓	✓	✓	✓	✓
14.	21 Jun 2011	Revisi RBB; <i>Grading</i> ; Fasilitas <i>Payment & Purchase Activity</i> ; Persiapan Temenos	✓	✓	✓	✓	✓
15.	07 Jul 2011	Penunjukan atau penugasan sementara Direktur yang melaksanakan tugas Direktur yang menjalankan Fungsi Kepatuhan	✓	✓	✓	✓	x
16.	03 Okt 2011	Struktur Organisasi; RBB 2012	✓	✓	✓	✓	x
17.	19 Okt 2011	RBB 2012; SDM meliputi <i>salary structure</i> , kriteria kenaikan gaji, kewenangan rekrutmen/rotasi/mutasi/promosi/, usulan tunjangan transport ke dalam komponen gaji bagi yang diberikan fasilitas kendaraan	✓	✓	✓	✓	x
18.	14 Nov 2011	RBB 2012; <i>Task Force</i> perluasan jaringan cabang	✓	✓	✓	✓	x
19.	14 Des 2011	Pembahasan penunjukan pejabat eksekutif sementara yang membawahi fungsi kepatuhan	✓	✓	✓	✓	x
Total Kehadiran Rapat			19	19	19	19	14

Keterangan :

✓ : Hadir x : Tidak Hadir

HS : Herman Sujono

DPS : Donny P. Suleiman

HK : Hendri Kurniawan

SS : Setiawati Samahita

THS : Tohir Sutanto

*) Berdasarkan surat Surat BI No.13/126/DPB2/TPB 2-7 tanggal 8 Desember 2011, pengajuan Calon Komisaris Independen belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank Windu berkomitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan institusi lainnya. Penerapan pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank Windu mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 29 September 1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Fungsi pokok Direktur Kepatuhan adalah memastikan kepatuhan setiap unit usaha terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan prosedur bank yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian, memastikan pelaksanaan aktivitas usaha tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat Bank kepada Bank Indonesia dan memastikan penerapan GCG pada Bank Windu. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktur Kepatuhan melakukan uji kepatuhan atas setiap rancangan kebijakan, prosedur dan limit.

Dalam melaksanakan fungsinya di atas, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Bank akan senantiasa meningkatkan peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan agar dapat mengantisipasi potensi risiko kegiatan usaha secara lebih dini.

Penerapan Fungsi Auditor Internal

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Bank Windu membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang merupakan satuan kerja yang langsung bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bekerja berdasarkan rencana kerja audit tahunan yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Direktur Utama. Hasil pemeriksaan SKAI beserta rekomendasi tindak lanjutnya dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang direpresentasikan oleh Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Selanjutnya Dewan Komisaris akan mengawasi dan mengkonfirmasi bahwa manajemen telah mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan atas hasil pemeriksaan tersebut.

Di samping menjalankan aktivitas di bidang auditing, SKAI senantiasa berperan sebagai konsultan kepada pihak intern Bank Windu yang membutuhkan, khususnya dalam hal yang berkenaan dengan sistem pengendalian intern.

Secara keseluruhan, di tahun 2011 pelaksanaan fungsi pengawasan internal telah berjalan dengan baik, Bank Windu terus berupaya menjalankan sistem pengendalian intern secara efektif dan efisien. Prosedur pengawasan telah dilaksanakan tanpa pengecualian, dengan mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern.

Penerapan Fungsi Auditor Eksternal

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan Bank, pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2011, Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit sesuai standar profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan bank disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2011, Direksi Bank Windu menunjuk Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2011.

Bank Windu senantiasa berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan manajemen untuk dapat meminimalkan kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Sebagai wujud komitmen Bank terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan penerapan manajemen risiko dalam praktek bisnis perbankan yang sehat dan prudent, Bank Windu melakukan fungsi pengawasan menyeluruh yang bersifat independen dan obyektif. Fungsi ini dijalankan oleh Divisi Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Fungsi pengawasan intern dilaksanakan dengan metode audit yang sistematis dan menggunakan pendekatan risk based sehingga prioritas pengawasan akan dilakukan terhadap proses atau unit yang memiliki risiko lebih besar.

Di tahun 2011, secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukkan hasil yang memadai. Bank Windu berupaya menjalankan sistem pengendalian intern secara efektif dan efisien, dan prosedur pengawasan telah dilaksanakan tanpa pengecualian, dengan mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern. Kasus-kasus penyimpangan yang terjadi selama tahun 2011 umumnya terkait dengan ketidakdisiplinan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, permasalahan yang terkait dengan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Manajemen dan langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko.

Unit pengawasan dan unit kepatuhan telah dibentuk untuk menjamin proses bisnis berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern dan ekstern.

Penerapan Manajemen Risiko

Bank Windu telah menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikelola dan dilaporkan yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertugas menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko untuk menghadapi risiko yang timbul, memperbaiki dan menyempurnakan penerapan Manajemen Risiko.

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Windu meliputi pengawasan aktif manajemen, penerapan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Bank juga telah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta melakukan penerapan sistem pengendalian risiko.

Pada dasarnya, proses manajemen risiko dilakukan oleh masing-masing unit, mengingat risiko yang dihadapi merupakan risiko individual yang melekat pada produk, transaksi maupun proses pada unit yang bersangkutan. Untuk membantu pengelolaan manajemen risiko, Bank Windu telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab melakukan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi dan mengkaji secara berkala proses manajemen risiko, termasuk pengkajian setiap usulan produk dan aktivitas baru.

Dalam rangka proses manajemen risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah membuat Laporan Profil Risiko telah dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang perubahan atas Surat Edaran No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, mekanisme penilaian laporan Profil Risiko dengan melakukan penetapan tingkat dan peringkat risiko mengacu dan diselaraskan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan risiko atau *Risk Based Bank Rating* (RBBR) serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku. Laporan profil risiko dibuat secara berkala yang kemudian dilaporkan kepada Direksi untuk kemudian dilakukan pembahasan dalam Komite Manajemen Risiko.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penerapan GCG Bank Windu terutama yang menyangkut pelaksanaan keterbukaan, selain memastikan agar Bank Windu mematuhi ketentuan dan peraturan pasar modal yang berlaku. Penunjukan Sekretaris Perusahaan untuk memelihara citra Bank Windu dan melindungi kepentingan Bank Windu melalui terbentuknya komunikasi dan hubungan yang baik dengan segenap stakeholder melalui berbagai aktivitas hubungan masyarakat dan mewakili Direksi dalam setiap hal yang berhubungan dengan komunikasi eksternal, khususnya kepada investor, masyarakat pasar modal dan pemegang saham.

Fungsi Pokok Sekretaris Perusahaan yaitu:

1. Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan pihak luar, khususnya investor, masyarakat pasar modal, lembaga-lembaga terkait dan pemegang saham.
2. Memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan tentang pasar modal.
3. Mendukung penyelenggaraan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan lainnya.
4. Melakukan aktivitas yang mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan, terutama menyangkut kinerja Bank Windu melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sekretaris Perusahaan Bank Windu dijabat oleh Sdr. Andreas Herman Basuki, beliau memulai karirnya di bidang Perbankan sejak tahun 1990 dengan posisi terakhir sebagai Kepala Biro Direksi merangkap Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko. Meraih gelar Sarjana Muda Manajemen Informatika dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 1988 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1990.

Tata Kelola Perusahaan

Transaksi dengan pihak terkait dan penyediaan dana besar

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Windu melakukan beberapa transaksi penyediaan dana dengan pihak yang terkait. Transaksi dengan pihak terkait mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Berikut laporan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar per 31 Desember 2011:

Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Baki Debet (dalam jutaan Rupiah)
Pihak Terkait	28	36.050
Debitur Inti :		
a. Individu	1	63.262
b. Group	4	1.203.598

Bank memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana dengan pihak terkait dan penyediaan dana besar yang mencakup penyediaan dana kepada pihak terkait wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Selain itu, guna meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana dengan pihak terkait, Bank Windu membuat serta mengkinikan daftar rincian pihak terkait yang merupakan rincian pihak-pihak yang memiliki hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan.

Selama tahun 2011, tidak terjadi pelampauan ataupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada pihak terkait, dan laporannya telah disampaikan setiap bulan kepada Bank Indonesia.

Rencana Strategis Bank

Dalam rangka mencapai tujuan usaha Bank yang berpedoman kepada visi dan misi Bank, Bank Windu menyusun Rencana Bisnis yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010, Surat Edaran Bank Indonesia No.12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank. Bank Windu membuat rencana bisnis setiap tahun dengan persetujuan Dewan Komisaris yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha serta rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan.

Perencanaan Bank Windu untuk jangka pendek dan menengah secara konsisten akan diarahkan untuk peningkatan volume usaha dengan strategi dan kebijakan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kebijakan-kebijakan berikut ini yang akan dilaksanakan dalam koridor ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

Target yang akan dicapai dalam jangka menengah :

1. Target Pasiva dan Permodalan

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga mengandalkan seluruh jaringan kantor Bank sejumlah 73 outlet yang tersebar di kota-kota besar yang sudah beroperasi saat ini.

Penghimpunan DPK juga diarahkan untuk meningkatkan porsi dana murah yaitu Giro dan Tabungan, dengan menawarkan promo yang lebih menarik. Sementara dana dari Deposito Berjangka yang merupakan sumber dana terbesar bagi bank saat ini diupayakan untuk ditingkatkan lagi dan masih menjadi andalan dalam penyerapan DPK.

Permodalan Bank Windu per September 2011 sebesar Rp 545,76 milyar, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai Bank Fokus dalam peta API (Arsitektur Perbankan Indonesia). Secara konservatif, Bank Windu senantiasa menjaga ratio KPMM dalam batas dua digit.

Bank akan mengambil langkah untuk memperkuat struktur permodalan sesuai kebutuhan, melalui rights issue dengan mekanisme Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), yang dapat dibeli oleh *existing shareholders*, atau Pembeli Siaga, atau *strategic investor*, ataupun masyarakat luas / Publik.

2. Target Aktiva

Penyediaan dana akan dialokasikan terutama untuk perkreditan khususnya segmen Menengah dan Kecil. Alokasi *secondary reserve* pada surat berharga antara lain : SUN, Obligasi (Bank, Pemerintah dan Corporate), SBI, serta Penempatan Antar Bank.

Penyediaan dana dalam surat berharga akan tetap mengacu pada ketentuan yang mewajibkan pertimbangan rating, serta pertimbangan internal dari sisi risiko, keuntungan dan manfaat lainnya. Penyediaan dana juga akan lebih diutamakan dalam mata uang Rupiah, kecuali untuk beberapa transaksi yang berhubungan dengan transaksi ekspor-impor.

Penyediaan dana akan dilakukan dengan asas konservatif dan prinsip kehati-hatian, mengacu pada *Good Corporate Governance* yang selama ini sudah diterapkan dalam kegiatan operasional Bank Windu.

Penerapan manajemen risiko untuk setiap kegiatan dilaksanakan, dan pada tahap awal transaksi-transaksi penyediaan dana akan dilakukan dengan mengimplementasikan manajemen risiko agar dapat menghasilkan kualitas aktiva produktif yang prima, guna mengurangi alokasi cadangan dana yang lebih besar dari yang diperlukan.

Dalam kurun jangka waktu menengah ini, penyempurnaan sistem terus dilanjutkan untuk menunjang kegiatan operasional bank yang bertumbuh dan untuk memenuhi persyaratan Bank Indonesia.

3. Target Rentabilitas

Peningkatan rentabilitas merupakan target manajemen tahun-tahun kedepan. Pada masa mendatang perolehan laba akan terus ditingkatkan, dengan memanfaatkan pengembangan volume usaha yang akan mendorong kenaikan pendapatan bunga, serta juga mendorong peningkatan *fee based income*.

Pendapatan dari bunga kredit dan surat berharga tetap merupakan sumber pendapatan utama. Sumber pendapatan lainnya dari provisi / komisi perkreditan, provisi / komisi produk-produk treasury, dan provisi / komisi jasa operasional perbankan juga akan ditingkatkan dan dioptimalkan, termasuk meningkatkan transaksi *trade finance* dan jasa pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri, serta jasa-jasa perbankan lainnya.

Pos-pos biaya dan *overhead* akan diupayakan lebih efisien, dengan memperhitungkan penyisihan cadangan khusus aktiva. Ratio efisiensi BOPO – Biaya Operasional per Pendapatan Operasional, diusahakan secara bertahap lebih rendah dari 90%, hingga mencapai tingkat yang dianggap lebih ideal yaitu dibawah 80%.

4. Target Rasio Keuangan

Acuan utama rasio keuangan berupa rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti GWM sesuai ketentuan dikaitkan posisi LDR dan CAR, CAR > 8%, PDN < 20% dari Modal, NPL netto < 5% dan lain-lain.

Bank memiliki kebijakan internal berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga posisi rasio keuangan yang lebih aman, maka beberapa batasan ditentukan lebih konservatif, seperti CAR minimal 2 digit.

Posisi rasio rentabilitas (*ROE dan ROA*) diupayakan lebih baik lagi pada tahun – tahun mendatang dengan meningkatkan efisiensi dan perluasan sumber pendapatan. Parameter rentabilitas merupakan salah satu faktor pengukur tingkat kesehatan bank dalam perhitungan *Risk Based Bank Rating (RBBR)*.

Posisi pertumbuhan Total Asets, Permodalan, Total Kredit dan Dana Pihak Ketiga yang saling terkait tersebut diupayakan terus meningkat secara konsisten setiap tahun dalam kondisi ekonomi Indonesia yang kondusif.

5. Target Lain-lain

- Meningkatkan mutu layanan bagi nasabah dengan penerapan program *service excellence* ke semua kantor.
- Melakukan penyempurnaan prosedur operasional (SOP) disesuaikan dengan sistim TI yang baru, tingkat kompleksitas transaksi dan operasional bank, tahapan perkembangan aset dan modal bank, dan muatan integrasi sistim pengawasan internal.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan internal dan eksternal sesuai dengan kebutuhan bank terhadap tingkat kompetensi dan kapasitas ragam pekerjaan.

Tata Kelola Perusahaan

Dalam mencapai target jangka pendek dan menengah, Bank mengacu pada prinsip – prinsip bank sebagai berikut:

- Berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudent banking practices*)
- Melaksanakan kegiatan berdasarkan undang-undang, peraturan dan ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan lainnya.
- Menerapkan Etika Kerja Profesional / Etika Bankir dan Implementasi *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko, KYC atau Prinsip Mengenal Nasabah, APU/PPT.
- Memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, sesuai dengan ramburambu yang berlaku, untuk memperoleh hasil optimal, serta bermanfaat bagi Nasabah, Karyawan, Manajemen, Pemegang Saham dan Stakeholder lain, serta memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi nasional.

Transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kondisi keuangan secara komprehensif telah disampaikan dalam Laporan Keuangan.

Bank Windu telah menginformasikan produk dan layanannya kepada masyarakat melalui beberapa sarana/media promosi seperti brosur, leaflet, dan papan pengumuman di seluruh jaringan kantor Bank Windu.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Nasabah, Bank Windu telah menyampaikan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah secara triwulanan ke Bank Indonesia.

Siaran Pers 2011

Tanggal	Harian / Majalah	Berita
Minggu 9 Januari 2011	Kompas	Perluas Jaringan Kantor ke Denpasar
Senin 24 Januari 2011	Detikfinance.com	Publikasi Bank Windu incar Kredit Rp 5 T di 2011
Senin 24 Januari 2011	Infobanknews.com	Publikasi Bank Windu siap tambah 15 KC baru selama 2011 dan targetkan DPK Rp. 5,5 T
Edisi Februari 2011	Infobank	Bank Windu dekati pasar mikro
Jumat 15 April 2011	Kontan	Publikasi Kerjasama Bank Windu dengan LJ Hooker
Sabtu 16 April 2011	Kontan	Publikasi kerjasama Bank Windu dan ERA Indonesia
Edisi April 2011	Infobank	Fleksibilitas Bank Kecil, Bank Windu siap berekspansi ke bisnis mikro
Rabu 11 Mei 2011	Riau Pos	Pemberitahuan pembukaan KC Pekanbaru
Kamis 19 Mei 2011	Radar Lampung	Pengoperasian Bank Windu KC Lampung
Sabtu 24 September 2011	Haluan Riau	Grand Opening Bank Windu KC Pekanbaru
Jumat 11 November 2011	Kontan	Bank Windu mengadakan "Head Gathering" ; Penandatanganan Perjanjian kerja sama Tabungan Bersama
Jumat 16 Desember 2011	Bisnis Indonesia & Kontan	"Windu Peduli",Pengobatan gratis oleh Bank Windu dan Rotary Club di Desa Karang Asem, Bali
Selasa 20 Desember 2011	Bisnis Indonesia & Kontan	"Windu Peduli" bantuan kepada Panti Asuhan Dharma Widya Kumara di Desa Bangli Bali.
Jumat 23 Desember 2011	Kontan	"Windu Peduli", penyelenggaraan "Donor Darah" di Bank Windu.
Selasa 27 Desember 2011	Bisnis Indonesia	"Windu Peduli", mengadakan kunjungan sosial ke Panti Asuhan Yayasan Kasih Peduli Anak di Denpasar Bali

Hubungan Keuangan dan Kekeluargaan

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali Bank Windu tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali Bank Windu lainnya.

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5%

Sampai dengan posisi 31 Desember 2011, terdapat salah satu anggota Dewan Komisaris yaitu Ibu Sjerra Salim yang memiliki sahamnya lebih dari 5% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepemilikan pribadi di Bank Windu adalah sebesar 1,37%
- b. Kepemilikan melalui PT Mitra Wadah Kencana (MWK) di Bank Windu adalah 14,82%, dimana kepemilikan Ibu Sjerra Salim di MWK 25%, jadi prosentase kepemilikannya di Bank Windu melalui MWK adalah sebesar 3,70%, sehingga jumlah kepemilikan saham di Bank Windu adalah sebesar 5,07%, sedangkan untuk Direksi tidak ada yang memiliki saham yang mencapai 5% atau lebih, baik di Bank Windu, Bank Lain maupun di Perusahaan Lainnya di Indonesia maupun di luar negeri.

Tata Kelola Perusahaan

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Komisaris dan Direksi

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Windu telah memutuskan paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Komisaris dan Direksi Bank Windu.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	5	1,428	5	8,414
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	-	-	-	-
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total	5	1,428	5	8,414

Remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah	
	Direksi	Dewan Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	1	-
Di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar	3	-
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	1	5

Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang diberikan oleh Bank Windu kepada pegawainya. Gaji tersebut termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Gaji ditetapkan dan dibayarkan dengan mengacu kepada perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan skala gaji yang wajar dari peer group.

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 1:68
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1:1.25
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1:1.46
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 1:1.70

Share Option

Untuk periode Januari – Desember 2011, Bank tidak melakukan *shares option*.

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Bank Windu berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi atau menghindari adanya benturan kepentingan dalam menjalankan operasional perbankan, namun terdapat beberapa indikasi yang mengandung benturan kepentingan sampai dengan periode 31 Desember 2011, seperti :

- Bank Windu telah melakukan sewa ruang kantor Cabang Equity di Equity Tower dari PT Blue Cross Indonesia sebagai pemilik yang juga merupakan pemegang saham Bank Windu.
- Bank Windu telah melakukan sewa ruang kantor cabang Slipi di Wisma Slipi dari PT Putra Kusuma Perkasa (pemilik Teddy Salim & Aylene Salim) yang mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu pemegang saham (Komisaris Utama) Bank Windu.

Tata Kelola Perusahaan

3. Bank Windu melakukan kerjasama pembiayaan kredit kendaraan bermotor (*Joint Financing*) dengan PT.Anugerah Utama Multifinance (Gratama), namun demikian mengenai kerjasama tersebut akan dilakukan pengakhiran kerjasama dan penatausahaan akan diambil alih oleh Gratama, hal tersebut karena risk appetite berbeda dengan Bank Windu.
4. Penjualan asset Bank Windu kepada pihak terkait antara lain;
 - Plaza ABDA Lt.6 Jl.Jend Sudirman Kav.59 Jakarta Selatan dengan luas 1.119m2 (full floor)
 - Plaza ABDA Lt.8 Jl.Jend Sudirman Kav.59 Jakarta Selatan dengan luas 311m2
5. Beberapa sewa kantor kepada pihak terkait, antara lain :
 - Sewa lantai dasar Zona A gedung perkantoran Equity Tower
 - Sewa Lantai 17 Zona F Gedung Perkantoran Equity Tower

Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya

Sepanjang tahun 2011, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana, yang dihadapi Bank Windu dan upaya yang dilakukan untuk melakukan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	6	-
Total	6	-

Dari sejumlah perkara tersebut diatas, berikut penjelasannya satu persatu :

1. PT Griya Wijaya Prestige

Jenis Perkara : Perdata
Posisi Bank Windu : Tergugat

- Bank Windu bersama dengan Bank lainnya mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan atas asset-aset yang dimiliki PT Griya Wijaya Prestige (GWP) yang dijaminkannya. Tetapi oleh pengadilan dipending karena ada tuntutan wanprestasi dari PT Griya Wijaya Prestige ke Bank-bank peserta sindikasi.
- Atas tuntutan PT Griya Wijaya Prestige tersebut, sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan Bank peserta sindikasi membayar ganti rugi kepada PT Griya Wijaya Prestige, dimana porsi Bank Windu sebesar Rp. 2,3 milyar.
- Bank Windu berkeyakinan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan melalui negosiasi dan tidak akan mempengaruhi kondisi keuangan Bank dengan pertimbangan:
 1. Bank Windu sudah mencadangkan 100% dari tuntutan ganti rugi tersebut, yaitu sejumlah Rp. 2,3 milyar
 2. Bank Windu masih memiliki Hak Tagih atas PT Griya Wijaya Prestige , yang jumlahnya jauh melebihi tuntutan ganti rugi tersebut.

2. PT Diwangkara Dharma

Jenis Perkara : Perdata
Posisi Bank Windu : Tergugat

- Ada tuntutan dari seseorang yang mengaku pemilik sebelumnya (bukan pemilik yang menjamin) yang menuntut pembatalan jual beli dari sertifikat. Sudah ada tuntutan yang berkekuatan tetap yang memenangkan penuntut.
- Tuntutan tersebut tidak mempengaruhi kondisi keuangan Bank Windu, dikarenakan:
 1. Bank sudah mencadangkan PPAP 100%
 2. Bank masih dapat mengajukan tuntutan setelah ada novum baru untuk bukti tuntutan.
- Perkembangan terakhir Bank Windu kalah pada tingkat Mahkamah Agung

3. PT Krian Permai

Jenis Perkara : Perdata
Posisi Bank Windu : Turut Tergugat

- Ada tuntutan dari pemilik sebelumnya ke BPN untuk membatalkan sertifikat atas AYDA Bank Windu, jadi tuntutan bukan ke Bank Windu.
- Tuntutan dimenangkan oleh BPN, sehingga sertifikat dibatalkan.
- Saat ini sertifikat sedang dalam proses pengajuan notaris untuk dibalik nama ke Bank Windu dan jika sudah selesai baru dilakukan upaya penjualannya.

4. Bpk. Saiful Anwar

Jenis Perkara : Perdata
Posisi Bank Windu : Tergugat 2

Adanya tuntutan dari salah satu nasabah kredit Bank Windu yang bernama Bpk. Saiful Anwar yang mengalami kesulitan pembayaran kredit. Bank telah melakukan upaya-upaya penagihan dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan. Pada waktu Bank akan melakukan upaya hukum yang lebih tegas lagi untuk menagih pembayaran kredit maka Bpk. Saiful Anwar pada tanggal 13 Desember 2010 melalui kantor Advokat Sanit & Associates mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Cibinong, dengan Perkara No. Reg 175/PDT.G/2010/PN CBN tgl. 15 Desember 2010. Inti dari Gugatan tersebut adalah Bpk. Saiful Anwar ("sebagai Penggugat") mengaku tidak pernah mengajukan kredit ke Bank Windu ("sebagai Tergugat II"). Dan menurut Bpk. Saiful Anwar yang mengajukan kredit ke Bank Windu adalah temannya yaitu Bpk. Ruslan dkk ("sebagai Tergugat I") yang bekerja sama dengan Bpk. Danny (ex Kepala Cabang Bank Windu di Bogor)

Perkembangan terakhir dari permasalahan hukum ini, sesuai putusan Nomor 175/Pdt.G/2010/PN.Cbn tanggal 30 Nopember 2011 pada intinya Saiful Anwar (Penggugat) kalah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas :

- Bank Windu telah mendaftarkan kepada Balai Lelang Negara untuk melakukan proses lelang terhadap tanah dan rumah yang dijaminan oleh Saiful Anwar kepada Bank Windu, yang terletak di Jl. Pemda Kp. Muara Beres RT.01/RW.01 No. 80 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab Bogor.
- Bpk. Saiful Anwar melalui Kantor Advokat Sanit & Associates menyampaikan permohonan perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong.

5. Bpk. Andi Rachman Lio

Jenis Perkara : Perdata
Posisi Bank Windu : Tergugat 4

Jaminan SHGB 1227 dialihkan ke Debitur dengan cara Jual Beli (AJB) di Notaris Herlina, SH pada tanggal 18 September 2006, dan dimasukkan ke Bank Windu sebagai Jaminan.

Pada tanggal 10 September 2008 Bank Windu mendapat surat panggilan dari PN. Sukoharjo terkait dengan perkara No.059/Pdt.G/2008/PN. Skh dimana Bank Windu sebagai Tergugat 4.

Perkara tersebut diatas diajukan oleh para Ahli Waris dari Pemilik Sertifikat kepada :

- Rudy Setiawan / Pemilik Sertifikat (Tergugat 1)
- Andi Rachman Lio / Debitur (Tergugat 2)
- Notaris/PPAT Herlina, SH (Tergugat 3), dan
- Bank Windu (Tergugat 4).

Materi yang menjadi gugatan adalah karena : SHGB No. 1227 merupakan harta warisan (gono-gini) dari Rudy Setiawan dan almarhum istrinya, yang masih utuh dan belum di bagi, sehingga harus ada persetujuan dari para Ahli Waris bila akan dilakukan Jual Beli.

Pihak Penggugat saat ini mengajukan banding di Tingkat Mahkamah Agung (MA) karena di tingkat Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT), gugatan Penggugat kalah.

Pihak penggugat mengajukan peninjauan kembali atas perkara tersebut karena batas waktunya adalah 6 (enam) bulan dan putusan di tingkat Mahkamah Agung diterima tanggal 19 Oktober 2011.

6. Bpk. Max Hendrik

Jenis Perkara : Perdata
 Posisi Bank Windu : Terbantah III

Bank Windu telah melelang ex jaminan nasabah Donald Leonard Mamondol (Terbantah I) berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya hak milik No. 519/Lebak Bulus untuk melunasi hutang debitur.

Bpk. Max Hendrik selaku Pembantah sesuai surat bantahan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 591/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel tanggal 10 November 2011, keberatan terhadap penetapan sita eksekusi pengosongan terhadap sibandang tanah berikut bangunan tersebut di atas, karena menurutnya tanah dan bangunan tersebut adalah miliknya dan bukan milik Donald Leonard Mamondol.

Saat ini hutang debitur telah lunas dan asset telah dijual kepada pihak ketiga dengan kondisi "as is".

Penyimpangan Internal

Penyimpangan internal adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional perusahaan.

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2011, telah terjadi penyimpangan prosedur (*internal fraud*) di kantor Cabang Kelapa Gading yaitu terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh petugas *Relationship Manager* (marketing) dengan melakukan talangan dana tabungan pribadi melalui setoran tunai untuk menutup kekurangan dana nasabah/debitur akibat penarikan kliring dan beban bunga pinjaman, hal tersebut telah disampaikan ke Bank Indonesia melalui surat No.012/BW/DIR-BI/12 Tanggal 24 Januari 2012 Perihal Laporan terjadinya penyimpangan prosedur (*internal fraud*), namun demikian setelah dilakukan investigasi tidak terbukti adanya kerugian bank dan tindakan disiplin sudah dilakukan untuk pejabat-pejabat yang bersangkutan.

Berikut ini kami sajikan tabel Internal Fraud dalam 1 Tahun beserta jumlah kasus yang terjadi di Bank Windu sampai dengan posisi 31 Desember 2011, yaitu:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Selesai	-	-	-	1	-	-
Dalam proses penyelesaian di intern Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Tata Kelola Perusahaan

Buy Back Saham

Buy back saham adalah upaya mengurangi jumlah saham yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai dengan Desember 2011, Bank Windu tidak melakukan transaksi buy back saham.

Pemberian dana untuk kegiatan sosial

Sebagai wujud tanggung jawab sosial kepada sesama, tahun 2011 Bank Windu mengadakan program kunjungan dan memberikan sumbangan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang dilaksanakan pada :

No	Tanggal	Jenis kegiatan	Penerima Sumbangan
1	22 Januari 2011	Windu Peduli	Memberikan bantuan berupa sembako dan susu bayi ke Pantu Jompo & Anak Kasih Ibu, di Cipayung Jakarta Timur
2	06 Desember 2011	Windu Peduli	Pemberian bantuan berupa sembako ke Pantu Asuhan anak Yatim Piatu dan orang tidak mampu serta anak-anak jalanan. Dharma Widya Lokasi : Jl. Pucak Hyang Ukir Bangli – Bali
3	06 Desember 2011	Windu Peduli	Pemberian bantuan berupa sembako ke Yayasan Kasih Peduli Anak Lokasi : Jl. Gunung Payung No.21 Denpasar - Bali
4	07 Desember 2011	Windu Peduli – Pengobatan Gratis	Pemberian bantuan berupa Pengobatan Gratis bagi masyarakat kurang mampu di Desa Tista Gede. Bank Windu bekerja sama dengan Rotary Club Bali Lokasi : Karang Asem – Bali
5	13 Desember 2011	Windu Peduli – Donor Darah	Aksi sosial melalui Donor Darah “Setetes Darah Anda Sangat Berarti Bagi Sesama” Lokasi : Ruangan Serbag Guna Bank Windu, Equity Tower Building, Lt.9 Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot.9. Jl.Jend Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan

Peristiwa penting setelah tanggal neraca

Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan kejadian-kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance Self Assessment

Selama tahun 2011, Bank Windu telah melaksanakan *Good Corporate Governance self assesment* yang komprehensif, meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian dengan hasil sebagai berikut:

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot (A)	Peringkat (B)	Nilai (A) X (B)	Catatan
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00%	3,31	0,33	<p>Fungsi pengawasan Dewan Komisaris sudah berjalan dengan cukup efektif. Komposisi jumlah Dewan Komisaris sampai dengan akhir Tahun 2011 terdiri dari 3(tiga) orang; 1(satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Bank Windu telah berupaya untuk memenuhi ketentuan dengan mengajukan calon Komisaris Independen dan calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, meskipun pada akhirnya belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Namun demikian, Bank telah mengajukan kembali kandidat untuk mengisi posisi tersebut ke Bank Indonesia. Dalam hal mengambil keputusan penting para anggota Dewan Komisaris cukup dapat bertindak secara independen, setiap pengambilan keputusan tersebut terlebih dahulu dilakukan pertemuan untuk dilakukan pembahasan yang kemudian dituangkan secara tertulis kemudian didokumentasikan untuk kemudian direkomendasikan kepada Direksi.</p> <p>Dewan Komisaris cukup efektif dan sudah berupaya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).</p> <p>Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sudah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dan rapat tersebut telah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, sehingga telah memenuhi ketentuan BI yaitu minimal 4 (empat) kali dalam setahun.</p> <p>Aspek transparansi dinilai cukup baik dan Komisaris tidak pernah melanggar larangan-larangan yang diterapkan dalam ketentuan.</p> <p>Dalam proses penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>Dewan Komisaris senantiasa berusaha untuk melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut temuan Audit Intern, Audit Eksternal dan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia.</p> <p>Komposisi kepengurusan Dewan Komisaris pada semester II Tahun 2011, harus mengajukan 1 (satu) orang calon Komisaris Independen dengan memenuhi kualifikasi selain kompetensi yang cukup dan integritas yang baik, juga mengutamakan independensinya, sesuai dengan PBI No.8/4/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan PBI No.8/4/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.</p>

Tata Kelola Perusahaan

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot (A)	Peringkat (B)	Nilai (A) X (B)	Catatan
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20,00%	2,81	0,56	<p>Bank Windu telah menunjuk salah satu anggota Direksi untuk menggantikan posisi Direktur yang membahwasakan fungsi kepatuhan, namun pada akhirnya belum mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, sehingga terjadi kekosongan pada posisi Direktur yang membahwasakan fungsi kepatuhan, sehingga guna memenuhi permasalahan tersebut Bank Windu telah mengajukan kembali kandidat untuk mengisi posisi Direktur yang membahwasakan fungsi kepatuhan ke Bank Indonesia.</p> <p>Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.</p> <p>Secara umum pelaksanaan tugas Direksi telah memenuhi prinsip GCG, dan akan terus menerus disempurnakan serta akan melengkapi kekosongan posisi Direktur yang membahwasakan fungsi kepatuhan.</p> <p>Hasil rapat Direksi telah didokumentasikan dan dituangkan dalam risalah rapat serta didistribusikan kepada Direksi dan peserta rapat. Setiap keputusan rapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 19 (Sembilan belas) kali serta telah dilakukan rapat ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali.</p> <p>Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan /perundangan yang berlaku.</p> <p>Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan telah diupayakan lebih optimal sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>Direksi terus berupaya menindaklanjuti hasil temuan Divisi Audit Intern, Audit Eksternal dan Hasil Pemeriksaan BI serta melakukan pemantauan atas pelaksanaannya.</p>
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10,00%	3,10	0,31	<p>Secara Komposisi maupun kompetensi Komite-komite di Bank Windu sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank Windu, namun pada semester II tahun 2011 terdapat perubahan untuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, sehubungan dengan adanya pergantian Komisaris Independen hasil RUPS tanggal 28 Juni 2011, yang kemudian diangkat sebagai Ketua komite tersebut, namun tidak mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, sehingga anggota komite tersebut perlu ditinjau kembali, seperti :</p> <p>Keanggotaan Komite Audit melalui SK No.023/BW/SKEP-DIR/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011, sudah dilakukan pergantian Ketua Audit.</p> <p>Keanggotaan Komite Pemantau Risiko melalui SK No.024/BW/SKEP-DIR/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011, sudah dilakukan pergantian Ketua Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi melalui SK Direksi No.053/BW/SKEP-DIR/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010, sepanjang tahun 2011 tidak terdapat pergantian terhadap seluruh keanggotaannya</p>

Tata Kelola Perusahaan

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot (A)	Peringkat (B)	Nilai (A) X (B)	Catatan
					Dalam pelaksanaan tugas Komite-komite tersebut perlu lebih di intensifkan lagi, disamping pemenuhan anggota komite serta rutinitas pertemuannya guna membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	2,33	0,23	<p>Bank Windu sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait dengan benturan kepentingan sebagaimana telah tercantum dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance).</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.</p> <p>Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Bank Windu berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi atau menghindari adanya benturan kepentingan dalam menjalankan operasional perbankan, namun terdapat beberapa indikasi yang mengandung benturan kepentingan sampai dengan periode 31 Desember 2011, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank Windu telah melakukan sewa ruang kantor Cabang Equity di Equity Tower dari PT Blue Cross Indonesia sebagai pemilik yang juga merupakan pemegang saham Bank Windu. 2) Bank Windu telah melakukan sewa ruang kantor cabang Slipi di Wisma Slipi dari PT Putra Kusuma Perkasa (pemilik Teddy Salim & Aylene Salim) yang mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu pemegang saham (Komisaris Utama) Bank Windu. 3) Bank Windu melakukan kerjasama pembiayaan kredit kendaraan bermotor (Joint Financing) dengan PT. Anugerah Utama Multifinance (Gratama), namun demikian mengenai kerjasama tersebut akan dilakukan pengakhiran kerjasama dan penatausahaan akan diambil alih oleh Gratama, hal tersebut karena <i>risk appetite</i> berbeda dengan Bank Windu. 4) Penjualan asset Bank Windu kepada pihak terkait antara lain; <ul style="list-style-type: none"> - Plaza ABDA Lt.6 Jl.Jend Sudirman Kav.59 Jakarta Selatan dengan luas 1.119m2 (full floor) - Plaza ABDA Lt.8 Jl.Jend Sudirman Kav.59 Jakarta Selatan dengan luas 311m2 5) Beberapa sewa kantor kepada pihak terkait, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Sewa lantai dasar Zona A gedung perkantoran Equity Tower - Sewa Lantai 17 Zona F Gedung Perkantoran Equity Tower

Tata Kelola Perusahaan

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot (A)	Peringkat (B)	Nilai (A) X (B)	Catatan
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00%	2,42	0,12	<p>Kepatuhan Bank Windu tergolong cukup baik, berusaha senantiasa untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang berlaku, namun demikian masih saja terdapat beberapa sanksi/denda dari otoritas Bank Indonesia, akibat kelalaian dari aturan sehingga Bank Windu harus menerima konsekwensinya, berikut rekapitulasi sanksi/ denda selama tahun 2011.</p> <p>Selama semester I Tahun 2011, pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan berjalan dengan baik, namun pada semester II Tahun 2011 sesuai hasil RUPS tanggal 28 Juni 2011 telah dilakukan peralihan jabatan dari Direktur Kepatuhan menjadi Komisaris Independen dan telah ditunjuk salah satu anggota Direksi untuk menggantikan posisi Direktur yang membahwahkan fungsi kepatuhan, namun pada akhirnya belum mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, guna memenuhi permasalahan tersebut Bank Windu telah mengajukan kembali kandidat untuk mengisi posisi Direktur yang membahwahkan fungsi kepatuhan ke Bank Indonesia.</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan telah independen terhadap Operasional Bank dan secara aktif telah membuat ringkasan terhadap aturan baru yang berlaku kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pihak terkait, sedangkan semua pihak harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kepatuhan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya, sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5,00%	2,23	0,11	<p>Pelaksanaan fungsi audit intern telah berjalan dengan independen dan obyektif. Divisi Audit Internal cukup optimal dalam melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kecukupan, efektifitas sistem pengendalian intern dan kualitas kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p>
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5,00%	2,34	0,12	<p>Pelaksanaan audit oleh KAP telah dilakukan secara independen dan dinilai cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang telah ditetapkan. Kualitas dan cakupan hasil audit dinilai cukup baik. Penunjukan KAP telah direkomendasikan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris, persetujuannya akan ditetapkan melalui RUPS.</p>
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7,50%	2,89	0,22	<p>Manajemen cukup efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko Bank. Dalam pelaksanaannya selalu mengacu pada prosedur dan kebijakan pengendalian risiko. Setiap satuan kerja operasional telah secara proaktif melaporkan exposure risiko kepada Divisi Manajemen Risiko melalui <i>Key Risk Indicator (KRI)</i> dan <i>Risk Control Self Assessment (RCSA)</i> serta Form Kejadian Operasional (FKRO).</p>
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>)	7,50%	2,25	0,17	<p>Kebijakan bank dalam penyediaan dana kepada pihak terkait telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan terhadap BMPK.</p>

Tata Kelola Perusahaan

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot (A)	Peringkat (B)	Nilai (A) X (B)	Catatan
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Prinsip GCG dan Laporan Internal	15,00%	2,59	0,39	Bank telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik cukup transparan sedangkan untuk informasi melalui homepage cukup mudah untuk dilakukan akses, namun demikian homepage tersebut kedepannya perlu dikelola dengan baik serta lebih disempurnakan sesuai dengan perkembangan Bank Windu.
11	Rencana Strategis Bank	5,00%	2,92	0,15	Rencana Bisnis Bank cukup sesuai dengan visi dan misi Bank, Realisasi Rencana Bisnis dipantau secara triwulanan dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
Nilai Komposit		100,00%		2,71	Cukup Baik

Kesimpulan Umum Pelaksanaan Good Corporate Governance

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan *Good Corporate Governance* Bank Umum, pada tahun 2011, Bank Windu telah melakukan *self assessment* berdasarkan kinerja penerapan GCG dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

Sepanjang tahun 2011 Bank Windu terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan dengan pembentukan perangkat tata kelola yang baik dan proses pengelolaan yang sehat. Berdasarkan hasil revisi *self assessment* pelaksanaan GCG PT Bank Windu Kentjana International Tbk periode 31 Desember 2011, secara umum dapat disimpulkan bahwa bank telah berusaha menerapkan peraturan pelaksanaan GCG, dengan nilai komposit **2.71** dengan kategori predikat '**Cukup Baik**'.

Demikianlah kesimpulan umum atas hasil revisi *self assessment* pelaksanaan GCG PT Bank Windu Kentjana International Tbk untuk tahun 2011. Kami akan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam upaya pelaksanaan GCG.

Laporan Komite-Komite

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengawasan terhadap jalannya Bank Windu dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Pembentukan komite yang dibawah Dewan Komisaris didasarkan pada PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum (PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 serta perubahannya sesuai PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007), Peraturan Bursa Efek Jakarta No. 1-A/Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam LK) No.IX.1.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004.

Komposisi anggota Komite-komite sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank Windu, namun pemenuhan keanggotaan komite tersebut perlu di sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan tugas komite-komite yang membantu Dewan Komisaris telah berjalan cukup efektif pada semester I tahun 2011 karena pemenuhan komposisi Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris yang merupakan ketua komite tersebut terlaksana, namun pada semester II tahun 2011 kurang berjalan dengan sebagaimana mestinya karena belum terpenuhinya komposisi Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi tetap dijalankan sebagaimana mestinya, baik secara langsung maupun melalui komite-komite yang telah dibentuk.

Struktur komite pada semester II tahun 2011 perlu adanya pemenuhan kelengkapan komposisi ketua komite yang berasal dari Komisaris Independen dalam mendukung fungsi komite sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tampak dari komposisi anggota Komite Audit merangkap anggota Komite Pemantau Risiko yang awalnya merupakan calon Komisaris Independen hasil RUPS, namun tidak mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sehingga jabatan sebagai Ketua Komite tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu "Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi Anggota Komite Audit atau Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite Audit atau jumlah anggota Komite Pemantau Risiko."

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan hasil pemeriksaan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS serta kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- c. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- d. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- e. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Didasarkan pada fungsi komite, maka output komite pada dasarnya adalah pendapat profesional dan independen untuk disampaikan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris ataupun sebagai bahan masukan bagi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Laporan Komite-Komite

Pelaksanaan tugas komite tahun 2011 tampak dari adanya risalah rapat komite, catatan-catatan yang berisi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, catatan-catatan dan/atau kertas kerja pemantauan dan evaluasi sesuai fungsi masing-masing komite sebagai berikut:

1. Aktivitas Komite Audit

- Melakukan pembahasan terhadap hasil temuan pemantauan pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern tahun 2011.
- Melakukan pembahasan realisasi rencana kerja Komite Audit tahun 2010 serta melakukan pembahasan terhadap rencana kerja Komite Audit tahun 2011.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja penerapan Audit semester I tahun 2011.
- Melakukan Pembahasan terhadap pelaksanaan rencana audit tahun 2011 serta membahas temuan yang perlu mendapat perhatian dan temuan-temuan yang lainnya yang belum ditindak lanjut.

Selama tahun 2011 Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, di samping itu juga telah memberikan arahan kepada Dewan Komisaris.

2. Aktivitas Komite Pemantau Risiko

- Membahas realisasi rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2010 dan melakukan pembahasan terhadap rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2011 serta melakukan pembahasan hasil temuan pantauan pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.
- Melakukan pembahsan hasil temuan pantauan kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan pembahasan berbagai informasi beberapa permasalahan satuan kerja yang perlu mendapat perhatian dan atau tidak oleh masing-masing Komite.
- Melakukan pembahasan terhadap laporan Profil Risiko semester I tahun 2011 dan melakukan persiapan terhadap penerapan tingkat kesehatan berdasarkan risiko atau *Risk Based Bank Rating (RBBR)*.

Selama tahun 2011 penyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 4 (empat) kali, di samping itu juga telah memberikan arahan kepada Dewan Komisaris.

3. Aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi

- Melakukan pembahasan terhadap penyesuaian dan pemberian bonus terhadap Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan.
- Melakukan pembahasan kepegawaian terkait sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan pegawai serta melakukan evaluasi kebijakan remunerasi.
- Melakukan pembahasan terkait kepegawaian serta tentang rekrutmen, serta melakukan pembahasan anggaran pengembangan SDM dan penerapan system grading.
- Melakukan pembahasan terhadap pengajuan calon Komisaris Independen.
- Melakukan pembahasan terkait pengajuan calon Direktur Kepatuhan.
- Melakukan pembahasan terkait pengadministrasian personalia dan payroll, kebijakan pinjaman karyawan dan sidur pinjaman, kebijakan rekrutment dan beban tenaga kerja, sidur pinjaman anggota Direksi, dan lain-lain.

Selama tahun 2011 penyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 6 (enam) kali, disamping itu juga telah memberikan rekomendasi.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dinilai baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang ditetapkan oleh Bank Windu dikaitkan dengan pelaksanaannya; melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan (realisasi) pembayaran remunerasi; memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi (untuk disampaikan kepada RUPS) dan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan (untuk disampaikan kepada Direksi dan RUPS); memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan/atau calon Pihak Independen Anggota Komite kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Di waktu mendatang Komite Remunerasi dan Nominasi berupaya lebih optimal dalam melakukan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi serta memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS dan memberikan rekomendasi calon Pihak Independen untuk anggota komite.

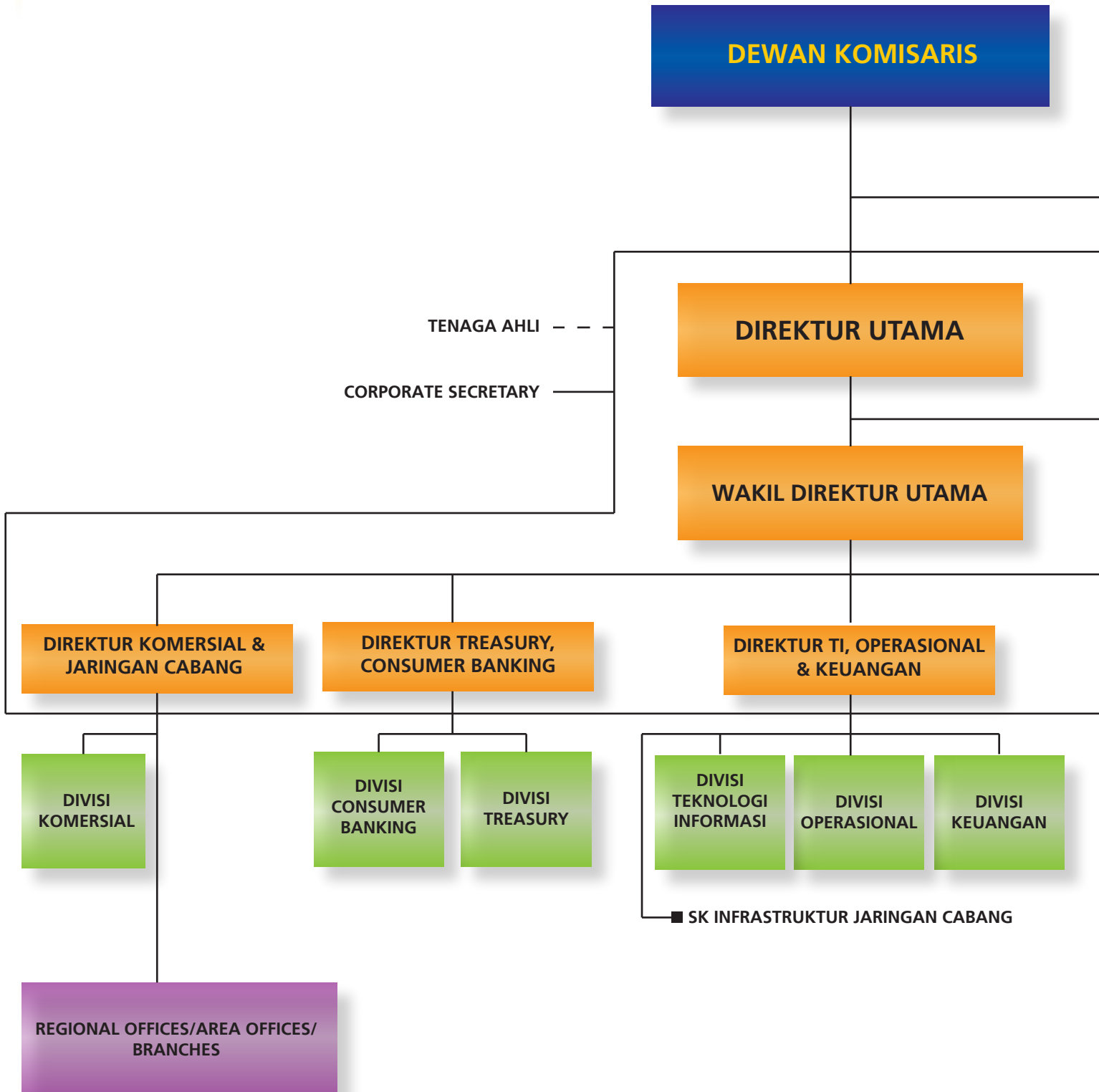
Laporan Komite-Komite

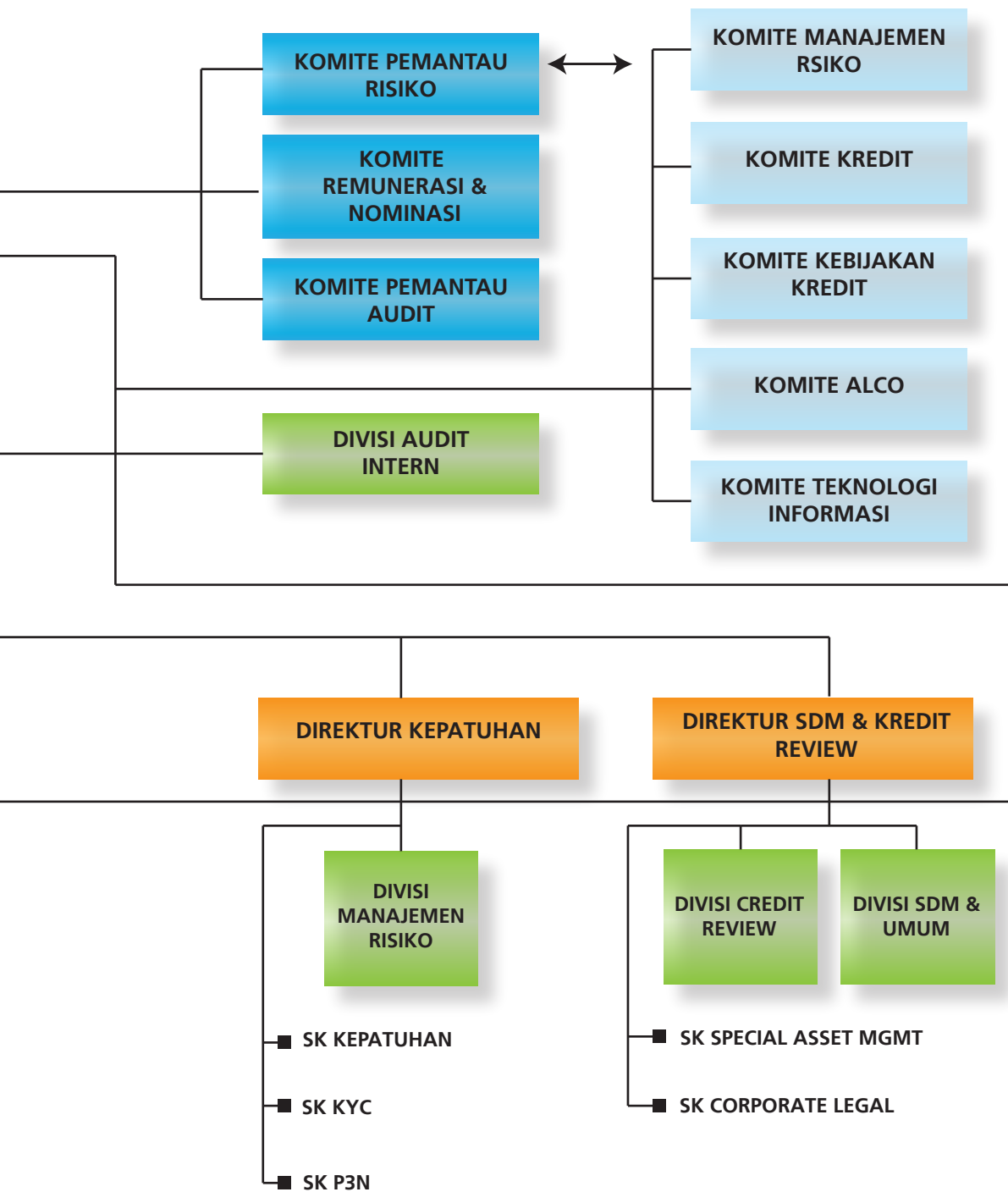
Pelaksanaan tugas komite-komite yang membantu Dewan Komisaris berjalan cukup efektif, pada semester II terjadi perubahan keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, karena pengunduran diri salah satu Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2011. Sementara itu posisi ketua komite yang dijabat oleh Komisaris Independen sesuai hasil RUPS Tahunan, yang pada akhirnya belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Guna pemenuhan komposisi Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris yang sekaligus merangkap sebagai ketua dalam Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, Bank telah mengajukan kembali kandidat ke Bank Indonesia untuk mengisi kekosongan tersebut.

Pelaksanaan tugas komite-komite yang membantu Dewan Komisaris berjalan cukup efektif, pada semester II terjadi perubahan keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, karena pengunduran diri salah satu Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2011. Sementara itu posisi ketua komite yang dijabat oleh Komisaris Independen sesuai hasil RUPS Tahunan, yang pada akhirnya belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Guna pemenuhan komposisi Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris yang sekaligus merangkap sebagai ketua dalam Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, Bank telah mengajukan kembali kandidat ke Bank Indonesia untuk mengisi kekosongan tersebut.



Struktur Organisasi





Profil Dewan Komisaris



Sjerra Salim
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 1953. Diangkat sebagai Komisaris Utama pada tahun 2007. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT. Bank Windu Kentjana dari tahun 1997 sampai dengan 2007. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari West London College pada tahun 1975.



Syamsuar Halim
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1960. Diangkat sebagai Komisaris pada tahun 2003. Sebelumnya pernah menjabat sebagai vice president operation division PT Bank Panin Tbk sampai tahun 2000 dan kemudian sebagai komisaris PT Bank Danpac Tbk sampai tahun 2001. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dan Perencanaan dari Universitas Trisaksi pada tahun 1986.



Mohamad Hasan
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang pada tahun 1944. Meraih gelar Sarjana Hukum tahun 1972 dari Universitas Sriwijaya, Palembang. Bergabung dengan Bank Windu sesuai dengan hasil RUPS Tahunan pada tanggal 24 Juni 2010 Komisaris Independen. Pengalaman kerja di luar Bank Windu, tahun 1974-1977 dengan memulai karirnya dalam bidang perbankan sebagai Credit Analyst di Citibank N.A. Jakarta, tahun 1977-2003 sebagai Presiden Direktur pada Bank Multicor, tahun 2003-2008 pada Bank Multicor sebagai Komisaris Independen, tahun 2007-2008 sebagai Komisaris pada PT.Royal Oak Development Asia Tbk, tahun 2008 sebagai Komisaris Utama (Independen) pada PT Citra Kebun Raya Agri Tbk dan pada PT Transpacific General Insurance sebagai Komisaris (Independen).

Profil Direksi



Herman Sujono
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1964. Ditunjuk sebagai Direktur Utama pada tahun 2009. Memulai karirnya di bidang Perbankan sebagai Product Development di PT. Bank Windu Kentjana pada tahun 1989, kemudian diangkat sebagai General Manager PT. Bank Windu Kentjana (1993-2007) dan Direktur PT Bank Windu Kentjana International Tbk (2007-2009). Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Satya Wacana, Salatiga pada tahun 1987 dan Master of Business Administration dari Institut Pendidikan Prasetya Mulya, Jakarta pada tahun 1989 dan berbagai pendidikan kedinasan.



Hendri Kurniawan
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Pontianak pada tahun 1958. Ditunjuk sebagai Direktur pada tahun 2009. Memulai karir di bidang Akuntansi di Astra Group pada tahun 1982-1986 dan mengawali karir perbankan di Bank Bali pada tahun 1986 sebagai Planning Officer, kemudian menempati berbagai jabatan sebagai Financial Controller, Individual Banking Director, Commercial Banking Director, dan terakhir sebagai Deputy President Director PT Bank Permata (d/h Bank Bali). Selanjutnya sebagai Komisaris PT Sarijaya Insurance (2001-2007) dan Direktur Hana Bank (2008-2009). Memperoleh gelar Sarjana Muda Akuntansi dari AA YKPN Yogyakarta, Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan Magister Manajemen dari Universitas Atmajaya serta berbagai pendidikan kedinasan.

Warga Negara Indonesia, lahir di Kediri pada tahun 1963. Ditunjuk sebagai Direktur pada tahun 2003. Memulai karirnya di PT. Bank Panin Tbk (1987-1997), di PT Bank International Indonesia Tbk (1997-1999), menjabat sebagai Direktur Operasi PT Bank Danpac Tbk (1999-2001), sebagai Direktur Utama PT Danpac Investama (2002-2003), dan sebagai Direktur keuangan PT Millenium Pharmacon International Tbk (2002-2003).



Tohir Sutanto
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Rumbai pada tahun 1961. mengawali karir perbankan di Bank Bali pada tahun 1990 sebagai Officer Development Program, kemudian menempati berbagai jabatan sebagai Account Officer, Team Leader Commercial Loan, General Manager, Chief General Manager, General Manager Forex Trading Business PTBank Bali. Selanjutnya sebagai Deputy Regional Head PTBank Lippo (2000-2001), PTBank OCBC NISP (2001-2009) sebagai Pimpinan Cabang, Branch Dept Head Reg. 2, Region Head Reg. 5 dan terakhir sebagai Senior Corporate Executive merangkap Region Head Sumatra. Memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1984 dan gelar Magister Management dari PPM School of Management, Jakarta pada tahun 2007.



Setiawati Samahita
Direktur

Profile Komite-Komite

Mohamad Hasan

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

67 tahun, menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 22 Oktober 2010. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sriwijaya, Palembang pada tahun 1972. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Windu.

Donny Pradono Suleiman *)

Ketua Komite Audit merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko

55 tahun, Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko. Meraih Sarjana Manajemen Konstruksi dari Polytechnic University of the Philippines pada tahun 1984. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Kepatuhan di Bank Windu sejak tahun 2000 sampai dengan 28 Juni 2011.

*) Berdasarkan surat Surat BI No. 13/126/DPB2/TPB 2-7 tanggal 8 Desember 2011, pengajuan Calon Komisaris Independen belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Syamsuar Halim

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

52 tahun, Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak Desember 2009. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dan Perencanaan dari Universitas Trisakti pada tahun 1986. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Bank Windu sejak tahun 2003.

Muhammad Rusjdi

Anggota Komite Audit merangkap Anggota Pemantau Risiko (Independen)

58 tahun, Anggota Komite Audit sejak Juni 2007. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan, Kepala Bidang dan Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia (1981-2007). Memperoleh gelar Master of Business dari Monash University, Australia tahun 1993, gelar Master of Science dari Saitama University, Japan tahun 1987 dan gelar Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1980.

Rusmin

Anggota Komite Audit merangkap Anggota Pemantau Risiko (Independen)

53 tahun, Anggota Komite Audit sejak Januari 2009. Saat ini beliau juga berprofesi sebagai Dosen Master of Management Yogyakarta Technology University, Indonesia sejak Juni 2008. Memperoleh gelar PhD dari Curtin University of Technology, Perth, Australia tahun 2007, gelar Master of Business Administration dari Murray State University, Kentucky, USA tahun 1994, gelar Sarjana Ekonomi dari YKPN School of Business, Yogyakarta Indonesia tahun 1985 dan gelar Bachelor's YKPN Accounting College, Yogyakarta Indonesia pada tahun 1982.

Andreas Herman Basuki

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

48 tahun, Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak Desember 2007. Saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Bank Windu sejak Februari 2008. Memulai karirnya di bidang Perbankan sejak tahun 1990 dengan posisi terakhir sebagai Kepala Divisi SDM dan Umum. Meraih gelar Sarjana Muda Manajemen Informatika dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 1988 dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1990.

Pejabat Eksekutif

Dominador M. De Jesus, Jr

Konsultan Bidang TI dan Operasional
(s/d 30 September 2011)

Andreas Herman Basuki

Corporate Secretary , Kepala Divisi SDM

Yohanes

Kepala Divisi Operasi

Maurus Damian

Kepala Divisi Teknologi Informasi

Andry Setiono Lauw

Kepala Divisi Treasury

Phiny

Kepala Divisi Keuangan

Chandra Bactiar

Kepala Divisi Consumer Banking

Djunaedi Hidajat

Kepala Divisi Commercial

Duisa Labora Panggabean

Kepala Divisi Credit Review

Tony Tanusaputra

Kepala Divisi Audit Internal

Rahmat Prayoga

Kepala Divisi Manajemen Risiko

Dewi Indira Sari

Kepala Satuan Kerja Corporate Legal

Wahyu Widayati

Kepala Satuan Kerja KYC (Know Your Customer) & P3N
(Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah)

Priyo Uji Siswanto

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Junianto

Regional Head Sumatera, Bali, Pontianak dan Jatabek

Thomas Widiyanto

Regional Head Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur

Hasan Ichsan

Regional Head Jawa Barat

Lilis Tanuwijaya

Area Manager – Area I dan
Pemimpin Cabang Tanah Abang, Jakarta

Hastro Wijaya

Pemimpin Cabang Kelapa Gading, Jakarta

Magdalena Ka Tjing

Area Manager – Area III dan
Pemimpin Cabang Asemka, Jakarta

David Fisher Kusnadi

Area Manager – Area IV dan
Pemimpin Cabang S. Parman, Jakarta

Agus Setiawan

Area Manager– Area V

Guntur Hilmansyah

Pemimpin Cabang Kebayoran Lama, Jakarta

Witono Gunawan

Pemimpin Cabang Kebayoran Baru, Jakarta

Albert Tirtawijaya

Pemimpin Cabang Jatinegara, Jakarta

Irene Sukmadjaya

Pemimpin Cabang Bogor

Intisariningsih Sastro Andoko

Pemimpin Cabang Semarang

Inawati Prabowo

Pemimpin Cabang Solo

Novry Johnly Waleleng

Pemimpin Cabang Surabaya

Djiok Sai

Pemimpin Cabang Tanjung Pinang

Sui Seng

Pemimpin Cabang Batam

Pieter Gunawan

Pemimpin Cabang Pontianak

Sutarjo

Pemimpin Cabang Palembang

Susilo Jaya Putra

Pemimpin Cabang Denpasar

Loreta Kowara

Pemimpin Cabang Equity Tower, Jakarta

Dewi Kartini Adikusuma

Pemimpin Cabang Sukabumi

Henrij

Pemimpin Cabang Lampung

Andry Asali

Pemimpin Cabang Pekanbaru

Budi Hermawan

Pemimpin Cabang Yogyakarta

Produk, Layanan dan Tingkat Suku Bunga

Produk Simpanan

- ◆ Tabungan Windu
- ◆ Tabungan Tahapan
- ◆ Tabungan Kentjana
- ◆ Tabungan Kentjana Program WinEdu
- ◆ Tabungan Kentjana Program WinPlan
- ◆ Deposito Berjangka (Rupiah, Dollar Amerika, Dollar Singapore dan Euro)
- ◆ Giro (Rupiah, Dollar Amerika, Dollar Singapore dan Yen)
- ◆ Sertifikat Deposito

Produk Pinjaman

- ◆ Pinjaman Rekening Koran
- ◆ Pinjaman Demand Loan
- ◆ Pinjaman Fixed Loan
- ◆ Pinjaman Fixed Loan Insidental
- ◆ Pinjaman Installment Loan
- ◆ Pembiayaan Channeling
- ◆ Pinjaman Sindikasi
- ◆ Bank Garansi
- ◆ Standby Letter of Credit (SBLC)
- ◆ Letter of Credit (L/C)
- ◆ Pinjaman Tust Receipt (TR)
- ◆ Fasilitas Negosiasi / Diskonto Wesel Ekspor
- ◆ Mortgage Loan (Kredit Pemilikan Rumah / Ruko / Apartemen/ Tanah / Renovasi / Konstruksi / Multi Guna.
- ◆ Kredit Kendaraan Bermotor
- ◆ Kredit Tanpa Agunan

Layanan

- ◆ ATM (Seluruh ATM BCA Jaringan Prima)
- ◆ Kiriman Uang Domestik
- ◆ Kiriman Uang Internasional
- ◆ Kliring
- ◆ Inkaso
- ◆ Inkaso Internasional
- ◆ Transaksi Jual Beli Valuta Asing
- ◆ Ekspor dan Impor (Trade Finance)
- ◆ Settlement Bank
- ◆ Safe Deposit Box (SDB)
- ◆ Pembayaran Gaji

Treasury

- ◆ FX Today, Tommorrow dan Spot
- ◆ FX Forward
- ◆ Bank Notes
- ◆ Deposit on Call



Tingkat Suku Bunga Rata-rata Dana Pihak Ketiga :

Dana Pihak Ketiga	2011	2010
1. Giro	2.15%	2.40%
- Rupiah	0.13%	0.13%
- Mata Uang Asing		
2. Tabungan	1.74%	6.00%
3. Deposito Berjangka		
- Rupiah	7.50%	7.58%
- Mata Uang Asing	1.67%	1.30%

Tingkat Suku Bunga Rata-rata Kredit yang diberikan :

Kredit yang Diberikan	2011	2010
1. Kredit		
- Rupiah	14%	13%
- Mata Uang Asing	6%	6%
2. Kredit Karyawan	6% - 10%	6% - 10%



Produk, Layanan dan Tingkat Suku Bunga

TAHAPAN



Fleksibel Dalam Bertransaksi

BankWindu

KREDIT KOMERSIAL



Mitra Anda Menuju Sukses

BankWindu

TABUNGAN WINDU



Aman dan Makin Untung

BankWindu

KPR WINDU



Kami Wujudkan Rumah Impian Anda

BankWindu

TABUNGAN KENTJANA



Kemudahan Bertransaksi

BankWindu

KKB WINDU



Cepat dan Mudah Memiliki Kendaraan

BankWindu

GIRO



Membantu Transaksi Anda

BankWindu

KTA WINDU



Segalanya Menjadi Lebih Mudah

BankWindu

DEPOSITO RUPIAH



Investasi Anda Aman & Menguntungkan

BankWindu

TRADE FINANCE



We Support You

BankWindu

DEPOSITO VALAS



Solusi Berinvestasi

BankWindu

JUAL-BELI BANK NOTES



Aman, Mudah dan Cepat

BankWindu

GIRO DOLLAR



Memenuhi Kebutuhan Multi Currency Anda

BankWindu

WINDU DOLLAR



Investasi Yang Tepat

BankWindu

Produk, Layanan dan Tingkat Suku Bunga



Jaringan Kantor

Kantor Pusat Bank Windu

Gedung Perkantoran Equity Tower
Komplek SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan - Indonesia
Telp : 021-51401707
Fax : 021-51401708-09
Website : www.bankwindu.com

JARINGAN KANTOR	Nomor Telepon	Nomor Fax
JAKARTA SELATAN		
Bank Windu KC. Equity	021-51401818	021-51401919
Gedung Perkantoran Equity Tower Lt. Dasar, SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot. 9 Jakarta Selatan		
Bank Windu KC. Kebayoran Lama	021-2701104	021-7268763
Jl. Raya Kebayoran Lama Blok A No. 3-4 Komplek Pemata Kebayoran Plaza, Jakarta Selatan		
Bank Windu KC. Kebayoran Baru	021-7211135	021-2701045
Jl. RS Fatmawati No. 4 D, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan		
Bank Windu KCP. Melawai	021-7229355	021-7255001
Jl. Melawai Raya No. 19 E, Jakarta Selatan		
Bank Windu KK. Plaza ABDA	021-51401255	021-51400813
Plaza ABDA Lt. Dasar Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan		
Bank Windu KK. Wisma Indosemen	021-5705920	021-5705853
Wisma Indosemen Lt. Dasar Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan		
Bank Windu KK. Wisma Indomobil	021-8583179	021-8583181
Wisma Indomobil Lt. Basement Jl. MT. Haryono Kav.8, Jakarta Selatan		
Bank Windu KK. Permata Kuningan	021-83780745	021-83780633
Gedung Permata Kuningan Lt. Dasar Jl. Kuningan Mulia kav. 9C, Jakarta Selatan		
JAKARTA BARAT		
Bank Windu KC. Slipi	021-5668292	021-5666185
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 92, Jakarta Barat		
Bank Windu KC. Asemka	021-6901818	021-6906040
Jl. Asemka No. 24-26, Jakarta Barat		

Jaringan Kantor

JARINGAN KANTOR	Nomor Telepon	Nomor Fax
Bank Windu KCP. Roxy	021-6323027	021-63857350
Jl. KH. Hasyim Ashari No. 40, Jakarta Barat		
Bank Windu KCP. Pesanggrahan	021-58902433	021-5862906
Jl. Pesanggrahan Raya 3 C, Meruya, Kembangan-Jakarta Barat		
Bank Windu KK. Green Ville	021-5609022	021-5602210
Kompl. Green Ville Blok AS No. 40 A, Jakarta Barat		
Bank Windu KCP. Glodok	021-62200264	021-6245671
Jl. Pinangsia (Glodok Plaza) H.40, Jakarta Barat		
Bank Windu KK. Mangga Besar	021-6497053	021-6496850
Jl. Mangga Besar Raya No. 10 A, Jakarta Barat		
Bank Windu KK. Taman Palem	021-55963423-24	021-55963460
Ruko Taman Palem Lestari, Palm Square Blok G2 No. 8, Jakarta Barat		
JAKARTA TIMUR		
Bank Windu KC. Jatinegara	021-2800082	021-8501833
Bukit Duri Plaza Jl. Jatinegara Barat No. 54 E, Jakarta Timur		
Bank Windu KCP. Pondok Bambu	021-86112693	021-8612692
Jl. Pahlawan Revolusi No. 3, Jakarta Timur		
Bank Windu KK. Kramat Jati	021-87788348-49	021-87788352
Ruko Pasar Induk Kramat Jati , Blok D2 No. 16 Jl. Raya Bogor Km. 17, Jakarta Timur		
Bank Windu KK. Rawamangun	021-47884980	021-47884981
Jl. Pemuda No. 33 A, Rawamangun, Jakarta Timur		
JAKARTA PUSAT		
Bank Windu KC. Tanah Abang	021-3456412	021-3909693
Jl. H. Fachrudin Blok C/47-48 Tanah Abang Bukit (AURI), Jakarta Pusat		
Bank Windu KK. Tanah Abang	021-23571582	021-23571581
Pusat Grosir Tanah Abang Blok A Lt. B1 F.86, Jakarta Pusat		
Bank Windu KCP. Benhil	021-5711993	021-5705048
Proyek Perkantoran Bendungan Hilir Jl. Bendungan Hilir Kav. 36 A No. 3, Jakarta Pusat		
Bank Windu KCP. Cempaka Mas	021-4202367	021-4213975
Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Jl. Let. Jend. Suprpto Blok G No. 6, Jakarta Pusat		

Jaringan Kantor

JARINGAN KANTOR	Nomor Telepon	Nomor Fax
Bank Windu KCP. Pecenongan	021-3863328	021-3868504
Jl. Pecenongan No. 88, Jakarta Pusat		
Bank Windu KK. Panin	021-5749155	021-5749156
Gedung PANIN Center		
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat		
Bank Windu KK. Plaza BII Intiland	021-57953078-80	021-57950213
Intiland Tower Main Lower Ground		
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Jakarta Pusat		
Bank Windu KK. Menara Batavia	021-57930045	021-57930046
Menara Batavia Lt. 2		
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat		
Bank Windu KK. Cideng / Ketapang	021-63866239	021-63866243
Ruko Ketapang Business Centre Blok A-9		
Jl. KH. Zainul Arifin No. 20, Krukut, Tamansari, Jakarta Pusat		
Bank Windu KK. Jembatan Lima	021-63851209	021-6249340
Jl, KH. Moch Mansyur No. 165 AA		
Tambora, Duri Utara, Jakarta Pusat		
JAKARTA UTARA		
Bank Windu KC. Kelapa Gading	021 - 45851477	021- 45851543
Ruko Kantor (Kokan) Plaza Kelapa Gading Blok C No. 5		
Jl. Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara		
Bank Windu KK. Kelapa Gading Hybrida	021-45858510	021-45858515
Jl. Raya Kelapa Hybrida RB 01/23		
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara		
Bank Windu KCP. Mangga Dua	021-6013630	021-6491466
Pusat Grosir Pasar Pagi Lt. 3 BlokD No. 8		
Jl. Arteri Mangga Dua Raya, Jakarta Utara		
Bank Windu KCP. Pluit	021-6601236	021-5705048
Jl. Pluit Sakti Raya 28 / A-5, Jakarta Utara		
Bank Windu KK. Laguna Pluit	021-30031389	021-30031399
Apartemen Laguna Pluit Lt. Dasar No. 23		
Jl. Pluit Timur Blok MM, Jakarta Utara		
Bank Windu KK. Sunter	021-6521295-96	021-6521320
Ruko Puri Mutiara Sunter		
Jl. Griya Utama Blok D No. 7, Jakarta Utara		

Jaringan Kantor

JARINGAN KANTOR	Nomor Telepon	Nomor Fax
DEPOK - TANGERANG - BEKASI		
Bank Windu KCP. Tangerang Merdeka	021-55791905	021-55791906
Jl. Merdeka No. 207 D, Tangerang		
Bank Windu KCP. Kalimalang	021-8843510	021-8843126
Komplek Duta Plaza Blok B II No. 3-4		
Jl. KH. Noor Ali, Kalimalang, Bekasi		
Bank Windu KK. Depok	021-77206625-26	021-77206664
Jl. Margonda Raya No. 06652		
Kemiri Muka- Beji, Depok		
Bank Windu KK. Taman Harapan Indah	021-88387063-65	021-88387067
Ruko Boulevard Hijau Blok B 8 No. 52, Kota Harapan Indah		
Bekasi		
Bank Windu KK. Tangerang City	021-55781812-15	021-55781816
Ruko Business Park Tangerang City ,Blok E No. 28, Babakan		
Tangerang		
Bank Windu KK. Pasar Segar Bintaro	021-53140255	021-53140259
Komp. Ruko Pasar Segar Blok RA 1 No. 10, Bintaro		
Tangerang		
Bank Windu KK. ITC BSD	021-53154836-38	021-53154840
ITC BSD Blok R No. 39, BSD City, Serpong		
Tangerang		
JAWA BARAT		
Bank Windu KC. Bandung	022-4207336	022-4219387
Jl. Naripan No. 79-81, Bandung		
Bank Windu KCP. Bandung	022-4241306	022-4241332
Jl. Jend. Sudirman No. 91 A		
Ruko Sudirman Plaza, Bandung		
Bank Windu KK. Aquila	022-2060096	022-2060098
Hotel Grand Aquila Bandung Lt. Dasar		
Jl. Djundjuran No. 116, Bandung		
Bank Windu KK. Asia Afrika	022-84467947-48	022-84467948
Jl. Asia Afrika No. 182, Bandung		
Bank Windu KC. Sukabumi	0266-246000	0266-243000
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4		
Warudoyong, Nyomplong, Sukabumi		

Jaringan Kantor

JARINGAN KANTOR	Nomor Telepon	Nomor Fax
Bank Windu KC. Bogor	0251-8314963	0251-8315166
Jl. Pajajaran No. 70 E, Bogor		
Bank Windu KCP. Bogor	0251-8312744	0251-8314156
Jl. Dewi Sartika Ruko Central Blok C No. 1, Bogor		
Bank Windu KCP. Bogor	0251-8323443	0251-8312336
Jl. Surya Kencana No. 83, Bogor		
Bank Windu KCP. Cibinong	021-87913659	021-87913660
Ruko B, Jl. Raya Bogor KM 43, Cibinong		
JAWA TENGAH DAN YOGYAKARTA		
Bank Windu KC. Semarang	024-3547893	024-3553045
Komp Ruko Pemuda Mas Blok A no. 14 Jl Pemuda no. 150 Sekayu, Semarang		
Bank Windu KCP. Semarang	024-3513250	024-3549075
Jl. Beteng No. 67, Semarang		
Bank Windu KCP. Semarang	024-3581560	024-3581561
Jl. Gajah Mada No. 23, Semarang		
Bank Windu KC Solo	0271-644123	0271-666717
Jl. Veteran No. 68, Solo		
Bank Windu KCP. Solo	0271-643843	0271-644383
Pasar Klewer Blok EE No. 21-22 Jl. Dr. Rajiman, Solo		
Bank Windu KC. Yogyakarta	0274-555233	0274-548090
Jl. Pangeran Diponegoro No.11-13 , Jetis, Gowongan Yogyakarta		
JAWA TIMUR		
Bank Windu KC. Surabaya	031-5680623	031-5665604
Komplek Darmo Square Blok D-8 Jl. Raya Darmo No. 54-56, Surabaya		
Bank Windu KCP. Surabaya	031-7320915	031-7320916
Jl. Bukit Darmo Boulevard Kav. 15 No. 10A, Surabaya		
Bank Windu KK. Pasar Atum	031-3577903	031-3548235
Pasar Atum Mall, Lantai 4, Stand FD-16 Jl. Stasiun Kota No. 7 A, Pabeancantikan, Surabaya		

Jaringan Kantor

JARINGAN KANTOR	Nomor Telepon	Nomor Fax
BALI		
Bank Windu KC. Denpasar	0361-258013	0361-255192
Ruko Graha Mahkota Jl. Teuku Umar Blok A2, Denpasar		
KALIMANTAN		
Bank Windu KC. Pontianak	0561-744228	0561-744227
Jl. Ir H Juanda No. 67-68, Darat Sekip, Pontianak Barat Pontianak		
SUMATRA SELATAN		
Bank Windu KC. Palembang	0711-370980	0711-370983
Jl. Jend. Sudirman No. 1129, Palembang		
Bank Windu KK. Kebumen, Palembang	0711-355150	0711-351326
Jl. Kebumen Darat No. 912, Ilir Timur, Palembang		
RIAU		
Bank Windu KC. Pekanbaru	0761- 39877	0761- 39787
Jl. Ir. Jend. Ahmad Yani No. 2 J Senapelan, Padang Terubuk, Pekanbaru, Riau		
LAMPUNG		
Bank Windu KC. Bandar Lampung	0721-258989	0721-241260
Jl. Jend. Sudirman No. 60 B - 60 C Tanjung Karang Pusat, Enggal, Bandar Lampung - Lampung		
KEPULAUAN RIAU		
Bank Windu KC. Tanjung Pinang	0771-313999	0771-315918
Jl. Brigjen Katamso No. 88, Kemboja, Kepulauan Riau		
Bank Windu KC. Batam	0778-457255	0778-457770
Komplek Pasar Nagoya Lama Blok A Jl. Imam Bonjol Blok E No. 9-10, Batam - Kepulauan Riau		
Bank Windu KK. Kijang	0771-462899	0771-462930
Jl. Hang Jabat, Bintan Timur, Kijang - Bintan		
Bank Windu KK. Merdeka	0771-311110	0771-311099
Jl. Merdeka No. 100, Tanjung Pinang Kota, Kepulauan Riau		
Bank Windu KK. Natuna	0773- 31062	0773-31060
Jl. Jend. Sudirman, Ranai , Bunguran Timur, Natuna Kepulauan Riau		

Jaringan Kantor

Kantor yang akan segera dibuka:

- Kantor Cabang Pembantu Cikarang, Kawasan Jababeka, Bekasi
- Kantor Kas Cikarang, Lippo Cikarang, Bekasi

Kantor yang akan direlokasi:

- Kantor Cabang Pembantu Tangerang Merdeka
- Kantor Kas Bandung Grand Aquila

A photograph of a modern, multi-story office building with a glass facade. The building is reflected in the glass panels. In the foreground, a sign for Bank Windu is visible, featuring the bank's logo and name. A person is partially visible on the left side of the frame, and a car is parked in front of the building.

 **Bank Windu**

Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan

Laporan Tahunan ini berikut dengan Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik independen dan informasi lain yang terkait, telah ditelaah oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang membubuhkan tandatangannya di bawah ini, dengan derajat penelaahan dan tanggung jawab sesuai tanggal efektif pengangkatannya masing-masing dan dengan memperhatikan pula ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris,



Sjerra Salim
Komisaris Utama



Syamsuar Halim
Komisaris



Mohamad Hasan
Komisaris Independen

Direksi,



Herman Sujono
Direktur Utama



Hendri Kurniawan
Wakil Direktur Utama



Tohir Sutanto
Direktur



Setiawati Samahita
Direktur

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

PT Bank Windu Kentjana International Tbk

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010/
For the Years Ended December 31, 2011 and 2010

Dan Laporan Auditor Independen/
And Independent Auditors' Report

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ Page
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan PT Bank Windu Kentjana International Tbk untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010/ <i>Directors' Statement on the Responsibility for the Financial Statements of PT Bank Windu Kentjana International Tbk for the Years Ended December 31, 2011 and 2010</i>	
Laporan Auditor Independen/Independent Auditors' Report	1
LAPORAN KEUANGAN - Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/ FINANCIAL STATEMENTS – <i>As of December 31, 2011 and 2010 and for the Years then Ended</i>	
Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	3
Laporan Laba Rugi Komprehensif/ <i>Statements of Comprehensive Income</i>	4
Laporan Perubahan Ekuitas/ <i>Statements of Changes in Equity</i>	5
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	6
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	7

SURAT TERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011 DAN 2010

**PT BANK WINDU KENTJANA
INTERNATIONAL Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name
Alamat Kantor/Office address

Alamat Domisili/sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Residential
Address/in accordance with
Personal Identity Card
Nomor Telepon/Telephone number
Jabatan/Title

2. Nama/Name
Alamat Kantor/Office address

Alamat Domisili/sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Residential
Address/in accordance with
Personal Identity Card
Nomor Telepon/Telephone number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010.
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2011 AND 2010

**PT BANK WINDU KENTJANA
INTERNATIONAL Tbk**

We, the undersigned:

- : Herman Sujono
: Equity Tower Lt 9
: Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
: Jl.Jendral Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan
: Jl.Taman Aries B 17 / 28

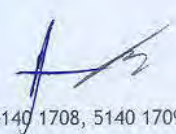
: 021-51401707
: Direktur Utama / President Director

- : Hendri Kurniawan
: Equity Tower Lt 9
: Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
: Jl.Jendral Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan
: Gading Grande Residence 7 AD
: Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara

: 021-51401707
: Wakil Direktur Utama / Deputy President Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements for the years ended December 31, 2011 and 2010.
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
- b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements, and
- b. The Company's financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. We are responsible for the Company's internal control system.

This statement has been made truthfully.

28 Maret 2012/March 28, 2012



METERAI
Bank Windu
C0E95ABE
ENAM RIBU RUPAH
6000
DJP

Herman Sujono
Direktur Utama/President Director

Hendri Kurniawan
Wakil Direktur Utama/Deputy President Director

Laporan Auditor Independen**No. 04080212SA****Pemegang Saham, Dewan Komisaris,
dan Direksi
PT Bank Windu Kentjana International Tbk**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Bank Windu Kentjana International Tbk (Perusahaan) tanggal 31 Desember 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan PT Bank Windu Kentjana International Tbk untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Mulyamin Sensi Suryanto, yang laporannya tanggal 15 Maret 2011, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan paragraf penjelasan mengenai dampak penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang disesuaikan pada saldo laba tanggal 1 Januari 2010.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang diterapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebutkan di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Windu Kentjana International Tbk tanggal 31 Desember 2011, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report**No. 04080212SA****The Stockholders, Board of Commissioners,
and Directors
PT Bank Windu Kentjana International Tbk**

We have audited the statement of financial position of PT Bank Windu Kentjana International Tbk (the Company) as of December 31, 2011, and the related statements comprehensive of income, changes in equity, and cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. The financial statements of PT Bank Windu Kentjana International Tbk for the year ended December 31, 2010 were audited by Mulyamin Sensi Suryanto whose report dated March 15, 2011, expressed an unqualified opinion on those statements included an explanatory paragraph on impact of the adoption of PSAK No. 50 (Revised 2006), Financial Instruments: Presentation and Disclosures, and PSAK No. 55 (Revised 2006), Financial Instruments: Recognition and Measurement, which was adjusted to the opening balance of retained earnings as at January 1, 2010.

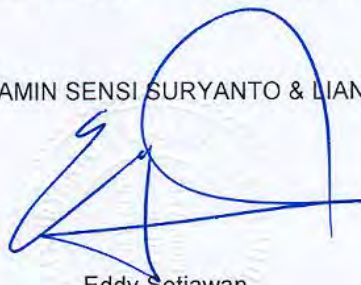
We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Windu Kentjana International Tbk as of December 31, 2011, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Seperti yang diungkapkan pada Catatan 2b atas laporan keuangan, Perusahaan telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif.

As disclosed in Note 2b to the financial statements, the Company adopted certain revised Statements of Financial Accounting Standards ("PSAKs") effective January 1, 2011, which were applied on prospective or retrospective basis.

MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY



Eddy Setiawan

No. Izin Akuntan Publik/Certified Public Accountant License No. AP.0506
28 Maret 2012/March 28, 2012

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position and the results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

	2011 Rp '000.000	Catatan/ Notes	2010 Rp '000.000	
ASET				ASSETS
Kas	108.067	2c,2f,29,30,34	68.077	Cash
Giro pada Bank Indonesia	410.733	2c,2f,2g,4,29,30,34	292.227	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - pihak ketiga	60.096	2c,2f,5,29,30,34	161.835	Demand deposits with other banks - third parties
Penempatan pada bank lain - pihak ketiga	-	2f,2h,6,30,34	435.000	Placements with other banks - third parties
Efek-efek - pihak ketiga	1.142.728	2f,2j,7,30,34	289.311	Securities - third parties
Kredit yang diberikan		2c,2f,2i,2j,8,29,30,34		Loans
Pihak berelasi	35.003	2d,27	35.929	Related parties
Pihak ketiga	4.591.930		2.926.174	Third parties
Jumlah	4.626.933		2.962.103	Total
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(71.890)		(56.657)	Less: allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	4.555.043		2.905.446	Net
Tagihan akseptasi - pihak ketiga	1.456	2c,2f,2j,9,29,30,34	3.278	Acceptances receivable - third parties
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	16.876	2c,2d,2f,10,27,29,30,34	10.800	Interest receivable
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 57.006 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dan Rp 47.849 juta pada tanggal 31 Desember 2010	121.342	2l,11	141.794	Premises and equipment - net of accumulated depreciation and amortization of Rp 57,006 million as of December 31, 2011 and Rp 47,849 million as of December 31, 2010
Aset pajak tangguhan	6.657	2u,25	8.268	Deferred tax assets
Aset lain-lain - bersih	29.796	2c,2f,2n,2o,12,29,30,34	38.424	Other assets - net
JUMLAH ASET	6.452.794		4.354.460	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas segera	1.504	2c,2f,13,29,30,34	25.116	Liabilities immediately payable
Simpanan		2c,2f,2p,14,29,30,34		Deposits
Pihak berelasi	697.755	2d,27	111.249	
Pihak ketiga	5.115.937		3.514.436	
Jumlah	5.813.692		3.625.685	
Simpanan dari bank lain - pihak ketiga	26.293	2f,2p,15,30	131.658	Deposits from other banks - third parties
Liabilitas akseptasi - pihak ketiga	1.456	2c,2f,9,29,30,34	3.278	Acceptances payable - third parties
Utang pajak	7.281	2u,16,29	7.132	Taxes payable
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	16.276	2w,31	9.695	Defined-benefit post-employment reserve
Liabilitas lain-lain	28.658	2c,2d,2f,17,27,29,30,34,36	30.476	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	5.895.160		3.833.040	Total Liabilities
Ekuitas				Equity
Modal saham				Capital stock
Modal dasar - 10.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham				Authorized - 10,000,000,000 shares with Rp 100 par value per share
Modal ditempatkan dan disetor - 3.756.875.883 saham	375.688	18	375.688	Issued and paid-up - 3,756,875,883 shares
Tambahan modal disetor	127.419	2q,19	127.419	Additional paid-in capital
Saldo laba - setelah eliminasi defisit sebesar Rp 147.757 juta pada tanggal 31 Oktober 2005 melalui kuasi reorganisasi	54.527		18.313	Retained earnings - net of deficit eliminated amounting to Rp 147,757 million at October 31, 2005 through quasi-reorganization
Jumlah Ekuitas	557.634		521.420	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.452.794		4.354.460	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	<u>2011</u>	<u>Notes</u>	<u>2010</u>	
	Rp '000.000		Rp '000.000	
PENDAPATAN DAN BEBAN		2r,2s		REVENUES AND EXPENSES
Pendapatan bunga	490.312	20	337.211	Interest revenues
Beban bunga	298.890	21	201.248	Interest expense
Pendapatan bunga - bersih	<u>191.422</u>		<u>135.963</u>	Interest revenues - net
Pendapatan lainnya				Other revenues
Provisi dan komisi selain dari kredit	18.918	36	10.549	Provision and commission other than loans
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif, komitmen dan kontinjensi	10.337	2b,2n,2t,12	24	Reversal of provision for impairment losses on non-earning assets, commitments and contingencies
Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih	1.902	2c	746	Gain on foreign exchange - net
Keuntungan penjualan surat berharga	1.858	2f,7	34.289	Gain on sale of securities
Keuntungan atas kenaikan nilai wajar efek-efek Lainnya	1.470	2f,7	-	Gain on increase in value of securities
	13.064	22,36	4.990	Others
Jumlah pendapatan lainnya	<u>47.549</u>		<u>50.598</u>	Total other revenues
Beban lainnya				Other expenses
Umum dan administrasi	91.763	2w,23,31	53.581	General and administrative
Tenaga kerja	82.604		64.686	Personnel
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	15.362	2i,2j,8	26.792	Provision for impairment losses on earning assets
Kerugian atas penurunan nilai wajar efek-efek Lainnya	-	2f,7	174	Loss on decrease in value of securities
	867	24,36	3.515	Others
Jumlah beban lainnya	<u>190.596</u>		<u>148.748</u>	Total other expenses
Beban lainnya - bersih	<u>(143.047)</u>		<u>(98.150)</u>	Other expenses - net
LABA SEBELUM PAJAK	<u>48.375</u>		<u>37.813</u>	INCOME BEFORE TAX
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK		2u,25		TAX EXPENSES (BENEFIT)
Kini	10.550		12.575	Current tax
Tangguhan	1.611		(3.055)	Deferred tax
Jumlah	<u>12.161</u>		<u>9.520</u>	Total
LABA BERSIH	<u>36.214</u>		<u>28.293</u>	NET INCOME
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	<u>-</u>		<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF	<u>36.214</u>		<u>28.293</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah Penuh)	<u>9,60</u>	2v,26	<u>8,81</u>	BASIC EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

Catatan/ Notes	Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Perubahan					Jumlah Ekuitas/ Total Equity Rp '000.000	
	Modal saham/ Paid-up Capital Rp '000.000	Tambahan modal disetor- bersih/ Additional Paid-in Capital - Net Rp '000.000	Nilai Wajar Efek/ Unrealized Gain (Loss) on Change in Market Value of Securities Rp '000.000	Saldo laba (defisit)/ Retained earnings (deficit) Rp '000.000			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2009	274.225	27.446	11.861	(12.140)	301.392	Balance as of December 31, 2009	
Dampak penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)	2f	-	-	-	2.160	2.160	Effect of first adoption of PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2010, setelah dampak penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)	274.225	27.446	11.861	(9.980)	303.552	Balance as of January 1, 2010, after effect of first adoption of PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006)	
Peningkatan modal sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I	18,19	101.463	101.463	-	-	202.926	Additional paid-up capital from Limited Public Offering I
Biaya emisi saham	2q,19	-	(1.490)	-	-	(1.490)	Share issuance costs
Rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek dimiliki	2f,7	-	-	(11.861)	-	(11.861)	Unrealized loss on change in market value of securities held
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	28.293	28.293	Total comprehensive income for the year	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2010	<u>375.688</u>	<u>127.419</u>	<u>-</u>	<u>18.313</u>	<u>521.420</u>	Balance as of December 31, 2010	
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	36.214	36.214	Total comprehensive income for the year	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2011	<u>375.688</u>	<u>127.419</u>	<u>-</u>	<u>54.527</u>	<u>557.634</u>	Balance as of December 31, 2011	

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pendapatan bunga, provisi dan komisi	503.154	351.891	Interest, fees and commissions received
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(294.411)	(196.913)	Interest and other financial charges paid
Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih	1.197	3.774	Net gain on foreign exchange
Beban umum dan administrasi	(67.084)	(38.387)	General and administrative expenses paid
Beban tenaga kerja	(84.117)	(62.612)	Personnel expenses paid
Pendapatan diterima lainnya - bersih	3.064	1.078	Net other income received
Arus kas operasional sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	61.803	58.831	Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) aset operasi :			Decrease (increase) in operating assets:
Efek-efek	(79.836)	186.739	Securities
Kredit	(1.664.903)	(1.371.920)	Loans
Tagihan akseptasi	1.822	7.262	Acceptances receivable
Aset lain-lain	14.461	(5.918)	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi :			Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	(23.612)	20.939	Liabilities immediately payable
Simpanan dan simpanan dari bank lain	2.082.642	1.313.972	Deposits and deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	(1.822)	(7.262)	Acceptances payable
Utang pajak	(10.401)	(16.414)	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	734	(1.863)	Other liabilities
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	380.888	184.366	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap	29.776	13.316	Proceeds from sale of premises and equipment
Perolehan aset tetap	(19.303)	(48.190)	Acquisition of premises and equipment
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas investasi	10.473	(34.874)	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penerbitan saham	-	202.926	Proceed from issuance of shares
Biaya emisi saham	-	(1.490)	Share issuance costs
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	-	201.436	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	391.361	350.928	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	957.139	609.487	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	649	(3.276)	Effect of foreign exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.349.149	957.139	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN			SUPPLEMENTAL DISCLOSURES
Kas dan Setara Kas terdiri dari :			Cash and cash equivalents consist of:
Kas	108.067	68.077	Cash
Giro pada Bank Indonesia	410.733	292.227	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	60.096	161.835	Demand deposits with other banks
Bank Indonesia Intervensi	770.253	-	Bank Indonesia Intervention
Penempatan pada bank lain	-	435.000	Placement with other banks
Jumlah Kas dan Setara Kas	1.349.149	957.139	Total cash and cash equivalents

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Windu Kentjana International Tbk (atau selanjutnya disebut "Perusahaan") didirikan dengan nama PT Bank Multicor, pada tanggal 2 April 1974 berdasarkan Akta No. 4 dari Bagijo, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. Y.A. 5/369/19 tanggal 12 Oktober 1974 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 November 1974, Tambahan No. 719. Pada tahun 2007, berdasarkan Akta No. 172 tanggal 28 November 2007, dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Jakarta, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 18 Juli 2008 tambahan No. 12219, nama Perusahaan diubah menjadi PT Bank Windu Kentjana International Tbk.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 189 tanggal 24 Juni 2010 dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Jakarta, mengenai penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. KEP.179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-39470.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di Equity Tower Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, lot 9, Jakarta. Perusahaan mempunyai 22 kantor cabang, 20 kantor cabang pembantu, dan 30 kantor kas yang berlokasi di Pulau Jawa, Tanjung Pinang, Pontianak, Batam, Denpasar, dan Palembang.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Perusahaan telah beroperasi secara komersial sejak tahun 1974. Perusahaan adalah sebuah bank devisa nasional.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Bank Windu Kentjana International Tbk (the Company) was established under the name of PT Bank Multicor on April 2, 1974 based on Notarial Deed No. 4 of Bagijo, S.H., public notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his decision letter No. YA 5/369/19 dated October 12, 1974, and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 93 dated November 19, 1974, Supplement No. 719. In 2007, based on Notarial Deed No. 172 dated November 28, 2007 of Eliwaty Tjitra, S.H., public notary in Jakarta, and published in the State Gazette of Republic of Indonesia No. 58 dated July 18, 2008 supplement No. 12219, the Company's name was changed to PT Bank Windu Kentjana International Tbk.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recent amendment was documented in Notarial Deed No. 189 dated June 24, 2010 of Eliwaty Tjitra S.H., public notary in Jakarta, concerning the revisions in the Company's Articles of Association to be in accordance with the Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. KEP.179/BL/2008 regarding the main points of the Articles of Association for a Company making Public Offering of Equity Securities and Publicly Listed Company. The latest amendments above were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-39470.AH.01.02. Tahun 2010 dated August 10, 2010.

The Company is domiciled in Jakarta, with head office located at Equity Tower, 9th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, lot 9, Jakarta. The Company has 22 branch offices, 20 sub-branch offices and 30 cash offices which are located in Java Island, Tanjung Pinang, Pontianak, Batam, Denpasar, and Palembang.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to engage in general banking. The Company has operated since 1974. The Company is a foreign exchange national bank.

b. Penggabungan Usaha Dengan PT Bank Windu Kentjana

Untuk memperkuat struktur permodalan terkait dengan implementasi arsitektur Perbankan Indonesia, para pemegang Saham PT Bank Multicor Tbk dan PT Bank Windu Kentjana, telah menyetujui untuk melakukan penggabungan usaha (merger). Dalam penggabungan ini PT Bank Multicor Tbk tetap berdiri selaku 'Perusahaan Yang Menerima Penggabungan' dan PT Bank Windu Kentjana sebagai 'Perusahaan Yang Akan Bergabung'.

Perusahaan telah mendapat pernyataan efektif sehubungan dengan merger diatas berdasarkan surat Ketua Bapepam-LK No. S-5968/BL/2007 tanggal 26 November 2007 dan izin Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/67/KEP.GBI/2007 pernyataan merger tersebut tanggal 18 Desember 2007. Keputusan Gubernur Bank Indonesia tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-00982.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2008.

c. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Pada tanggal 20 Juni 2007, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui surat No. S-3023/BL/2007 untuk penawaran umum perdana atas 300.000.000 saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp 100 per saham pada harga penawaran Rp 200 per saham. Saham-saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Juli 2007.

Pada tanggal 24 Juni 2010, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengesahkan rencana Perusahaan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli sejumlah 1.014.630.713 saham yang bernilai nominal Rp 100 per saham dengan harga pelaksanaan Rp 200 per saham. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini didokumentasikan dalam Akta No. 187 tanggal 24 Juni 2010 dari Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Jakarta.

b. Merger With PT Bank Windu Kentjana

The stockholders of PT Bank Multicor Tbk and PT Bank Windu Kentjana agreed to merge in order to strengthen the capital structure in relation with the implementation of the Indonesian Banking Architecture. In this merger, PT Bank Multicor Tbk is "the Surviving Company" and PT Bank Windu Kentjana as "the Merged Company".

The Company has received the Notice of Effectivity of the Merger based on the letter by the Chairman of Bapepam-LK No. S-5968/BL/2007 dated November 26, 2007 and the merger license from Bank Indonesia based on the decision of the Governor of Bank Indonesia No. 9/67/KEP.GBI/2007 dated December 18, 2007 stating that the merger was effective on January 8, 2008, the approval date for the changes in Articles of Association of PT Bank Multicor Tbk, the Surviving Company, by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-00982.AH.01.02 Tahun. 2008.

c. Public Offering of the Company's Shares

On June 20, 2007, the Company obtained the Notice of Effectivity from the Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) in his letter No. S-3023/BL/2007 for the initial public offering of 300,000,000 shares with a par value of Rp 100 per share and offering price of Rp 200 per share. On July 3, 2007, the Company's shares were listed at the Indonesia Stock Exchange.

On June 24, 2010, the Company held an Extraordinary Stockholders' Meeting to ratify the plan of the Company to issue additional 1,014,630,713 shares with a par value of Rp 100 per share through Limited Public Offering I at an exercise price of Rp 200 per share. The minutes of this Extraordinary Stockholders' Meeting were documented in Notarial Deed No. 187 dated June 24, 2010 of Eliwaty Tjitra, S.H., public notary in Jakarta.

Penawaran Umum Terbatas I ini telah mendapat pernyataan efektif dari ketua Bapepam-LK pada tanggal 24 Juni 2010 melalui Surat Keputusan No. S-5684/BL/2010. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas I ini adalah sebesar Rp 202.926 juta.

The Limited Public Offering I took effect upon receipt from the Chairman of Bapepam-LK of the Notice of Effectivity in his Decision Letter No. S-5684/BL/2010. The proceeds from this Limited Public Offering I amounted to Rp 202,926 million.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, seluruh saham Perusahaan sebanyak 3.756.875.883 saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (Catatan 19).

As of December 31, 2011 and 2010, all of the shares issued by the Company totaling to 3,756,875,883 shares are listed in the Indonesia Stock Exchange (Note 19).

d. Karyawan, Dewan Komisaris, dan Direksi

d. Employees, Board of Commissioners, and Directors

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan Akta No. 167 tanggal 28 Juni 2011 dari Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

The Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2011 based on Notarial Deed No. 167 dated June 28, 2011 of Eliwaty Tjitra, S.H., public notary in Jakarta, consists of the following:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sjerra Salim
Komisaris : Ir. Syamsuar Halim
Komisaris Independen : Mohamad Hasan

Board of Commissioners
: President Commissioner
: Commissioner
: Independent Commissioners

Direksi
Direktur Utama : Herman Sujono
Wakil Direktur Utama : Hendri Kurniawan
Direktur : Tohir Sutanto
Setiawati Samahita

Directors
: President Director
: Vice President Director
: Directors

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan Akta No. 185 tanggal 24 Juni 2010 dari Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

The Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2010 based on Notarial Deed No. 185 dated June 24, 2010 of Eliwaty Tjitra, S.H., public notary in Jakarta, consists of the following:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sjerra Salim
Komisaris : Ir. Syamsuar Halim
Komisaris Independen : Maman Rachman
Mohamad Hasan

Board of Commissioners
: President Commissioner
: Commissioner
: Independent Commissioners

Direksi
Direktur Utama : Herman Sujono
Wakil Direktur Utama : Hendri Kurniawan
Direktur : Donny Pradono Suleiman
Tohir Sutanto
Setiawati Samahita

Directors
: President Director
: Vice President Director
: Directors

Perusahaan, sebagai perusahaan terbuka, memiliki Komisaris Independen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bapepam dan LK yaitu Maman Rachman yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia pada tanggal 16 November 2009 dan telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 14 Januari 2010.

Perusahaan juga telah membentuk Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Sesuai dengan Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang "Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum", Perusahaan telah membentuk Komite Manajemen Risiko Perusahaan yang diketuai oleh Direktur utama dengan lima (5) orang direktur sebagai anggota tetap serta kepala divisi sebagai anggota tidak tetap. Satuan Kerja Manajemen Risiko Perusahaan terdiri dari tiga (3) orang dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Jumlah rata-rata karyawan Perusahaan (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah 941 dan 954 karyawan.

Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 12.227 juta dan Rp 10.801 juta.

Laporan keuangan PT Bank Windu Kentjana Tbk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 28 Maret 2012. Direksi yang bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut

As required by Bapepam - LK, being a publicly listed company, the Company has an independent commissioner, Maman Rachman who has been approved by Bank Indonesia on November 16, 2009 and has been approved by the stockholders in a Stockholders' Meeting on January 14, 2010.

The Company has also established a Risk Monitoring Committee and a Remuneration and Nomination Committee.

In accordance with Appendix 1 of the Bank Indonesia Circular Letter No. 5/21/DPNP dated September 29, 2003, regarding "Guidelines on Standards for Application of Risk Management for Commercial Banks", the Company has established a Risk Management Committee which is led by the President Director with five (5) directors, who are acting as permanent members, while the heads of divisions are non-permanent members. The Company's Risk Management Task Force consists of three (3) persons and are reporting directly to the Compliance Director.

The Company has an average total number of employees (unaudited) of 941 and 954 as of December 31, 2011 and 2010, respectively.

Total remuneration paid to commissioners and directors in 2011 and 2010 amounted to Rp 12,227 million and Rp 10,801 million, respectively.

The financial statements of PT Bank Windu Kentjana International Tbk for the year ended December 31, 2011 were completed and authorized for issue on March 28, 2012 by the Directors who are responsible for the financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 2008 (PAPI) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan", Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, dan Surat Edaran No. SE-02/BL/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi dan Perbankan", yang telah dipertegas dengan Surat Edaran No. SE-03/BL/2011 tanggal 13 Juli 2011. Seperti diungkapkan dalam Catatan-catatan terkait, beberapa standar akuntansi telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2011.

Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" (diterapkan efektif 1 Januari 2011). Penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2009) tersebut memberikan pengaruh yang signifikan bagi penyajian dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Banking Accounting Guidelines ("PAPI") 2008 and Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Regulation No. VIII.G.7. regarding "Financial Statements Presentation Guidelines" included in the Appendix of the Decree of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam – LK) No. KEP-06/PM/2000 dated March 13, 2000 as amended with the Decree of the Chairman of Bapepam – LK No. KEP – 554/BL/2010 dated December 30, 2010, and Circular Letter No. SE-02/BL/2008 January 31, 2008 on "Guidelines for the Preparation of Financial Statements of Public Companies General Mining, Oil and Gas and Banking" as reaffirmed with Circular Letter No. SE-03/BL/2011, dated July 13, 2011. As disclosed further in relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2011. Such financial statements are an English translation of the Company's statutory report in Indonesia, and are not intended to present the financial position and the results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.

The Company's financial statements for the year ended December 31, 2011 are prepared in accordance with the Statements of Financial Accounting Standard ("PSAK") 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements" (adopted on January 1, 2011). The said adoption of PSAK 1 (Revised 2009) has significant impact on the related presentation and disclosures in the financial statements.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 seperti yang telah diungkapkan pada Catatan ini.

Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan modifikasi dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Dalam penyusunan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, dan Bank Indonesia Intervensi dengan jatuh tempo tiga bulan atau kurang yang tidak dibatasi pencairannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rupiah) yang juga merupakan mata uang fungsional. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan ini, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam jutaan Rupiah.

b. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Revisi

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) berikut:

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistently applied in preparation of financial statements for the year ended December 31, 2010, except for adoptions of several amended PSAK's effective January 1, 2011 as disclosed in this Note.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the modified direct method, with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

In preparing the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash, demand deposits with Bank Indonesia, demand deposits with other banks, placement with other banks, and Bank Indonesia Intervention with original maturity of three months or less from the acquisition date and are not being pledged as collateral for borrowing or restricted.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rupiah) which is also the functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are stated in millions of Rupiah.

b. Adoption of Revised Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

The Company has adopted the following Statements of Financial Accounting Standards (PSAKs) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAKs) effective January 1, 2011:

1. PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan", mengatur penyajian laporan keuangan, antara lain, tujuan, komponen laporan keuangan, penyajian yang wajar, materialitas dan agregat, saling hapus, pemisahan antara aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, informasi komparatif dan konsistensi dan memperkenalkan pengungkapan baru, antara lain, estimasi dan pertimbangan untuk akun-akun utama, manajemen permodalan, dan pendapatan komprehensif lain. Standar ini memperkenalkan laporan laba rugi komprehensif yang menggabungkan semua pendapatan dan beban yang diakui dalam laporan laba rugi secara bersama-sama dengan "pendapatan komprehensif lain". Entitas dapat memilih untuk menyajikan satu laporan laba rugi komprehensif, atau dua laporan yakni laporan laba rugi terpisah dan laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan memilih untuk menyajikan dalam bentuk satu laporan dan menyajikan laporan keuangan tahun sebelumnya sesuai dengan PSAK ini untuk tujuan perbandingan dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2011.
 2. PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi", yang mensyaratkan informasi dilaporkan dalam setiap segmen operasi sesuai dengan informasi yang dilaporkan secara regular kepada pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. PSAK ini menyempurnakan definisi segmen operasi dan mengharuskan "pendekatan manajemen" dalam menyajikan informasi segmen menggunakan dasar yang sama seperti halnya pelaporan internal. Perusahaan menyajikan informasi segmen tahun sebelumnya sesuai dengan PSAK ini untuk tujuan perbandingan dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011.
1. PSAK No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements", regulates the presentation of financial statements as to, among others, the objective, component of financial statements, fair presentation, materiality and aggregate, offsetting, distinction between current and non-current assets and short term and long-term liabilities, comparative information and consistency and introduces new disclosures such as, among others, key estimations and judgments, capital management, and other comprehensive income. This standard introduces a statement of comprehensive income that combines all items of income and expenses recognized in the profit and loss together with "other comprehensive income". The entities may choose to present all items in one statement, or to present two linked statements, a separate statement of income and a statement of comprehensive income. The Company has elected to present a single statement and has presented its prior years' financial statements in conformity with this PSAK to be comparative with the December 31, 2011 financial statements.
 2. PSAK No. 5 (Revised 2009), "Operating Segments", requires reporting information of each operating segment to be in accordance with the information which are regularly reported to the decision maker in operations to make decisions on resources that will be allocated to the segment and to value its performance. This PSAK has improved the definition of segment information using the same basis as in the internal reporting. The Company has presented prior year's segment information in accordance with this PSAK to be comparative with the financial statements for the year ended December 31, 2011.

3. PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", mensyaratkan pengungkapan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

4. PSAK No. 25 (Revisi 2009) – Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Sejak tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menentukan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi atas garansi bank, *letters of credit*, dan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan berdasarkan selisih antara biaya perolehan diamortisasi (nilai tercatat) dan nilai kini pembayaran liabilitas yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan tersebut menjadi besar kemungkinan terjadinya).

Sebelum 1 Januari 2011, Perusahaan menentukan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 12/516/DPNP/IDPnP tanggal 21 September 2010.

Penentuan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi diklasifikasikan menjadi lima (5) kategori dengan persentase minimum penyisihan kerugian sebagai berikut:

Kategori	Persentase Minimum Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ <i>Minimum Percentage of Allowance for Impairment Losses</i>	Category
Lancar	1%	Current
Dalam perhatian khusus	5%	Special mention
Kurang lancar	15%	Substandard
Diragukan	50%	Doubtful
Macet	100%	Loss

3. PSAK No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures", requires disclosures of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments, in the financial statements.

4. PSAK No. 25 (Revised 2009), Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

Estimated losses on commitment and contingencies

Starting from January 1, 2011, the Company determines estimated losses on commitments and contingencies of bank guarantees, letters of credit and unused loan facilities based on the difference between the amortised amount (carrying amount) and the present value of any expected payment (when a payment under the guarantee has become probable).

Prior to January 1, 2011, the Company assesses the estimated losses on commitments and contingencies based on Bank Indonesia Regulation No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005 and in accordance with the Letter from Bank Indonesia No. 12/516/DPNP/IDPnP dated September 21, 2010.

Determination of estimated losses on commitments and contingencies are classified into five (5) categories with the minimum percentage of allowance for possible losses as follows:

Persentase di atas berlaku untuk komitmen dan kontinjensi (fasilitas kredit diberikan yang belum digunakan, *letters of credit*, dan bank garansi) dikurangi nilai agunan, kecuali untuk komitmen dan kontinjensi yang dikategorikan sebagai Lancar, dimana persentasenya langsung diterapkan atas saldo komitmen dan kontinjensi yang bersangkutan.

The above percentages are applied to commitments and contingencies (unused loan facilities, letter of credits and bank guarantee), less collateral value, except for commitments and contingencies categorised as current, where the rates are applied directly to the outstanding balance of commitment and contingencies.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif

Allowance for possible losses on non-productive properties

Sejak tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Starting from January 1, 2011, the Company determines allowance for possible losses on non productive assets at the lower of the carrying amount and fair value less costs to sell.

Sebelum 1 Januari 2011, cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif ditetapkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yang mengklasifikasikan aset non-produktif dalam empat (4) kategori dengan besarnya persentase cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

Prior January 1, 2011, allowance for possible losses on non-productive assets was determined in accordance with Bank Indonesia regulation, which classifies non-productive assets into four (4) categories with percentage of allowance for impairment losses as follows:

Persentase Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/
Percentage of Allowance for Impairment Losses

Lancar	Minimum 1%	Current
Kurang lancar	Minimum 15%	Substandard
Diragukan	Minimum 50%	Doubtful
Macet	100%	Loss

Dampak perubahan penentuan cadangan kerugian penurunan nilai di atas diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

The effect of the above changes on the determination of allowance for impairment losses was charged to the current year's statement of comprehensive income.

Berikut ini adalah standar baru dan revisi adalah standar dan interpretasi standar yang relevan terhadap laporan keuangan Perusahaan dan wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2011, namun tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Following are the new and revised statements and interpretations which are relevant to the Company's financial statements and have been adopted effective January 1, 2011, but do not have material impact to the Company' financial statement.

PSAK

1. PSAK No. 2 (Revisi 2009), Laporan Arus Kas.
2. PSAK No. 3 (Revisi 2010), Laporan Keuangan Interim
3. PSAK No. 8 (Revisi 2010), Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
4. PSAK No. 23 (Revisi 2010) – Pendapatan
5. PSAK No. 48 (Revisi 2009) – Penurunan Nilai Aset
6. PSAK No. 57 (Revisi 2009) – Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

ISAK

1. ISAK No. 17 (Revisi 2009), Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

Berikut ini adalah standar baru dan revisi atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2011, namun tidak relevan terhadap laporan keuangan Perusahaan:

PSAK

1. PSAK No. 4 (Revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri,
2. PSAK No. 12 (Revisi 2009), Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
3. PSAK No. 15 (Revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi
4. PSAK No. 19 (Revisi 2010) – Aset Takberwujud
5. PSAK No. 22 (Revisi 2010) – Kombinasi Bisnis
6. PSAK No. 58 (Revisi 2009) – Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

PSAK

1. PSAK No. 2 (Revised 2009), Statements of Cash Flows”
2. PSAK No. 3 (Revised 2010), Interim Financial Reporting
3. PSAK No. 8 (Revised 2010), Events After the Reporting Period
4. PSAK No. 23 (Revised 2010), Revenue
5. PSAK No. 48 (Revised 2009), Impairment of Assets
6. PSAK No. 57 (Revised 2009), Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets

ISAK

1. ISAK No. 17 (Revised 2009), Interim Financial Reporting and Impairment

The following are the new and revised statements and interpretations which are effective January 1, 2011 but are not relevant to the Company's financial statements:

PSAK

1. PSAK No. 4 (Revised 2009), Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements
2. PSAK No. 12 (Revised 2009), Investments in Joint Ventures
3. PSAK No. 15 (Revised 2009), Investments in Associates
4. PSAK No. 19 (Revised 2010), Intangible Assets
5. PSAK No. 22 (Revised 2010), Business Combinations
6. PSAK No. 58 (Revised 2009), Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

ISAK

1. ISAK No. 7 (Revisi 2009), Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus
2. ISAK No. 9 (Revisi 2009), Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa
3. ISAK No. 10 (Revisi 2009), Program Loyalitas Pelanggan
4. ISAK No. 11 (Revisi 2009), Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik
5. ISAK No. 12 (Revisi 2009), Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer
6. ISAK No. 14 (Revisi 2009), Aset Takberwujud - Biaya Situs Web

c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul 16.00 WIB. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun, yang disesuaikan dengan suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dengan biaya perolehan diamortisasi yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs pada akhir tahun.

ISAK

1. ISAK No. 7 (Revised 2009), Consolidation of Special Purpose Entities
2. ISAK No 9 (Revised 2009), Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
3. ISAK No. 10 (Revised 2009), Customer Loyalty Program
4. ISAK No. 11 (Revised 2009), Distribution of Non-Cash Assets to Owners
5. ISAK No. 12 (Revised 2009), Jointly Controlled Entities Nonmonetary Contributions by Ventures
6. ISAK No. 14 (Revised 2009), Intangible Assets – Website Cost

c. Foreign Currency Transactions and Balances

The books of accounts of the Company are maintained in Rupiah. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

At statement of financial position dates, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Reuters spot rate at 16:00 Western Indonesian Time. The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities are recognized in the statement of comprehensive income of the current year.

The foreign exchange gains or losses on monetary items is the difference between amortized cost in Rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest and payments during the year, and the amortized cost in foreign currency translated into Rupiah at the exchange rate at the end of the year.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah kurs Reuters jam 16.00 WIB masing-masing sebesar:

The conversion rates used by the Company on December 31, 2011 and 2010 are the following Reuters rates on 16.00 Western Indonesian Time:

	2011	2010	
	Rp	Rp	
Euro	11.714,76	12.017,99	Euro
Dolar Amerika Serikat	9.067,50	9.010,00	U.S. Dollar
Dolar Australia	9.205,78	9.169,48	Australian Dollar
Dolar Singapura	6.983,55	7.025,89	Singapore Dollar
Dolar Hong Kong	1.167,23	1.159,08	Hong Kong Dollar
Yen Jepang	116,82	110,75	Japanese Yen

d. Transaksi Pihak Berelasi

Kebijakan Akuntansi Efektif 1 Januari 2011

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

1. Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara:
 - a. mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan Perusahaan;
 - b. memiliki kepentingan pada Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - c. memiliki kontrol bersama atas Perusahaan;
2. Suatu entitas adalah perusahaan asosiasi;
3. Suatu entitas merupakan ventura bersama dimana Perusahaan sebagai venturer;
4. Personil manajemen kunci Perusahaan dan/atau entitas induk Perusahaan;
5. Anggota keluarga terdekat dari pihak yang diidentifikasi dalam (1) atau (4);
6. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau secara signifikan dipengaruhi oleh, atau hak suara dalam entitas tersebut, secara langsung atau tidak langsung oleh individu yang dimaksud dalam (4) atau (5); atau

d. Transactions with Related Parties

Accounting Policies Effective January 1, 2011

A party is considered to be related to the Company if:

1. Directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party:
 - a. controls, is controlled by, or is under common control with, the Company;
 - b. has an interest in the Company that gives it significant influence over the Company; or,
 - c. has joint control over the Company;
2. The party is an associate of the Company;
3. The party is a joint venture in which the Company is a venturer;
4. The party is a member of the key management personnel of the Company and/ or its parent;
5. The party is a close member of the family of any individual referred to in (1) or (4);
6. The party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to in (4) or (5); or

7. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja Perusahaan atau perusahaan lain yang terkait dengan Perusahaan.

Kebijakan Akuntansi sebelum Tanggal 1 Januari 2011

Pihak-pihak berelasi adalah :

1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk induk perusahaan, anak perusahaan dan perusahaan afiliasi);
2. Perusahaan asosiasi;
3. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan);
4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
5. Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.

7. The party is a post employment benefit plan for the benefit of employees of the Company, or of any entity that is a related party of the Company.

Accounting Policies Prior to January 1, 2011

Related parties consist of the following:

1. Companies that, through one or more intermediaries, control, or are controlled by, or are under common control with, the Company (including holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries);
2. Associated companies;
3. Individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the Company that gives them significant influence over the Company and close family members of such individuals (close family members are those who can influence or can be influenced by such individuals in their transactions with the Company);
4. Key management personnel, that is, those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company, including commissioners, directors, and officers of the Company and close family members of such individuals; and
5. Companies in which a substantial interest in the voting power is owned, directly or indirectly, by any person described in (3) or (4) or over which such person is able to exercise significant influence. These include companies owned by commissioners, directors or major stockholders of the Company and companies that have a common member of key management with that of the Company.

Karyawan, selain karyawan kunci, tidak dikelompokkan sebagai pihak berelasi. Semua transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan, persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan dalam laporan keuangan.

Employees, besides key management personnel, are not classified as related party. All transactions with related parties, whether or not done under similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

e. Penggunaan Estimasi

Manajemen membuat estimasi dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.

e. Use of Estimates

Management makes estimates and assumptions in the preparation of the financial statements which affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues and expenses. Actual results could differ from those estimates. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

f. Instrumen Keuangan

Efektif 1 Januari 2010, Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

f. Financial Instruments

Effective January 1, 2010 the Company has adopted PSAK No. 50 (Revised 2006) "Financial Instruments: Presentation and Disclosures" and PSAK No. 55 (Revised 2006) "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

Dalam penerapan standar diatas, Perusahaan telah mengidentifikasi sejumlah penyesuaian transisi sesuai dengan Buletin Teknis No. 4 mengenai Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

In adopting the above new standards, the Company has identified the following transition adjustments in accordance with the Technical Bulletin No. 4 concerning the Transition Provisions for the First Adoption of PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006) as issued by the Indonesian Institute of Accountants.

Dampak transisi PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) terhadap laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2010 dijelaskan pada tabel berikut:

The effect of the transition to PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006) to the Company's statement of financial position as of January 1, 2010 is set out in the following table:

	<i>Sebagaimana dilaporkan 1 Januari 2010/ As reported, January 1, 2010</i>	<i>Penyesuaian transisi/ Transition adjustment</i>	<i>Setelah d disesuaikan 1 Januari 2010/ As Adjusted January 1, 2010</i>	
Aset - bersih				Assets - net
Giro pada bank lain	84.588	1.003	85.591	Demand deposits with other banks
Efek-efek	815.692	1.772	817.464	Securities
Tagihan akseptasi	10.435	105	10.540	Acceptances receivable
Aset pajak tangguhan	5.933	(720)	5.213	Deferred tax asset
	<u>916.648</u>	<u>2.160</u>	<u>918.808</u>	
Jumlah - bersih				Total Financial assets - net
Ekuitas				Equity
Defisit	(12.140)	2.160	(9.980)	Deficit

Penyesuaian transisi di atas berasal dari dampak penilaian kembali kerugian penurunan nilai aset keuangan, yang merupakan selisih antara cadangan kerugian penurunan nilai yang dihitung berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) setelah dikurangi dampak aset pajak tangguhan dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang dihitung dengan menggunakan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyisihan penghapusan aset produktif (Catatan 2j).

Berikut adalah kebijakan akuntansi berdasarkan PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006):

Pengakuan dan Klasifikasi

Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim adalah instrumen keuangan diakui pada tanggal penyelesaian.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

The above transition adjustments were derived from the reassessment of impairment losses for financial assets that is the difference between the allowance for impairment losses as calculated based on PSAK No. 55 (Revised 2006) net of deferred tax assets with the allowance for impairment losses as calculated based on Regulation of Bank Indonesia regarding allowance for impairment losses of earning assets (Note 2j).

The following are accounting policies in accordance with PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006):

Recognition and Classification

The Company recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position if, and only if, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. All regular way purchases and sales of financial instruments are recognized on the settlement date.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The fair value of the consideration given or received is determined by reference to the transaction price or other market prices. If such market prices are not reliably determinable, the fair value of the consideration is estimated as the sum of all future cash payments or receipts, discounted using the prevailing market rates of interest for similar instruments with similar maturities. The initial measurement of financial instruments, except for financial instruments at fair value through profit and loss (FVPL), includes transaction costs.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of financial liability and they are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued. Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest rate method.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Effective interest rate method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability and allocating the interest income or expense over the relevant period by using an interest rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the instruments or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial instruments. When calculating the effective interest, the Company estimate future cash flows considering all contractual terms of the financial instruments excluding future credit losses and includes all fees and points paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

Amortized cost is the amount at which the financial asset or financial liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market. At initial recognition, the Company classifies its financial instruments in the following categories: financial assets at FVPL, loans and receivables, held-to-maturity (HTM) investments, available for sale (AFS) financial assets, financial liabilities at FVPL and other financial liabilities; and where allowed and appropriate, re-evaluates such classification at every reporting date.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (*bid price* untuk posisi beli dan *ask price* untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila *bid price* dan *ask price* yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

Laba/Rugi Hari ke-1

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Perusahaan mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yakni Laba/Rugi hari ke-1) dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing-masing transaksi, Perusahaan menerapkan metode pengakuan Laba/Rugi Hari ke-1 yang sesuai.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments traded in active markets at the statement of financial position date is based on their quoted market price or dealer price quotations (*bid price* for long positions and *ask price* for short positions), without any deduction for transaction costs. When current bid and asking prices are not available, the price of the most recent transaction is used since it provides evidence of the current fair value as long as there has not been a significant change in economic circumstances since the time of the transaction. For all other financial instruments not listed in an active market, except investment in unquoted equity securities, the fair value is determined by using appropriate valuation techniques. Valuation techniques include net present value techniques, comparison to similar instruments for which market observable prices exist, options pricing models, and other relevant valuation models.

Day 1 Profit/Loss

Where the transaction price in a non-active market is different from the fair value of other observable current market transactions in the same instrument or based on a valuation technique whose variables include only data from observable market, the Company recognizes the difference between the transaction price and fair value (a Day 1 profit/loss) in the statement of comprehensive income unless it qualifies for recognition as some other type of asset. In cases where the data is not observable, the difference between the transaction price and model value is only recognized in the statement of comprehensive income when the inputs become observable or when the instrument is derecognized. For each transaction, the Company determines the appropriate method of recognizing the "Day 1" profit/loss amount.

Aset Keuangan

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat. Derivatif juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b. Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c. instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Financial Assets

1. Financial Assets at FVPL

Financial assets at FVPL include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at FVPL. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling in the near term. Derivatives are also classified as held for trading unless the derivative is designated as effective hedging instruments.

Financial assets may be designated at initial recognition at FVPL if the following criteria are met:

- a. the designation eliminates or significantly reduces the inconsistent treatment that would otherwise arise from measuring the financial assets or recognizing gains or losses on them on a different basis; or
- b. the assets are part of a group of financial assets, financial liabilities or both which are managed and their performance evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy; or
- c. the financial instruments contains an embedded derivative, unless the embedded derivative does not significantly modify the cash flows or it is clear, with little or no analysis, that it would not be separately recorded.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, kategori ini mencakup investasi dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang diungkapkan pada Catatan 7 atas laporan keuangan.

2. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in the statement of comprehensive income. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of other income according to the terms of the contract, or when the right of payment has been established.

As of December 31, 2011 and 2010, the investments in Certificates of Bank Indonesia (SBI), government bond and corporate bonds as disclosed in Note 7 to financial statements are included in this category.

2. Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are not entered into with the intention of immediate or short-term resale and are not classified as financial assets at FVPL, HTM investments or AFS financial assets.

After initial measurement, loans and receivables are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees and costs that are an integral part of the effective interest rate. The amortization is included as part of interest income in the statement of comprehensive income. The losses arising from impairment are recognized in the statement of comprehensive income.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, kategori ini mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, kredit yang diberikan, tagihan akseptasi, pendapatan bunga yang masih akan diterima, dan aset lain-lain dalam bentuk uang jaminan, tagihan penjualan agunan yang diambil alih, dan tagihan transaksi ATM.

As of December 31, 2011 and 2010, this category consists of cash, demand deposits with Bank Indonesia, demand deposits with other banks, placement with other banks, loans, acceptances receivable, interest receivable, and other asset in the form of refundable deposits, receivable from sale of foreclosed properties, and ATM transaction receivables.

3. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan manajemen Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Apabila Perusahaan menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, maka seluruh aset keuangan dalam kategori tersebut terkena aturan pembatasan (*tainting rule*) dan harus direklasifikasi ke kelompok tersedia untuk dijual.

Setelah pengukuran awal, investasi ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat penghentian pengakuan dan penurunan nilai dan melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, kategori ini mencakup efek-efek dalam bentuk obligasi korporasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

3. Held to Maturity (HTM) Financial Assets

HTM investments are quoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities for which the Company's management has the positive intention and ability to hold to maturity. When the Company sells or reclassifies other than an insignificant amount of HTM investments before maturity, the entire category would be tainted and reclassified as AFS financial assets.

After initial measurement, these investments are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less any impairment in value. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees that are an integral part of the effective interest rate. The amortization is included as part of interest income in the statement of comprehensive income. Gains and losses are recognized in the statement of comprehensive income when the HTM investments are derecognized and impaired, as well as through the amortization process using the effective interest rate method.

As of December 31, 2011 and 2010, the investment in corporate bond of PT Jasa Marga (Persero) Tbk is included in this category.

4. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain. Aset keuangan ini diperoleh dan dimiliki untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau karena perubahan kondisi pasar.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar, dengan laba atau rugi yang belum direalisasi diakui sebagai pendapatan komprehensif lain – “Laba (rugi) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek”, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau dianggap telah mengalami penurunan nilai, dimana pada saat itu akumulasi laba atau rugi direklasifikasi ke komponen laba rugi dan dikeluarkan dari akun “Laba (rugi) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek”.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam kategori ini.

Liabilitas Keuangan

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila liabilitas tersebut merupakan hasil dari aktivitas perdagangan atau transaksi derivatif yang tidak dimaksudkan sebagai lindung nilai, atau jika Perusahaan memilih untuk menetapkan liabilitas keuangan tersebut dalam kategori ini.

Perubahan dalam nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

4. AFS Financial Assets

AFS financial assets are those which are designated as such or not classified in any of the other categories. They are purchased and held indefinitely and may be sold in response to liquidity requirements or changes in market conditions.

After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized as other comprehensive income - “Unrealized gain (loss) on changes in fair value of AFS securities” until the investment is derecognized, or determined to be impaired, at which time the cumulative gain or loss is reclassified to the profit and loss and removed from “Unrealized gain (loss) on changes in fair value of AFS securities”.

As of December 31, 2011 and 2010, the Company has not classified any financial assets in this category.

Financial Liabilities

1. Financial Liabilities at Fair Value through Profit and Loss (FVPL)

Financial liabilities are classified in this category if these result from trading activities or derivative transactions that are not accounted for as accounting hedges, or when the Company elects to designate a financial liability under this category.

Changes in fair value are recognized directly in the statements of comprehensive income.

As of December 31, 2011 and 2010, the Company has no financial liabilities classified under this category.

2. Liabilitas Lainnya

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, kategori ini mencakup liabilitas segera, simpanan, simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi, dan liabilitas lain-lain.

Instrumen Keuangan Derivatif

Derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama dan dicatat sebagai derivatif jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- a. Karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif melekat tidak berkaitan erat dengan karakteristik ekonomi dan risiko dari kontrak utama.

2. Other Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVPL are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangement results in the Company having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

Other financial liabilities are recognized initially at fair value and are subsequently carried at amortized cost, taking into account the impact of applying the effective interest method of amortization (or accretion) for any related premium, discount, and any directly attributable transaction costs.

As of December 31, 2011 and 2010, this category consists of liabilities immediately payable, deposits, deposits from other banks, acceptances payable, and other liabilities.

Derivative Financial Instruments

An embedded derivative is separated from the host contract and accounted for as derivative if all the following conditions are met:

- a. The economic characteristics and risks of the embedded derivative are not closely related to economic characteristics of the host contract.

- b. Instrumen terpisah yang memiliki persyaratan yang sama dengan derivatif melekat memenuhi definisi sebagai derivatif.
- c. Instrumen campuran atau instrumen yang digabungkan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

Derivatif yang berdiri sendiri dan derivatif melekat yang dipisahkan diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, kecuali derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Pada pengakuan awal, instrumen derivatif diukur pada nilai wajar pada tanggal transaksi derivatif terjadi atau dipisahkan, dan selanjutnya diukur pada nilai wajar.

Derivatif disajikan sebagai aset apabila nilai wajarnya positif, dan disajikan sebagai liabilitas apabila nilai wajarnya negatif. Laba atau rugi dari perubahan nilai wajar derivatif langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Manajemen menelaah apakah derivatif melekat harus dipisahkan dari kontrak utamanya pada saat pertama kali Perusahaan menjadi salah satu pihak dari kontrak tersebut. Penelaahan kembali dilakukan apabila terdapat perubahan syarat-syarat kontrak yang mengakibatkan modifikasi arus kas secara signifikan.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen Perusahaan menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

- b. Separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of the derivative; and
- c. Hybrid or combined instrument is not recognized at fair value through profit or loss.

Freestanding and separated embedded derivatives are classified as financial assets or financial liabilities at FVPL unless they are designated as effective hedging instruments. Derivative instruments are initially recognized at fair value on the date in which a derivative transaction is entered into or bifurcated, and are subsequently re-measured at fair value.

Derivatives are carried as assets when the fair value is positive and as liabilities when the fair value is negative. Consequently, gain and losses from changes in fair value of these derivatives are recognized immediately in the statement of comprehensive income.

The management assesses whether embedded derivatives are required to be separated from host contracts when the Company first becomes party to the contract. Reassessment only occurs if there is a change in terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Impairment of Financial Assets

The Company's management assesses at each statement of financial position date whether a financial asset or group of financial assets is impaired.

1. Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat penurunan nilai secara individual atau kolektif. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan kerugian penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas akun cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

1. Assets Carried at Amortized Cost

The management first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the management determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss, is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss on loans and receivables or held to maturity investments carried at amortized cost has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate (i.e., the effective interest rate computed at initial recognition). The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to the statement of comprehensive income.

If, on the next year, the amount of impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in the statement of comprehensive income, to the extent that the carrying value of the assets does not exceed its amortized cost at the reversal date.

2. Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa.

3. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam komponen laba rugi, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam komponen laba rugi. Kerugian penurunan nilai instrumen ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui komponen laba rugi. Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas.

Atas instrumen utang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga tetap diakui berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui komponen laba rugi.

2. Assets Carried at Cost

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on an unquoted equity instrument that is not carried at fair value because its fair value cannot be reliably measured, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset.

3. AFS Financial Assets

In case of equity investments classified as AFS, assessment of any impairment would include a significant or prolonged decline in the fair value of the investments below its cost. Where there is evidence of impairment, the cumulative loss measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in the statement of income is removed from equity and recognized in the statement of income. Impairment losses on equity investments are not reversed through the statement of income. Increases in fair value after impairment are recognized directly in equity.

In the case of debt instruments classified as AFS, impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost. Interest continues to be accrued at the original effective interest rate on the reduced carrying amount of the asset and is recorded as part of interest income in the statement of comprehensive income. If, in subsequent year, the fair value of a debt instrument increased and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the statement of comprehensive income, the impairment loss is reversed through the statement of income.

***Penghentian Pengakuan Aset dan
Liabilitas Keuangan***

1. Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c. Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan.

***Derecognition of Financial Assets and
Liabilities***

1. Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a. the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b. the Company retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c. the Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Where the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

g. Giro Wajib Minimum

Pada tanggal 23 Oktober 2008, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan No. 10/25/PBI/2008 mengenai perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/19/2008 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan Peraturan No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing yang berlaku efektif pada tanggal 1 November 2010, kecuali untuk GWM Loan to Deposit (LDR) berlaku efektif pada 1 Maret 2011.

Pada tanggal 9 Februari 2011, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan No. 13/10/PBI/2011 mengubah Peraturan No. 12/19/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM terdiri dari GWM Rupiah dan GWM mata uang asing. GWM Rupiah terdiri dari GWM Utama, GWM Sekunder dan GWM LDR.

GWM Utama adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga.

2. Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged, cancelled or has expired. Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability. The recognition of a new liability and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of comprehensive income.

g. Statutory Reserves at Bank Indonesia

On October 23, 2008, Bank Indonesia (BI) issued regulation No. 10/25/2008 regarding the amendment of Bank Indonesia Regulation No. 10/19/2008 dated October 14, 2008 regarding Statutory Reserves at Bank Indonesia for Commercial Banks. The said regulations was amended with Bank Indonesia Regulation No. 12/19/PBI/2009 dated October 4, 2010 regarding Statutory Reserve for Commercial Banks at Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency which is effective on November 1, 2010, except for Loan to Deposit (LDR) Reserve to take effect on March 1, 2011.

On February 9, 2011, BI issued regulation No. 13/10/PBI/2011 regarding the amendment of Bank Indonesia Regulation No. 12/19/2010 regarding Statutory Reserves at Bank Indonesia for Commercial Banks in Rupiah and Foreign Currency. Based on the Bank Indonesia Regulation, the statutory reserve consists of Rupiah and Foreign Currency Reserve. Statutory Reserve in Rupiah consists of Primary Reserve, Secondary Reserve, and LDR Reserve.

Primary statutory reserve is minimum deposit that should be maintained by Bank in demand deposit with BI based on certain percentage of third party funds as determined by BI.

<p>GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN) dan/atau kelebihan cadangan (<i>Excess Reserve</i>), yang besarnya ditetapkan BI sebesar persentase tertentu.</p> <p>GWM LDR adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihitung berdasarkan selisih LDR yang dimiliki oleh Bank dan target LDR yang wajib dipenuhi oleh bank.</p>	<p>Secondary statutory reserve is minimum reserve that should be maintained by Bank in the form of Bank Indonesia Certificates (SBI), Government Debenture (SUN) and/or Excess Reserve, in certain percentage as determined by BI</p> <p>LDR Reserve is minimum deposit required to be maintained by the banks in the form of current accounts balance at Bank Indonesia for the percentage of Third Party Fund (TPF) which is calculated based on the difference of LDR held by bank and Target LDR which must be fulfilled by banks.</p>
<p>h. Penempatan pada Bank Lain</p> <p>Penempatan pada bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk deposito berjangka, <i>call money</i>, <i>deposit on call</i> dan lain-lain.</p>	<p>h. Placements with Other Banks</p> <p>Placement with other banks consist of time deposits, call money, deposit on call and others.</p>
<p>i. Kredit Yang Diberikan</p> <p>Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.</p> <p>Kredit yang diberikan dengan perjanjian sindikasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Perusahaan.</p>	<p>i. Loans</p> <p>Loans are provision of cash or receivables can be equivalent to cash based on agreements with borrowers, where borrowers required to repay their debts with interest after specify periods.</p> <p>Syndicated loans are stated at amortized cost in accordance with the risk borne by Company.</p>
<p>j. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</p> <p>Penilaian kualitas dan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan terhadap aset produktif.</p> <p><u>Aset Produktif</u></p> <p>Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, kredit yang diberikan, dan tagihan akseptasi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.</p>	<p>j. Allowance for Impairment Losses</p> <p>Quality assessment and allowance impairment losses are carried out on productive assets.</p> <p><u>Productive Assets</u></p> <p>Earning assets consist of demand deposits with other banks, placements with other banks, securities, loans, and acceptance receivables, according to Bank Indonesia regulation.</p>

Penerapan Ketentuan Transisi dari Bank Indonesia untuk Penurunan Nilai Secara Kolektif

Pada tanggal 8 Desember 2009, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Surat Edaran No. 11/33/DPNP yang mengatur mengenai estimasi penurunan nilai kolektif kredit yang diberikan dengan keterbatasan pengalaman kerugian spesifik. Bagi bank yang belum memiliki data kerugian historis yang memadai untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas kredit yang diberikan secara kolektif sesuai dengan persyaratan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006) dan PAPI, maka pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dapat menggunakan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum".

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan menerapkan ketentuan transisi dari BI tersebut.

Penentuan kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009. Perusahaan tetap mengacu pada peraturan tersebut untuk penghitungan cadangan kerugian penurunan nilai sejak 1 Januari 2010 sesuai penerapan ketentuan transisi yang dijelaskan di atas.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif

Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif berdasarkan penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset produktif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengklasifikasikan aset produktif tersebut dalam lima (5) kategori dengan besarnya persentase cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

Kategori	Persentase Minimum Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ <i>Minimum Percentage of Allowance for Impairment Losses</i>	<i>Category</i>
Lancar	1%	Current
Dalam perhatian khusus	5%	Special mention
Kurang lancar	15%	Substandard
Diragukan	50%	Doubtful
Macet	100%	Loss

Implementation of Transitional Provisions from Bank Indonesia for Collective Impairment Losses

On December 8, 2009, Bank Indonesia (BI) issued Circular Letter No. 11/33/DPNP regarding allowance for collective impairment losses on loans with limited experience of specific losses. For banks that do not have sufficient information on historical losses to determine the amount of collective impairment losses on loans as required by PSAK No. 55 (Revised 2006) and PAPI, the Bank Indonesia regulation regarding "Assessment of Asset Quality of Commercial Bank".

Starting January 1, 2010, the Company has applied the aforementioned transitional provision from BI.

The determination of the quality and allowance for impairment losses of earning assets is based on the Decree of Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005, Circular Letter of Bank Indonesia No. 7/3/DPNP dated January 31, 2005 regarding "Assessment of Asset Quality of Commercial Banks" with latest change through Decree of Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 dated January 29, 2009. The Company still refers to its rules for calculating allowance for impairment losses since January 1, 2010 according to the application of transitional provisions outlined above.

Allowance for Impairment Losses on Earning Assets

Allowance for impairment losses on productive assets is based on review of the quality of their productive assets in accordance with Bank Indonesia, which classifies these productive assets within five (5) categories, with the percentage of allowance for impairment losses as follows:

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai diatas diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah dikurangi nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan sebagai lancar yang diterapkan terhadap saldo aset produktif.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), penempatan pada Bank Indonesia (BI Intervensi) dan Obligasi Pemerintah tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Aset produktif dihapusbukukan dengan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif pada saat manajemen berpendapat bahwa aset produktif tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif yang bersangkutan pada saat diterima kembali. Jika jumlah yang diterima kembali lebih besar daripada nilai pokok, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.

k. Kontrak Jaminan Keuangan

Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mengharuskan penerbit untuk melakukan pembayaran kepada pemegang kontrak atas kerugian yang terjadi karena debitur tertentu gagal untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan dari instrumen utang. Jaminan keuangan tersebut diberikan kepada bank, lembaga keuangan dan badan-badan lainnya atas nama debitur untuk menjamin kredit dan fasilitas-fasilitas perbankan lainnya.

Pengakuan awal jaminan keuangan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai wajar pada saat jaminan diberikan. Nilai wajar jaminan keuangan pada saat berlakunya transaksi pada umumnya sama dengan premi yang diterima karena diberikan dengan syarat dan kondisi normal dan nilai wajar awal diamortisasi sepanjang umur jaminan keuangan.

Setelah pengakuan awal kontrak, jaminan keuangan dicatat pada nilai yang lebih tinggi antara biaya perolehan diamortisasi dengan nilai kini pembayaran yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan menjadi besar kemungkinan terjadinya), dan selisihnya dibebankan sebagai beban operasional lainnya pada laporan laba rugi komprehensif.

Percentages are applied to the outstanding balances of the productive assets, less the collateral value in accordance with the Bank Indonesia Regulation, except for earning assets classified as current where the rates are applied directly to the outstanding balance of earning assets.

Bank Indonesia Certificates (SBI), placements with Bank Indonesia (BI Intervention) and Government bonds are not subject to allowance for impairment losses.

The outstanding balance of earning assets are written-off against the respective allowance for impairment losses when management believes that the earning asset should be written-off because the debtor cannot afford to repay and/or the earning assets are difficult to be realized or collected. Recovery of earning assets previously written-off is recorded as an addition to the allowance for impairment losses on earning assets during the year of recovery. If the recovery exceeds the principal amount, the excess is recognized as income.

k. Financial Guarantee Contracts

Financial guarantee contracts are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss incurred because a specified debtor defaulted to make payments when due, in accordance with the terms of a debt instrument. Such financial guarantees are given to bank, financial institutions and other institutions on behalf of customers to secure loans and other banking facilities.

Financial guarantees are initially recognized in the financial statements at fair value on the date the guarantee was given. The fair value of a financial guarantee at inception is likely to equal the premium received because all guarantees are agreed on arm's length terms and the initial fair value is amortised over the life of the financial guarantees.

Subsequently, they are measured at the higher of amortised amount and the present value of any expected payment (when a payment under the guarantee has become probable) and the difference is charged to other operating expense in statement of comprehensive income.

I. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan, amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-belan yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Apabila beban-belan tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-belan tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap. Penyusutan dan amortisasi dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap atau jangka waktu sewa, yang mana lebih pendek (khusus untuk perbaikan aset yang disewa) sebagai berikut:

	Tahun/Year
Bangunan	20
Perbaikan aset yang disewa	10
Inventaris kantor	3
Kendaraan	5

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

I. Premises and Equipment

Premises and equipment, except for land, are carried at cost, excluding day-to-day servicing, less accumulated depreciation and amortization and any impairment in value. Land is not depreciated and is stated at cost less any impairment in value, if any.

The initial cost of premises and equipment consists of its purchase price, including non-refundable import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the premises and equipment to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the premises and equipment have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the premises and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of premises and equipment. Depreciation and amortization are computed on a straight-line basis over the premises and equipment's useful lives or term of the lease, whichever is shorter (for leasehold improvements), as follows:

Building
Leasehold improvements
Office equipment
Vehicles

The carrying values of premises and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya. Perubahan yang dilakukan merupakan perubahan estimasi dan diterapkan secara prospektif. Penyesuaian yang timbul diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Aset dalam konstruksi merupakan aset tetap dalam pembangunan yang dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai secara substansial dan siap digunakan sesuai tujuannya.

m. Transaksi Sewa

Penentuan apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of premises and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity.

When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and amortization and any impairment loss are eliminated from the accounts.

An item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising from derecognition of premises and equipment (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in the statement of comprehensive income in the year the item is derecognized.

The asset's residual values, useful lives and depreciation and amortization method are reviewed and adjusted, if appropriate, at each financial year end. The changes are treated as changes in estimates and accounted for on a prospective basis. Any adjustment is recognized in operations.

Construction in progress represents premises and equipment under construction which is stated at cost, and is not depreciated. The accumulated costs will be reclassified to the respective premises and equipment account when the construction is substantially complete and the asset is ready for its intended use.

m. Lease Transaction

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date of whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset.

Evaluasi ulang atas perjanjian sewa dilakukan setelah tanggal awal sewa hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. Terdapat perubahan dalam persyaratan perjanjian kontraktual, kecuali jika perubahan tersebut hanya memperbarui atau memperpanjang perjanjian yang ada;
- b. Opsi pembaruan dilakukan atau perpanjangan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, kecuali ketentuan pembaruan atau perpanjangan pada awalnya telah termasuk dalam masa sewa;
- c. Terdapat perubahan dalam penentuan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada suatu aset tertentu; atau
- d. Terdapat perubahan substansial atas aset yang disewa.

Apabila evaluasi ulang telah dilakukan, maka akuntansi sewa harus diterapkan atau dihentikan penerapannya pada tanggal dimana terjadi perubahan kondisi pada skenario a, c atau d dan pada tanggal pembaharuan atau perpanjangan sewa pada skenario b.

Sewa Operasi

Sewa dimana Perusahaan tetap mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui ke laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan selama masa sewa sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan sewa.

n. Agunan yang Diambil Alih

Tanah dan aset lainnya (agunan kredit yang telah diambil alih oleh Perusahaan) disajikan dalam perkiraan "Aset lain-lain".

A reassessment is made after inception of the lease only if one of the following applies:

- a. there is a change in contractual terms, other than a renewal or extension of the agreement;
- b. a renewal option is exercised or extension granted, unless the term of the renewal or extension was initially included in the lease term;
- c. there is a change in the determination of whether the fulfillment is dependent on a specified asset; or
- d. there are a substantial change to the asset.

Where a reassessment is made, lease accounting shall commence or cease from the date when the change in circumstances gave rise to the reassessment for scenarios a, c or d and the date of renewal or extension period for scenario b.

Operating Lease

Leases where the Company retains substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same bases as rental income.

n. Foreclosed Properties

Land and other assets (pledged as collateral and foreclosed by the Company) are presented under "Other assets" account.

<p>Agunan yang diambil alih dicatat pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan sisa pokok pinjaman yang diberikan, jika ada, dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.</p> <p>Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.</p> <p>Biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.</p> <p>Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.</p> <p>Lihat Catatan 2b perihal perubahan kebijakan akuntansi atas cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif pada tahun 2011.</p>	<p>Foreclosed properties are stated at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell. The difference between the value of the foreclosed properties and the outstanding loan principal, if any, is changed to the current year statement of comprehensive income.</p> <p>The difference between the carrying value of the foreclosed property and the proceeds from the sale of such property is recorded as a gain or loss in the year the property was sold.</p> <p>Expenses for maintaining foreclosed properties are charged to operations as incurred.</p> <p>The carrying amount of the property is written-down to recognize a permanent decline in value of the foreclosed property and any such write-down is charged to current operations.</p> <p>Refer to Note 2b concerning change in accounting policy on allowance for impairment of non-productive assets in 2011.</p>
<p>o. Biaya Dibayar Dimuka</p> <p>Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.</p>	<p>o. Prepaid Expenses</p> <p>Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.</p>
<p>p. Simpanan dan Simpanan dari Bank Lain</p> <p>Simpanan merupakan liabilitas kepada nasabah dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka.</p> <p>Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.</p>	<p>p. Deposits and Deposits from Other Bank</p> <p>Deposits are liabilities to customers in the form of demand deposits, savings deposits and time deposits.</p> <p>Demand deposits represent deposits from customers which may be used as instruments for payment, and which may be withdrawn at any time through checks, or other orders of payment or transfers.</p>

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat tertentu yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan. Penarikan atas tabungan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen sejenis, tetapi menggunakan formulir penarikan tersendiri yang hanya berlaku di bank yang bersangkutan dan/atau menggunakan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dengan nasabah pada saat penempatannya, dimana nasabah akan dikenakan penalti apabila melakukan penarikan sebelum tanggal jatuh temponya.

Simpanan dari bank lain merupakan liabilitas kepada bank lain dalam bentuk deposito berjangka, giro dan *interbank call money* kurang dari atau sampai dengan 90 hari.

q. Biaya Emisi Saham

Biaya emisi saham dikurangkan dari bagian tambahan modal disetor yang timbul dari penerbitan saham dan tidak diamortisasi.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan diakui secara akrual di dalam laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya transaksi yang terjadi dan dapat diatribusikan secara langsung terhadap perolehan atau penerbitan instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diamortisasi sepanjang umur instrumen keuangan menggunakan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi terkait aset keuangan, dan sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi terkait liabilitas keuangan.

Savings deposits represent deposits of customers which may only be withdrawn when certain agreed conditions at the account opening are met. They may not be withdrawn by checks or other equivalent instruments, except by using specific withdrawal slip which can only be validated at the depository bank and/or by using Automated Teller Machine (ATM) card.

Time deposits represent deposits of customers which may only be withdrawn after a certain period of time in accordance with the agreement with the customers at the time of placement, or the customers will be fined or penalized if withdrawals are made before maturity.

Deposits from other banks are liabilities to other banks in the form of time deposits, demand deposits and interbank call money less or until 90 days.

q. Share Issuance Costs

Share issuance costs are deducted from the additional paid-in capital resulting from the issuance of shares and are not amortized.

r. Recognition of Interest Revenues and Expenses

Interest income and expense for all financial instruments are recognized in the statement of comprehensive income using the effective interest method.

Transaction costs that occur and are directly attributable to the acquisition or issuance of financial instruments not measured at fair value through profit and loss are amortized over the life of financial instruments using the effective interest rate method and recorded as part of interest income for financial assets directly attributable transaction costs, and as part of interest expense related to transaction costs of financial obligations.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta tersedia untuk dijual telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelah penurunan nilai diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi

Provisi dan Komisi Terkait Instrumen Keuangan

Pendapatan dan beban provisi komisi yang terkait dengan perolehan instrumen keuangan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman diberikan dan piutang, serta tersedia untuk dijual, atau terkait jangka waktu tertentu yang jumlahnya signifikan, dicatat sebagai bagian dari nilai wajar aset atau liabilitas keuangan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktunya dengan menggunakan suku bunga efektif. Sedangkan, pendapatan dan beban provisi dan komisi yang jumlahnya tidak signifikan langsung diakui sebagai pendapatan pada saat penerimaan atau beban pada saat pembayarannya.

Provisi dan Komisi Lainnya

Provisi dan komisi lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan perolehan instrumen keuangan dan jangka waktu tertentu yang jumlahnya signifikan, diperlakukan sebagai pendapatan atau beban yang ditangguhkan dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu transaksi yang bersangkutan. Sedangkan, pendapatan dan beban provisi dan komisi lainnya yang tidak signifikan langsung diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi lainnya, meliputi pendapatan yang tidak terkait dengan kredit, seperti pendapatan terkait dengan ekspor impor dan bank garansi, diakui sebagai pendapatan pada saat jasa diserahkan.

Once a financial asset and a group of similar financial assets in categories held-to-maturity, loan and receivables, and available-for-sale has been written-down as a result of impairment losses, interest income is recognized using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment losses.

s. Recognition of Revenues and Expenses on Commissions and Fees

Fees and Commissions Related to Financial Instruments

Commission income and expense fees associated with the acquisition of financial instruments categorized as held to maturity, loans granted and receivables, and available for sale, or related to a period of time that the amount is significant, recorded as part of the fair value of assets or financial liability and amortized over the time period using the effective interest rate method. Meanwhile, revenue and expense fees and commissions receipt that are insignificant in amounts are recognized as revenue or at the time of receipt or payment.

Other Fees and Commission

Fees and commissions that are not related to the acquisition of financial instruments and certain period of time that the amount is significant, are treated as income or expenses are deferred and amortized using the straight-line method over the term of the relevant transaction. Meanwhile, revenue and expense fees and commissions that are not significantly recognized immediately as income or expenses on the transaction.

Other fees and commissions, which do not include revenues related to credit, such as revenue related to import and export bank guarantee, are recognized as revenue when the services are rendered

t. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang secara signifikan independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif sebagai "Rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menghitung nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar kini juga diperhitungkan, jika tersedia.

Jika transaksi pasar kini tidak tersedia, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini harus didukung oleh metode penilaian tertentu (*valuation multiples*) atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

t. Impairment of Non Financial Assets

The Company assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Units (CGU) fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the statements of comprehensive income as "impairment losses". In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available.

If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses, if any, are recognized in the statements of comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya dipulihkan hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pemulihan tersebut dibatasi sehingga nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

u. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat tarif dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak tarif dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the statements of comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

u. Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to the differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and carryforward tax benefit of unused fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and carryforward tax benefit of unused fiscal losses can be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at statement of financial position date. Deferred tax is charged to or credited in the statements of comprehensive income, except when it relates to items charged to or credited directly in equity, in which case the deferred tax is also charged to or credited directly in equity.

<p>Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.</p> <p>Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika banding diajukan oleh Perusahaan, ketika hasil banding telah ditentukan.</p> <p>v. Laba per Saham</p> <p>Laba per saham dasar dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.</p> <p>w. Imbalan Kerja</p> <p><i>Imbalan kerja jangka pendek</i></p> <p>Imbalan kerja jangka pendek merupakan upah, gaji, dan iuran jaminan sosial. Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-diskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar, dan sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.</p> <p><i>Imbalan pasca-kerja</i></p> <p>Imbalan pasca-kerja merupakan manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini cadangan imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait dan beban jasa lalu adalah metode <i>Projected Unit Credit</i>. Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan dan keuntungan atau kerugian aktuarial diamortisasi selama jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan.</p>	<p>Deferred tax assets and liabilities are offset in the statement of financial position in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.</p> <p>Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Company, when the result of the appeal has determined.</p> <p>v. Earnings per Share</p> <p>Basic earnings per share are computed based on the weighted average number of shares outstanding during the year.</p> <p>w. Employee Benefits</p> <p><i>Short-term employee benefits</i></p> <p>Short-term employee benefits are in the form of wages, salaries, bonuses and social security (Jamsostek) contribution. Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability, after deducting any amount already paid, in the statement of financial position, and as an expense in the statements of comprehensive income.</p> <p><i>Post-employment benefits</i></p> <p>Post-employment benefits are unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension. The actuarial valuation method used to determine the present value of defined-benefit reserve, related current service costs and past service costs is the Projected Unit Credit. Current service costs, interest costs, past service costs which are already vested, and effects of curtailments and settlements (if any) are charged directly to current operations. Past service costs which are not yet vested and actuarial gains or losses for working (active) employees are amortized during the employees' average remaining years of service, until the benefits become vested.</p>
---	---

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya merupakan cuti berimbalan jangka panjang. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini cadangan imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*. Beban jasa kini, beban bunga, hasil yang diharapkan dari aset program (jika ada), keuntungan atau kerugian aktuarial, beban jasa lalu serta dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Cadangan imbalan kerja jangka panjang lainnya disajikan bersih sebesar nilai kini cadangan imbalan pasti setelah memperhitungkan nilai wajar aset program (jika ada).

x. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Efektif 1 Januari 2011, PSAK No. 5 (Revisi 2009) mensyaratkan identifikasi segmen operasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Perusahaan yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Perusahaan. Sebaliknya, standar terdahulu mengharuskan Perusahaan untuk mengidentifikasi dua jenis segmen (usaha dan geografis), menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) Yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

Other long-term post-employment benefits

Other long-term post-employment benefits consists of long-term paid leave. The actuarial valuation method used to determine the present value of defined-benefit reserve, related current service costs and past service costs is the *Projected Unit Credit*. Current service costs, interest costs, expected return on plan assets (if any), past service costs and effects of curtailments and settlements (if any) are charged directly to current operations.

Other long-term post-employment benefits reserve is presented at the present value of defined-benefit obligations net of fair value of plan assets (if any).

x. Segment Information

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the financial statements.

Effective January 1, 2011, PSAK No. 5 (Revised 2009) requires operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances. In contrast, the predecessor standard required the Company to identify two sets of segments (business and geographical), using a risks and returns approach.

An operating segment is a component of an entity:

- a) That engages in business activities which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);

b) Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c) Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan alokasi sumber daya dan penilaian kinerjanya lebih difokuskan pada kategori masing-masing produk, yang mana serupa dengan segmen usaha yang dilaporkan pada periode-periode terdahulu.

y. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Perusahaan harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut. Ketika provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatat provisi adalah nilai kini arus kas tersebut.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima dan jumlah penggantian dapat diukur dengan andal.

z. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Kejadian-kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

b) Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and

c) For which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resources allocation and assessment of its performance is more specifically focused on the category of each product, which is similar to the business segment information reported in the prior period.

y. Provisions

Provisions are recognized when the Company has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, the receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

z. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Company's financial position at the date of the statement of financial position (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana yang diuraikan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, manajemen diharuskan untuk membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut didasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2f.

b. Aset Keuangan yang Tidak Memiliki Kuotasi Harga di Pasar yang Aktif

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset tersebut memiliki atau tidak memiliki kuotasi harga di pasar yang aktif. Evaluasi tersebut juga mencakup apakah kuotasi harga suatu aset keuangan di pasar yang aktif, merupakan kuotasi harga yang tersedia secara reguler, dan kuotasi harga tersebut mencerminkan transaksi di pasar yang aktual dan terjadi secara reguler dalam suatu transaksi wajar.

3. Management Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the Company accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, managements is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made that affected certain reported amounts of and disclosures in the financial statements:

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2006). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2f.

b. Financial Assets Not Quoted in Active Market

The Company classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukkan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat investasi dimiliki hingga jatuh tempo serta pinjaman diberikan dan piutang Perusahaan tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 diungkapkan sebagai berikut:

	2011	2010	
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Value</i> Rp '000.000	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Value</i> Rp '000.000	
<i>Dimiliki hingga jatuh tempo</i>			<i>Held to maturity</i>
Obligasi korporasi	1.375	1.375	Corporate bond
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>			<i>Loans and receivables</i>
Giro pada bank lain	60.096	161.835	Demand deposits with other banks
Penempatan pada bank lain	-	435.000	Placements with other banks
Kredit yang diberikan	4.555.043	2.905.446	Loans
Tagihan akseptasi	1.456	3.278	Acceptances receivable
Pendapatan bunga yang masih harus diterima	16.876	10.800	Interest receivable
Aset lain-lain	2.661	7.149	Other assets
Jumlah	4.637.507	3.524.883	Total

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

Allowance for impairment losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible financial assets. The Company assesses specifically at each statements of financial position date whether there is objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Provision for decline in value is provided on accounts specifically identified as impaired. Written off loans and receivables are based on management's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be realized in whatsoever actions have been taken. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of provision for decline in value recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

The carrying value of the Company held to maturity investments and loans and receivables as of December 31, 2011 and 2010 are as follows:.

d. Komitmen Sewa Operasi

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan. Perusahaan menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena Perusahaan tidak menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian di masa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun buku selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 30.

d. Operating Lease Commitments

The Company has entered into various lease agreements for commercial spaces. The Company has determined that it is an operating lease since the Company does not bear substantially all the significant risks and rewards of ownership of the related assets.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur:

a. Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on objective evidence derived from diversification (i.e. foreign exchange, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in Note 30.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat masing-masing aset tetap Perusahaan diestimasi sepanjang masa aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut berdasarkan penelaahan kolektif atas usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat masing-masing aset ditinjau secara berkala dan diperbarui jika diperkirakan berbeda dari estimasi sebelumnya karena batas pakai, usang baik secara teknis atau komersial, dan pembatasan hukum atau lainnya atas penggunaan aset. Hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruhi oleh perubahan dalam jumlah dan waktu pencatatan beban yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut. Penurunan estimasi masa manfaat aset tetap akan meningkatkan beban penyusutan dan menurunkan nilai tercatat aset tetap.

Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan. Estimasi masa manfaat aset tetap dan nilai tercatat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2I dan 11.

c. Imbalan Pasti Pasca Kerja

Penentuan cadangan dan manfaat pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas dan imbalan tersebut. Asumsi yang digunakan diungkapkan dalam Catatan 31 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi sepanjang masa kerja dan umumnya mempengaruhi beban yang diakui dan liabilitas yang dicatat pada tahun mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah cadangan imbalan pasti pasca-kerja.

b. Estimated Useful Lives of Property and Equipment

The useful lives of each of the item of the Company property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of investment properties, premises and equipment, property under build, operate and transfer agreement and assets for lease would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

There is no change in the estimated useful lives of investment properties, premises and equipment, property under build, operate and transfer agreement and assets for lease during the year. The estimated lives and carrying value of premises and equipment are set out in Notes 2I and 11.

c. Post-employment Benefits

The determination of the obligation and post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions and include, among others, discount rate and rate of salary increase and the balance of outstanding defined benefit obligation are described in Note 31. Actual results that differ from the Company's assumptions are accumulated and amortized over future years and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future years. While it is believed that the Company's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of defined benefit post-employment reserve.

Nilai tercatat cadangan imbalan pasti pasca-kerja diungkapkan pada Catatan 31.

The carrying value of Defined-benefit post-employment reserve set out in Note 31.

d. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 25.

e. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

Nilai tercatat aset non-keuangan berupa aset tetap dan aset lain-lain (agunan yang diambil alih dan aset tetap yang tidak digunakan) diungkapkan pada Catatan 11 dan 12.

d. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Deferred tax assets are disclosed in Note 25.

e. Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying value of these assets in form of premises and equipment, and other assets (foreclosed assets and abandoned properties) are set out in Notes 11 and 12.

4. Giro pada Bank Indonesia

	2011 Rp '000.000
Rupiah	370.836
Mata uang asing (Catatan 29)	39.897
Jumlah	<u>410.733</u>

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI), setiap bank di Indonesia diwajibkan memiliki saldo giro minimum di BI untuk cadangan likuiditas sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing.

4. Demand Deposits with Bank Indonesia

	2010 Rp '000.000	
Rupiah	288.623	Rupiah
Foreign currency (Note 29)	3.604	Foreign currency (Note 29)
Total Net	<u>292.227</u>	Total Net

According to the regulation of Bank Indonesia, (BI), each bank in Indonesia is required to maintain a minimum liquidity reserve of a certain percentage of Third Party Funds (TPF) both in Rupiah and foreign currency.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, GWM Perusahaan dalam mata uang Rupiah untuk GWM Utama adalah masing-masing sebesar Rp 138.450 juta dan Rp 239.117 juta, untuk GWM Sekunder masing-masing adalah sebesar Rp 115.375 juta dan Rp 74.724 juta, sedangkan untuk GWM mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 4.197 juta dan Rp 344 juta.

As of December 31, 2011 and 2010, the balances of the Company's minimum liquidity reserve in Rupiah for Primary reserve amounted to Rp 138,450 million and Rp 239,117 million, respectively, and for Secondary reserve amounted to Rp 115,375 million and Rp 74,724 million, respectively, while as of December 31, 2011 and 2010, the balances of the Company's minimum liquidity reserve in foreign currency amounted to Rp 4,197 million and Rp 344 million, respectively.

5. Giro pada Bank Lain

5. Demand Deposits with Other Banks

	2011	2010	
	Rp '000.000	Rp '000.000	
Rupiah			Rupiah
Pihak ketiga	8.316	7.311	Third parties
Mata uang asing (Catatan 29)			Foreign currencies (Note 29)
Pihak ketiga	51.780	154.524	Third parties
Jumlah	<u>60.096</u>	<u>161.835</u>	Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses on demand deposits with other banks are as follows:

	2011			2010			
	Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Jumlah/ Total	Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Jumlah/ Total	
	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	
Saldo awal	-	-	-	-	890	890	Beginning balance
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 2f)	-	-	-	-	(890)	(890)	Adjustment resulting from adoption of PSAK No. 55 (Revised 2006) (Note 2f)
Penambahan	-	-	-	-	-	-	Addition
Selisih kurs penjabaran	-	-	-	-	-	-	Exchange rate difference
Saldo akhir	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Ending balance

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, berdasarkan review dan penilaian manajemen, tidak terdapat giro pada bank lain yang mengalami penurunan nilai.

As of December 31, 2011 and 2010, based on management review and assessment, there is no impairment in value of these demand deposits with other banks.

6. Penempatan pada Bank Lain

	2011	2010
	Rp '000.000	Rp '000.000
Rupiah		
Citibank N.A	-	50.000
PT Bank DBS Indonesia	-	50.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	50.000
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD	-	50.000
PT Bank Commonwealth	-	35.000
PT Bank Mayapada International Tbk	-	35.000
PT Bank Bukopin Tbk	-	30.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	30.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	30.000
PT Bank UOB Buana	-	30.000
PT Bank Mega Tbk	-	20.000
PT Bank Rabobank Internasional Indonesia	-	15.000
PT Bank Agris	-	10.000
Jumlah	<u>-</u>	<u>435.000</u>

6. Placements with Other Banks

	2010
	Rp '000.000
Rupiah	
Citibank N.A	50.000
PT Bank DBS Indonesia	50.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	50.000
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD	50.000
PT Bank Commonwealth	35.000
PT Bank Mayapada International Tbk	35.000
PT Bank Bukopin Tbk	30.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	30.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	30.000
PT Bank UOB Buana	30.000
PT Bank Mega Tbk	20.000
PT Bank Rabobank Internasional Indonesia	15.000
PT Bank Agris	10.000

Pada tanggal 31 Desember 2010 seluruh penempatan pada bank lain merupakan penempatan dalam bentuk call money dengan jangka waktu berkisar antara 2-5 hari.

As of December 31, 2010, all placements with other banks represent call money with terms ranging from 2-5 days.

Suku bunga untuk penempatan pada bank lain pada tahun 2010 adalah berkisar antara 5,57% - 6,10%.

The average interest rates for placements with other banks in 2010 ranging from 5.57% - 6.10%.

Pada tanggal 31 Desember 2010, berdasarkan review dan penilaian manajemen, tidak terdapat penempatan pada bank lain yang mengalami penurunan nilai.

As of December 31, 2010, based on management review and assessment, there is no impairment in value of these placements with other banks.

7. Efek-efek

	2011	2010
	Rp '000.000	Rp '000.000
Rupiah		
Pihak ketiga		
Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		
Obligasi Korporasi	106.107	91.826
Obligasi Pemerintah	15.562	-
Bank Indonesia Intervensi	770.400	-
Pendapatan diterima di muka	(147)	-
Nilai bersih	<u>770.253</u>	<u>-</u>
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	255.000	200.000
Pendapatan diterima di muka	(5.569)	(3.890)
Nilai bersih	<u>249.431</u>	<u>196.110</u>
Jumlah - Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	<u>1.141.353</u>	<u>287.936</u>
Investasi dimiliki hingga jatuh tempo		
Obligasi korporasi	1.375	1.375
Jumlah	<u>1.142.728</u>	<u>289.311</u>

7. Securities

	2010
	Rp '000.000
Rupiah	
Third parties	
Financial asset at fair value through profit and loss	
Corporate bonds	91.826
Government bond	-
Bank Indonesia Intervension	-
Unearned income	-
Net	<u>-</u>
Certificates of Bank Indonesia (SBI)	200.000
Unearned income	(3.890)
Net	<u>196.110</u>
Total - Financial asset at fair value through profit and loss	<u>287.936</u>
Held-to-maturity investment	
Corporate bonds	1.375
Total	<u>289.311</u>

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk
Notes to Financial Statements
December 31, 2011 and 2010
and for the Years then Ended

Suku bunga per tahun:

Interest rates per annum are as follows:

	2011	2010	
Rupiah			Rupiah
SBI	5,00% - 7,40%	6,70% - 6,80%	SBI
Obligasi	10,00% - 12,50%	10,85% - 12,85%	Bonds
Bank Indonesia Intervensi	4,50% - 4,54%	-	Bank Indonesia Intervension

Rincian efek-efek berdasarkan penerbitnya adalah sebagai berikut:

The details of securities based on its issuers are as follows:

	2011	2010	
	Rp '000.000	Rp '000.000	
Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi			Financial asset at fair value through profit and loss
Pihak ketiga - Rupiah			Third parties - Rupiah
Obligasi Korporasi			Corporate bonds
PT Bank Victoria International Tbk	31.346	31.233	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	22.671	-	PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	15.780	7.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mega Tbk	15.151	4.993	PT Bank Mega Tbk
PT Panin Sekuritas	12.000	12.000	PT Panin Sekuritas
PT Duta Pertiwi Tbk	5.100	5.000	PT Duta Pertiwi Tbk
PT Bank Mayapada International Tbk	2.009	2.009	PT Bank Mayapada International Tbk
PT Bank Permata Tbk	1.050	26.541	PT Bank Permata Tbk
PT Bank DKI	1.000	1.000	PT Bank DKI
PT BCA Finance	-	2.050	PT BCA Finance
Obligasi Pemerintah			Government bonds
ORI 008	15.562	-	ORI 008
Jumlah	<u>121.669</u>	<u>91.826</u>	Total
Bank Indonesia	<u>1.019.684</u>	<u>196.110</u>	Bank Indonesia
Jumlah - Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	<u>1.141.353</u>	<u>287.936</u>	Total - Financial asset at fair value through profit and loss
Investasi dimiliki hingga jatuh tempo			Held-to-maturity instruments
Pihak ketiga - Rupiah			Third party - Rupiah
Obligasi korporasi			Corporate bonds
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.375	1.375	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Jumlah	<u>1.142.728</u>	<u>289.311</u>	Total

Peringkat obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), Moody's Investor Services, Inc., dan Fitch, Inc. seperti yang diumumkan oleh Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

As published by the Indonesia Stock Exchange, the Company's investment in bonds were rated by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) Moody's Investor Services, Inc., and Fitch, Inc, Ratings Indonesia as follows:

	2011	2010	
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	idAA	idAA	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Duta Pertiwi Tbk	id BBB	id BBB	PT Duta Pertiwi Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	idAA	-	PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank DKI	id A	id A-	PT Bank DKI
PT Bank Permata Tbk	id AA-	id A	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	BBB+ (idn)	BBB/BBB+ (idn)	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Mega Tbk	A (idn)	A+ (idn)	PT Bank Mega Tbk
PT Panin Sekuritas Tbk	A (idn)	A (idn)	PT Panin Sekuritas Tbk
PT Bank Mayapada International Tbk	A- (idn)	A- (idn)	PT Bank Mayapada International Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	AA (idn)	AA (idn)	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT BCA Finance	-	id AA-	PT BCA Finance

Efek-efek (yang dimiliki hingga jatuh tempo) diklasifikasikan berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The details of securities (held-to-maturity) classified based on its maturity are as follows:

	2011 dan/and 2010			Jumlah/ Total	
	Sampai dengan 1 tahun/ 1 year or less	Lebih dari 1-5 tahun/ More than 1 year until 5 years	Lebih dari 5 tahun / More than 5 years		
Investasi dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi korporasi	-	705	670	1.375	Held-to-maturity investments Corporate bond
Jumlah	-	705	670	1.375	Total

Pada tahun 2010, Perusahaan menjual investasi dalam Obligasi Pemerintah yang di kategorikan "Tersedia untuk Dijual" dan mentransfer kategori investasi tersebut menjadi "Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi" sebelum penjualan dilakukan. Nilai nominal dan nilai wajar pada saat transfer masing-masing sebesar Rp 265.000 juta dan Rp 297.376 juta. Laba yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar efek-efek di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan langsung diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

In 2010, the Company has sold its investment in Government Bonds which was classified as "Available for Sale" and was transferred to "Trading" category prior to sale. These investments have nominal value and fair value at the time of transfer amounting to Rp 265,000 million and Rp 297,376 million. The unrealized gain on change in market value in equity section of the statement of financial position was recognized in the statement of comprehensive income.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses on securities are as follows:

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Saldo awal	-	1.772	Beginning balance
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 2f)	-	(1.772)	Adjustment resulting from adoption of PSAK No. 55 (Revised 2006) (Note 2f)
Penambahan	-	-	Addition
Saldo akhir	-	-	Ending balance

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, berdasarkan review dan penilaian manajemen, tidak terdapat efek-efek yang mengalami penurunan nilai.

As of December 31, 2011 and 2010, based on management review and assessment, there is no impairment loss on securities.

8. Kredit yang Diberikan

8. Loans

a. Jenis Kredit

a. By Type of Loans

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Pihak berelasi (Catatan 27)			Related parties (Note 27)
Rupiah			Rupiah
Pinjaman modal kerja	16.200	20.906	Working capital loans
Pinjaman rekening koran	6.965	7.443	Demand loans
Pinjaman karyawan	6.725	4.476	Employee loans
Kredit investasi	2.950	-	Investment loans
Pinjaman konsumsi	1.169	413	Consumer loans
Pinjaman kepemilikan rumah	994	2.499	Housing loans
Pinjaman kepemilikan kendaraan bermotor	-	176	Vehicle loans
Pinjaman multiguna	-	16	Multi-purpose loans
Jumlah	35.003	35.929	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(203)	(144)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Pihak berelasi	34.800	35.785	Total - Related parties

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk
Notes to Financial Statements
December 31, 2011 and 2010
and for the Years then Ended

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Pinjaman modal kerja	1.934.229	1.403.397	Working capital loans
Kredit investasi	1.002.878	486.276	Investment loans
Pinjaman rekening koran	761.227	534.852	Demand loans
Pinjaman kepemilikan rumah	272.795	138.674	Housing loans
Pinjaman konsumsi	118.578	15.287	Consumer loans
Pinjaman kepemilikan kendaraan bermotor	88.766	56.374	Vehicle loans
Pinjaman channelling	23.155	44.021	Chanelling loans
Pinjaman karyawan	18.705	14.899	Employee loans
Pinjaman multiguna	35.287	14.718	Multi-purpose loans
Jumlah - Rupiah	<u>4.255.620</u>	<u>2.708.498</u>	Subtotal - Rupiah
Mata uang asing (Catatan 29)			Foreign currencies (Note 29)
Pinjaman modal kerja	290.495	175.721	Working capital loans
Pinjaman konsumsi	1.801	-	Consumer loans
Kredit investasi	44.014	41.955	Investment loans
Jumlah - Mata uang asing	<u>336.310</u>	<u>217.676</u>	Subtotal - Foreign currencies
Jumlah	4.591.930	2.926.174	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(71.687)	(56.513)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Pihak ketiga	<u>4.520.243</u>	<u>2.869.661</u>	Total - Third parties
Jumlah - Bersih	<u>4.555.043</u>	<u>2.905.446</u>	Net

b. Sektor Ekonomi

b. By Economic Sector

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Rupiah			Rupiah
Pertanian, perburuan dan kehutanan	12.269	37.099	Agriculture, hunting and forestry
Perikanan	2.438	2.569	Fishing
Pertambangan dan penggalian	249.805	124.006	Mining and excavation
Industri pengolahan	431.526	306.359	Manufacturing
Listrik, gas dan air	21.334	8.214	Electricity, gas and water
Konstruksi	241.844	100.177	Construction
Perdagangan besar dan eceran	766.255	535.672	Wholesale and retail
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	332.872	187.812	Accommodation, food and beverages
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	842.928	536.739	Transportation, warehousing and communication
Perantara keuangan	273.270	237.963	Financial Intermediary
Real estat, usaha persewaan dan jasa perusahaan	294.387	304.224	Real estate, leasing and services
Jasa pendidikan	23.837	20.648	Education services
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	11.873	7.277	Health and social services
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	187.686	50.094	Social, art, culture and recreation and other services
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	215	734	Household services
Lain-lain	598.084	284.840	Others
Jumlah	<u>4.290.623</u>	<u>2.744.427</u>	Subtotal

	2011	2010	
	Rp '000.000	Rp '000.000	
Mata uang asing (Catatan 29)			Foreign currencies (Note 29)
Perikanan	996	-	Fishing
Pertambangan dan penggalian	43.978	55.334	Mining and excavation
Industri pengolahan	873	40.545	Manufacturing
Konstruksi	9.486	-	Construction
Perdagangan besar dan eceran	24.251	14.517	Wholesale and retail
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	78.962	97.835	Transportation, warehousing and communication
Real estat, usaha persewaan dan jasa perusahaan	23.095	9.445	Real estate, leasing and services
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	18.993	-	Social, art, culture and recreation and other services
Lain-lain	135.676	-	Others
Jumlah	<u>336.310</u>	<u>217.676</u>	Subtotal
Jumlah	4.626.933	2.962.103	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(71.890)</u>	<u>(56.657)</u>	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	<u><u>4.555.043</u></u>	<u><u>2.905.446</u></u>	Net

c. Jangka Waktu

Jangka waktu kredit diklasifikasikan berdasarkan periode kredit sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit dan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Periode Perjanjian Kredit

	2011	2010	
	Rp '000.000	Rp '000.000	
Rupiah			Rupiah
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	1.535.060	1.153.712	1 year or less
Lebih dari 1 sampai 2 tahun	395.026	129.881	More than 1 year until 2 years
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	844.365	614.874	More than 2 years until 5 years
Lebih dari 5 tahun	<u>1.516.172</u>	<u>845.960</u>	More than 5 years
Jumlah	<u>4.290.623</u>	<u>2.744.427</u>	Subtotal
Mata uang asing (Catatan 29)			Foreign currencies (Note 29)
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	135.891	108.520	1 year or less
Lebih dari 1 sampai 2 tahun	70.983	-	More than 1 year until 2 years
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	66.174	97.835	More than 2 years until 5 years
Lebih dari 5 tahun	<u>63.262</u>	<u>11.321</u>	More than 5 years
Jumlah	<u>336.310</u>	<u>217.676</u>	Subtotal
Jumlah	4.626.933	2.962.103	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(71.890)</u>	<u>(56.657)</u>	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	<u><u>4.555.043</u></u>	<u><u>2.905.446</u></u>	Net

c. By Maturity

Classifications of loans by maturity based on the term of the loans as stated in the loan agreements and the remaining period until its maturity are as follows:

Based on the Credit Period

Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

Based on Remaining Period Until Maturity

	2011	2010	
	Rp '000.000	Rp '000.000	
Rupiah			Rupiah
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	1.911.881	1.254.283	1 year or less
Lebih dari 1 sampai 2 tahun	210.709	213.794	More than 1 year until 2 years
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	1.229.439	797.508	More than 2 years until 5 years
Lebih dari 5 tahun	<u>938.594</u>	<u>478.842</u>	More than 5 years
Jumlah	<u>4.290.623</u>	<u>2.744.427</u>	Subtotal
Mata uang asing (Catatan 29)			Foreign currencies (Note 29)
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	207.919	108.520	1 year or less
Lebih dari 1 sampai 2 tahun	36.047	8.676	More than 1 year until 2 years
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	74.636	98.604	More than 2 years until 5 years
Lebih dari 5 tahun	<u>17.708</u>	<u>1.876</u>	More than 5 years
Jumlah	<u>336.310</u>	<u>217.676</u>	Subtotal
Jumlah	4.626.933	2.962.103	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(71.890)</u>	<u>(56.657)</u>	Allowance for impairment losses
Jumlah Kredit - Bersih	<u>4.555.043</u>	<u>2.905.446</u>	Net

- d. Pada tahun 2011 dan 2010, suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit dalam mata uang Rupiah adalah masing-masing sebesar 14% dan 13%, sedangkan suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit dalam mata uang asing adalah masing-masing sebesar 6%.
- e. Kredit yang diberikan kepada karyawan terdiri dari kredit dengan bunga untuk membeli rumah, kendaraan bermotor dan keperluan pribadi lainnya, dengan suku bunga per tahun sebesar 6,00% - 10,00% untuk tahun 2011 dan 2010. Kredit ini berjangka waktu antara 1 sampai dengan 20 tahun dan dilunasi melalui pemotongan gaji karyawan setiap bulan.
- f. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, saldo kredit yang direstrukturisasi Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp 151.322 juta dan Rp 108.778 juta dengan cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing adalah sebesar Rp 10.899 juta dan Rp 5.926 juta. Seluruh restrukturisasi kredit dilakukan melalui penambahan jangka waktu.
- d. The average interest rates per annum are 14% and 13% in 2011 and 2010 for loans denominated in Rupiah, respectively, and 6% in 2011 and 2010 for loans denominated in foreign currencies.
- e. Loans to employees consist of loans with annual interest ranging from 6.00% to 10.00% in 2011 and 2010 which are intended for acquisition of houses and other personal properties of the employees. These loans will mature within 1 to 20 years and are collected through monthly payroll deductions.
- f. As of December 31, 2011 and 2010, the Company has restructured loans totaling to Rp 151,322 million and Rp 108,778 million, respectively, with allowance for impairment losses of Rp 10,899 million and Rp 5,926 million, respectively. All restructured loans were modified through extension of loan maturity-period.

g. Berikut ini adalah saldo kredit berdasarkan kolektibilitas:

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Lancar			Current
Rupiah	4.091.498	2.657.597	Rupiah
Mata uang asing	<u>335.565</u>	<u>216.490</u>	Foreign currencies
Jumlah	<u>4.427.063</u>	<u>2.874.087</u>	Subtotal
Dalam perhatian khusus			Special mention
Rupiah	52.599	25.410	Rupiah
Mata uang asing	<u>745</u>	<u>1.186</u>	Foreign currency
Jumlah	<u>53.344</u>	<u>26.596</u>	Subtotal
Kurang lancar			Substandard
Rupiah	<u>9.123</u>	<u>29.087</u>	Rupiah
Diragukan			Doubtful
Rupiah	<u>71.567</u>	<u>2.634</u>	Rupiah
Macet			Loss
Rupiah	<u>65.836</u>	<u>29.699</u>	Rupiah
Jumlah	<u><u>4.626.933</u></u>	<u><u>2.962.103</u></u>	Total

g. The collectibility of loans are classified as follows:

h. Rincian kredit bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Rupiah			Rupiah
Pertanian, perburuan dan kehutanan	77	-	Agriculture, hunting and forestry
Pertambangan dan penggalian	48.849	4.743	Mining and excavation
Industri pengolahan	17.709	143	Manufacturing
Kontruksi	1.136	9.577	Construction
Perdagangan besar dan eceran	12.732	7.835	Wholesale and retail
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1.186	-	Accomodation and food and beverages
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	27.246	15.751	Transportation, warehousing and communication
Perantara keuangan	-	12.500	Financial intermediary
Real estat, usaha persewaan dan jasa perusahaan	5.285	3.292	Real estate, leasing and service company
Jasa pendidikan	592	-	Educational services
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	1.532	205	Social, art, culture and recreation and other services
Lain - lain	<u>30.182</u>	<u>7.374</u>	Others
Jumlah	146.526	61.420	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(33.164)</u>	<u>(28.513)</u>	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	<u><u>113.362</u></u>	<u><u>32.907</u></u>	Net

h. The details of nonperforming loans based on economic sector, are as follows:

Seluruh kredit bermasalah tersebut sedang dalam proses penyelamatan.

All of these nonperforming loans are in the process of recovery.

- i. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit adalah sebagai berikut:

	2011			2010			
	Rupiah/ Rupiah Rp '000.000	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies Rp '000.000	Jumlah/ Total Rp '000.000	Rupiah/ Rupiah Rp '000.000	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies Rp '000.000	Jumlah/ Total Rp '000.000	
Saldo awal							Beginning balance
Individual	16.628	-	16.628	14.457	-	14.457	Individual
Kolektif	38.205	1.824	40.029	16.400	2.629	19.029	Collective
Penambahan (pemulihan)							Addition (reversal)
Individual	6.874	-	6.874	2.171	-	2.171	Individual
Kolektif	7.588	900	8.488	25.212	(591)	24.621	Collective
Penghapusbukuan	(73)	-	(73)	(3.407)	-	(3.407)	Write off
Selisih kurs penjabaran	-	(56)	(56)	-	(214)	(214)	Exchange rate difference
Saldo akhir	<u>69.222</u>	<u>2.668</u>	<u>71.890</u>	<u>54.833</u>	<u>1.824</u>	<u>56.657</u>	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit.

Management believes that the allowance for impairment losses on loans is adequate to cover the losses that might arise from uncollectible loans.

- j. Mutasi kredit yang dihapusbukukan adalah sebagai berikut :

	2011	2010	
	Rp '000.000	Rp '000.000	
Saldo awal	18.032	18.794	Beginning balance
Penambahan	73	3.407	Addition
Hapus hak tagih	-	(3.399)	Write-offs
Selisih kurs penjabaran	<u>115</u>	<u>(770)</u>	Exchange rate difference
Saldo akhir	<u><u>18.220</u></u>	<u><u>18.032</u></u>	Ending balance

- j. The changes in loans written-off are as follows:

9. Tagihan Akseptasi dan Liabilitas Akseptasi

- a. Tagihan Akseptasi

	2011	2010	
	Rp '000.000	Rp '000.000	
Mata uang asing (Catatan 29)			Foreign currencies (Note 29)
Pihak ketiga	1.456	3.278	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>-</u>	<u>-</u>	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	<u><u>1.456</u></u>	<u><u>3.278</u></u>	Total - Net

9. Acceptances Receivable and Payable

- a. Acceptances Receivable

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses on acceptances receivable are as follows:

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Saldo awal	-	105	Beginning balance
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 2b)	-	(105)	Adjustment resulting from adoption of PSAK No. 55 (Revised 2006) (Note 2b)
Penambahan	-	-	Addition
Selisih kurs penjabaran	-	-	Exchange rate difference
Jumlah	-	-	Total

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, berdasarkan review dan penilaian manajemen tidak terdapat tagihan akseptasi yang mengalami penurunan nilai.

As of December 31, 2011 and 2010, based on management review and assessment there is no impairment losses on acceptances receivable.

b. Liabilitas Akseptasi

b. Acceptances Payable

Liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 merupakan liabilitas kepada bank lain pihak ketiga.

As of December 31, 2011 and 2010, acceptances payable are liabilities to other third party banks.

Tagihan akseptasi dan liabilitas akseptasi berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah kurang dari atau sama dengan 1 tahun.

Acceptances receivable and payable will mature within a year or less.

10. Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima

10. Interest Receivable

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Bunga atas:			Interest on:
Kredit yang diberikan	15.988	9.961	Loans
Efek-efek	888	625	Securities
Penempatan pada bank lain	-	214	Placements with other banks
Jumlah	16.876	10.800	Total

Pendapatan bunga yang masih akan diterima dari pihak berelasi masing-masing adalah sebesar Rp 95 juta dan Rp 81 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 (Catatan 27).

Interests receivable from related parties as of December 31, 2011 and 2010, amounted to Rp 95 million and Rp 81 million, respectively (Note 27).

Pendapatan bunga yang masih akan diterima dalam mata uang asing sebesar ekuivalen Rp 499 juta dan Rp 444 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 (Catatan 29).

Interest receivable in foreign currencies as of December 31, 2011 and 2010 is equivalent to Rp 499 million and Rp 444 million, respectively (Note 29).

11. Aset Tetap

11. Premises and Equipment

	1 Januari 2011/ January 1, 2011	Perubahan selama tahun berjalan/ Changes during the year			31 Desember 2011/ December 31, 2011	
	Rp '000.000	Penambahan/ Additions Rp '000.000	Pengurangan/ Deductions Rp '000.000	Reklasifikasi/ Reclassifications Rp '000.000	Rp '000.000	
Biaya perolehan:						Cost:
Tanah	7.328	101	(360)	490	7.559	Land
Bangunan	111.889	4.348	(28.696)	1.807	89.348	Buildings
Perbaikan aset						Leasehold
yang disewa	11.334	3.064	(473)	664	14.589	improvements
Inventaris kantor	33.227	6.890	(412)	307	40.012	Office equipment
Kendaraan	22.597	4.900	(657)	-	26.840	Vehicles
Aset dalam konstruksi	3.268	-	-	(3.268)	-	Construction in progress
Jumlah	189.643	19.303	(30.598)	-	178.348	Total
Akumulasi penyusutan dan amortisasi:						Accumulated depreciation and amortization:
Bangunan	15.233	5.286	(6.327)	-	14.192	Building
Perbaikan aset						Leasehold
yang disewa	1.375	726	(326)	-	1.775	improvements
Inventaris kantor	22.645	6.117	(407)	-	28.355	Office equipment
Kendaraan	8.596	4.456	(368)	-	12.684	Vehicles
Jumlah	47.849	16.585	(7.428)	-	57.006	Total
Nilai Tercatat	141.794				121.342	Net Book Value
	1 Januari 2010/ January 1, 2010	Perubahan selama tahun berjalan/ Changes during the year			31 Desember 2010/ December 31, 2010	
	Rp '000.000	Penambahan/ Additions Rp '000.000	Pengurangan/ Deductions Rp '000.000	Reklasifikasi/ Reclassifications Rp '000.000	Rp '000.000	
Biaya perolehan:						Cost:
Tanah	7.328	-	-	-	7.328	Land
Bangunan	69.531	15.550	(12.109)	38.917	111.889	Buildings
Perbaikan aset						Leasehold
yang disewa	4.477	6.857	-	-	11.334	improvements
Inventaris kantor	25.030	8.450	(253)	-	33.227	Office equipment
Kendaraan	14.828	8.822	(1.053)	-	22.597	Vehicles
Aset dalam konstruksi	33.674	8.511	-	(38.917)	3.268	Construction in progress
Jumlah	154.868	48.190	(13.415)	-	189.643	Total
Akumulasi penyusutan dan amortisasi:						Accumulated depreciation and amortization:
Bangunan	11.755	3.478	-	-	15.233	Building
Perbaikan aset						Leasehold
yang disewa	939	436	-	-	1.375	improvements
Inventaris kantor	19.294	3.604	(253)	-	22.645	Office equipment
Kendaraan	6.190	3.070	(664)	-	8.596	Vehicles
Jumlah	38.178	10.588	(917)	-	47.849	Total
Nilai Tercatat	116.690				141.794	Net Book Value

Beban penyusutan dan amortisasi adalah sebesar Rp 16.585 juta dan Rp 10.588 juta masing-masing untuk tahun 2011 dan 2010 (Catatan 23).

Depreciation and amortization charged to operations amounted to Rp 16,585 million and Rp 10,588 million in 2011 and 2010, respectively (Note 23).

Aset tetap Perusahaan, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran pada PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk dan PT Asuransi Central Asia Tbk (pihak ketiga) dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 61.217 juta dan Rp 10.939 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dan sebesar Rp 19.461 juta dan Rp 5.865 juta pada tanggal 31 Desember 2010. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Pada tahun 2011 dan 2010, Perusahaan menjual aset tetap masing-masing dengan nilai tercatat Rp 23.170 juta dan Rp 12.498 juta pada harga jual sebesar Rp 29.776 juta dan Rp 13.316 juta. Keuntungan penjualan tersebut dibukukan pada Pendapatan Lainnya (Catatan 22).

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

All premises and equipment, except for land, are insured against losses from fire with PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk and PT Asuransi Central Asia Tbk (third parties), for Rp 61,217 million and Rp 10,939 million, respectively, as of December 31, 2011, and for Rp 19,461 million and Rp 5,865 million, respectively, as of December 31, 2010. Management believes that the insurance coverages are adequate to cover possible losses on the assets insured.

In 2011 and 2010, the Company sold certain premises and equipment with a net book value amounting to Rp 23,170 million and Rp 12,498 million for Rp 29,776 million and Rp 13,316 million, respectively. The gain on sale is recognized in Other Revenues (Note 22).

Management believes that as of December 31, 2011 and 2010 there is no impairment in value of the aforementioned assets.

12. Aset Lain-lain

12. Other Assets

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Biaya dibayar dimuka	17.731	15.886	Prepaid expenses
Agunan yang diambil alih - bersih	5.675	9.152	Foreclosed properties - net
Uang jaminan	2.928	2.670	Refundable deposits
Tagihan dari penjualan agunan yang diambil alih	-	4.250	Receivables from sale of foreclosed properties
Properti terbengkalai - bersih	-	898	Abandoned properties - net
Lain-lain	3.462	5.568	Others
Jumlah - Bersih	29.796	38.424	Net

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, agunan yang diambil alih disajikan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 3.796 juta dan Rp 6.369 juta.

Pada tahun 2011 dan 2010, Perusahaan menjual agunan yang diambil alih masing-masing dengan nilai tercatat Rp 6.050 juta dan Rp 13.243 juta pada harga jual sebesar Rp 8.383 juta dan Rp 15.144 juta. Dari harga penjualan agunan yang diambil alih sebesar Rp 15.144 juta pada tahun 2010, sejumlah Rp 4.250 juta belum dibayar pada tanggal 31 Desember 2010 serta dibukukan sebagai tagihan penjualan agunan yang diambil alih. Keuntungan penjualan tersebut dibukukan pada Pendapatan Lainnya (Catatan 22).

As of December 31, 2011 and 2010, foreclosed properties are stated net of allowances for impairment losses amounting to Rp 3,796 million and Rp 6,369 million, respectively.

In 2011 and 2010, the Company sold certain foreclosed properties with a carrying value amounting to Rp 6,050 million and Rp 13,243 million for Rp 8,383 million and Rp 15,144 million, respectively. About Rp 4,250 million of the total selling price of Rp 15,144 million in 2010 has not been collected as of December 31, 2010, thus recognized as receivable from sale of foreclosed properties. The gain on sale is recognized in Other Revenues (Note 22).

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, properti terbengkalai sebesar Rp 166 juta dan Rp 1.797 juta disajikan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing adalah sebesar Rp 166 juta dan Rp 899 juta.

As of December 31, 2011 and 2010, abandoned properties with a cost amounting to Rp 166 million and Rp 1,797 million, are stated net of allowances for impairment losses amounting to Rp 166 million and Rp 899 million, respectively.

Pada tahun 2011 dan 2010, Perusahaan menjual properti terbengkalai masing-masing dengan nilai tercatat Rp 1.631 juta dan Rp 1.000 juta pada harga jual Rp 1.825 juta dan Rp 1.350 juta. Keuntungan penjualan tersebut dibukukan pada Pendapatan Lainnya (Catatan 22).

In 2011 and 2010, the Company sold certain abandoned properties with a carrying value amounting to Rp 1.631 million and Rp 1,000 million for Rp 1.825 million and Rp 1,350 million, respectively. The gain on sale is recognized in Other Revenue (Note 22).

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, lain-lain sebagian besar terdiri dari uang muka dan benda pos.

As of December 31, 2011 and 2010, others mainly consist of advances and post supplies.

Aset lain-lain dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar ekuivalen nihil dan Rp 205 juta (Catatan 29).

Other assets denominated in foreign currencies as of December 31, 2011 and 2010 amounted to nil and Rp 205 million, respectively (Note 29).

13. Liabilitas Segera

13. Liabilities Immediately Payable

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, liabilitas segera merupakan liabilitas sehubungan dengan transaksi kliring dan transfer.

As of December 31, 2011 and 2010, liabilities immediately payable are related to clearing transactions and transfers.

Liabilitas segera dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, masing-masing adalah sebesar ekuivalen Rp 57 juta dan Rp 21.134 juta (Catatan 29).

Liabilities immediately payable in foreign currency as of December 31, 2011 and 2010, amounted to Rp 57 million and Rp 21,134 million, respectively (Note 29).

14. Simpanan

14. Deposits

	2011	2010	
	Rp '000.000	Rp '000.000	
Giro	617.282	507.940	Demand deposits
Tabungan	513.078	267.083	Savings deposits
Deposito berjangka	4.683.332	2.850.662	Time deposits
Jumlah	<u>5.813.692</u>	<u>3.625.685</u>	Total

a. Giro	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Pihak berelasi (Catatan 27)			Related parties (Note 27)
Rupiah	27.660	8.173	Rupiah
Mata uang asing (Catatan 29)	<u>10.978</u>	<u>13.395</u>	Foreign currencies (Note 29)
Jumlah	<u>38.638</u>	<u>21.568</u>	Total
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	456.387	359.043	Rupiah
Mata uang asing (Catatan 29)	<u>122.257</u>	<u>127.329</u>	Foreign currencies (Note 29)
Jumlah	<u>578.644</u>	<u>486.372</u>	Total
Jumlah	<u><u>617.282</u></u>	<u><u>507.940</u></u>	Total
	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Suku bunga rata-rata per tahun			Average interest rates per annum
Rupiah	2,15%	2,40%	Rupiah
Mata uang asing	0,13%	0,13%	Foreign currencies

Jumlah giro yang dijadikan jaminan kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp 28.565 juta.

Total current accounts which were blocked and used as credit guarantee amounted to nil as of December 31, 2011 and Rp 28,565 million as of December 31, 2010.

b. Tabungan	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 27)	3.356	2.801	Related parties (Note 27)
Pihak ketiga	<u>509.722</u>	<u>264.282</u>	Third parties
Jumlah	<u>513.078</u>	<u>267.083</u>	Total
	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Suku bunga rata-rata per tahun			Average interest rates per annum
Rupiah	1,74%	6,00%	Rupiah

c. Deposito berjangka

	2011	2010	
	Rp '000.000	Rp '000.000	
Pihak berelasi (Catatan 27)			Related parties (Note 27)
Rupiah	651.319	80.820	Rupiah
Mata uang asing (Catatan 29)	4.442	6.060	Foreign currencies (Note 29)
Jumlah	<u>655.761</u>	<u>86.880</u>	Total
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	3.736.653	2.552.515	Rupiah
Mata uang asing (Catatan 29)	290.918	211.267	Foreign currencies (Note 29)
Jumlah	<u>4.027.571</u>	<u>2.763.782</u>	Total
Jumlah	<u><u>4.683.332</u></u>	<u><u>2.850.662</u></u>	Total

c. Time deposits

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu:

The details of time deposits based on its maturity are as follows:

Berdasarkan Periode Deposito Berjangka

Based on Deposit Period

	2011			2010			
	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Pihak ketiga/ <i>Third parties</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Pihak ketiga/ <i>Third parties</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	
Kurang dari 1 bulan	284.000	53.500	337.500	-	32.700	32.700	Less than 1 month
1 bulan	295.910	2.553.832	2.849.742	61.365	1.976.277	2.037.642	1 month
3 bulan	5.940	869.436	875.376	2.000	424.198	426.198	3 months
6 bulan	61.161	488.404	549.565	3.750	197.869	201.619	6 months
12 bulan	8.750	62.399	71.149	19.765	132.738	152.503	12 months
Jumlah	<u>655.761</u>	<u>4.027.571</u>	<u>4.683.332</u>	<u>86.880</u>	<u>2.763.782</u>	<u>2.850.662</u>	Total

Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

Based on Remaining Period Until Maturity

	2011			2010			
	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Pihak ketiga/ <i>Third parties</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Pihak ketiga/ <i>Third parties</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	
Kurang dari atau 1 bulan	580.030	2.893.107	3.473.137	61.365	2.108.310	2.169.675	1 month or less
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	36.961	724.906	761.867	5.100	420.732	425.832	More than 1 month until 3 months
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	31.020	372.337	403.357	3.000	170.409	173.409	More than 3 months until 6 months
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	7.750	37.221	44.971	17.415	64.331	81.746	More than 6 months until 12 months
Jumlah	<u>655.761</u>	<u>4.027.571</u>	<u>4.683.332</u>	<u>86.880</u>	<u>2.763.782</u>	<u>2.850.662</u>	Total

Suku bunga rata-rata per tahun:

Average interest rates per annum:

	2011	2010	
Rupiah	7,50%	7,58%	Rupiah
Mata uang asing	1,67%	1,30%	Foreign currencies

Jumlah deposito berjangka yang dijadikan jaminan kredit, bank garansi dan *letter of credit* yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 418.567 juta dan Rp 299.247 juta.

Total time deposits amounting to Rp 418,567 million and Rp 299,247 million as of December 31, 2011 and 2010, respectively, are pledged as collateral by the debtors on the credit facilities, bank guarantee and letter of credit given by the Company.

15. Simpanan dari Bank Lain – Pihak Ketiga

15. Deposits from Other Banks – Third Parties

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Rupiah			Rupiah
Deposito berjangka	21.315	125.711	Time deposits
Giro	4.978	5.947	Demand deposits
Jumlah	<u>26.293</u>	<u>131.658</u>	Total

Giro dari bank lain merupakan simpanan dalam mata uang Rupiah.

Demand deposits from other banks are in Rupiah.

Pada tahun 2011 dan 2010, suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka masing-masing adalah sebesar 7,57% dan 8,45% dengan jangka waktu 1 - 3 bulan.

Average interest rates per annum for time deposits are 7.57% and 8.45% in 2011 and 2010, respectively, with a term of 1 – 3 months.

16. Utang Pajak

16. Taxes Payable

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Pajak penghasilan badan - Pasal 29 (Catatan 25)	514	2.002	Corporate income tax - Art 29 (Note 25)
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 21	704	645	Article 21
Pasal 23 dan 26	8	15	Article 23 and 26
Pasal 25	399	1.026	Article 25
Pajak final	5.656	3.444	Final tax
Jumlah	<u>7.281</u>	<u>7.132</u>	Total

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh Perusahaan yang bersangkutan (*self assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The filing of tax returns is based on the Company own calculation of tax liabilities (self assessment). Tax authorities may conduct a tax audit on the Company within a certain period based on Law of General Provision and Administration of Taxation.

17. Liabilitas Lain-lain

17. Other Liabilities

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Bunga yang masih harus dibayar	16.180	11.237	Interest payable
Setoran jaminan	2.879	2.438	Security deposits
Premi Penjaminan Pemerintah	320	784	Premium on Government Guarantee
Lain-lain	9.279	16.017	Others
Jumlah	<u>28.658</u>	<u>30.476</u>	Total

Liabilitas lain-lain kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp 993 juta dan Rp 263 juta (Catatan 27).

As of December 31, 2011 and 2010, other liabilities to related parties amounted to Rp 993 million and Rp 263 million, respectively (Note 27).

Liabilitas lain-lain dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebesar ekuivalen Rp 397 juta dan Rp 2.981 juta (Catatan 29).

As of December 31, 2011 and 2010, other liabilities denominated in foreign currencies amounted to Rp 397 million and Rp 2,981 million, respectively (Note 29).

18. Modal Saham

18. Capital Stock

Modal Dasar

Authorized Capital

Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp 1.000.000 juta yang terdiri dari 10.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 per lembar pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

As of December 31, 2011 and 2010, the Company's authorized capital amounted to Rp 1,000,000 million, which consist of 10,000,000,000 shares with nominal value of Rp 100 per share.

Modal Ditempatkan dan Disetor

Issued and Paid-up Capital

Nama Pemegang Saham/ <i>Name of Stockholders</i>	2011		
	Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Jumlah Modal Disetor/ <i>Total Paid-up Capital Stock</i> Rp '000.000
Johnny Wiraatmadja	2.519.321.029	67,06%	251.932
PT Mitra Wadah Kencana	556.706.008	14,82%	55.671
PT Blue Cross Indonesia	160.770.310	4,28%	16.077
Sjerra Salim	51.495.306	1,37%	5.150
Suganda Setiadi Kurnia	6.916.981	0,18%	692
Syamsuar Halim	5.680.461	0,15%	568
Masyarakat/ <i>Public</i>	455.985.788	12,14%	45.599
Jumlah/Total	3.756.875.883	100,00%	375.689

Nama Pemegang Saham/ <i>Name of Stockholders</i>	2010		
	Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Jumlah Modal Disetor/ <i>Total Paid-up Capital Stock</i> Rp '000.000
Johnny Wiraatmadja	1.803.468.943	48,01%	180.347
PT Mitra Wadah Kencana	556.706.008	14,82%	55.671
PT Blue Cross Indonesia	160.770.310	4,28%	16.077
Sjerra Salim	51.495.306	1,37%	5.150
Suganda Setiadi Kurnia	6.916.981	0,18%	692
Syamsuar Halim	5.680.461	0,15%	568
Masyarakat/ <i>Public</i>	1.171.837.874	31,19%	117.183
Jumlah/Total	3.756.875.883	100,00%	375.688

Pada tanggal 24 Juni 2010, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengesahkan rencana Perusahaan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli sejumlah 1.014.630.713 saham dengan nominal Rp 100 per saham dengan harga pelaksanaan Rp 200 per saham. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini didokumentasikan dalam Akta No. 187 tanggal 24 Juni 2010 dari Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Jakarta.

Penawaran Umum Terbatas I ini telah mendapat pernyataan efektif dari ketua Bapepam-LK pada tanggal 24 Juni 2010 melalui Surat Keputusan No. S-5684/BL/2010. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas I ini adalah sebesar Rp 202.926 juta.

Manajemen Permodalan

Perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008. Dalam ketentuan tersebut bank diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang terdiri dari ATMR Risiko Kredit dan Risiko Operasional, serta ATMR Risiko Pasar bila bank telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Perusahaan wajib memperhitungkan Risiko Pasar karena telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007 tanggal 1 November 2007, yaitu jumlah aset sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih. Perhitungan dilakukan menggunakan metode standar sesuai dengan PBI dimaksud.

Perusahaan telah menerapkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/33/DPNP perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Perhitungan Risiko Operasional dalam menghitung rasio kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator dasar sesuai Surat Edaran BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009. Sejak 1 Januari 2011, beban modal Risiko Operasional diperhitungkan sebesar 15% dari rata-rata pendapatan kotor selama tiga tahun terakhir.

Posisi rasio kecukupan modal pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 12,27% dan 17,84%. Rasio kecukupan modal pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

On June 24, 2010, the Company held an Extraordinary Stockholders' Meeting to ratify the plan of the Company issue additional 1,014,630,713 shares with a par value of Rp 100 per share through Limited Public Offering I at an exercise price of Rp 200 per share. The minutes of this Extraordinary Stockholders' Meeting were documented in Notarial Deed No. 187 dated June 24, 2010 of Eliwaty Tjitra, S.H., public notary in Jakarta.

The Limited Public Offering I took effect upon the receipt from the Chairman of Bapepam-LK of the Notice of Effectivity in his Decision Letter No. S-5684/BL/2010 dated June 24, 2010. The proceeds from this Limited Public Offering I amounted to Rp 202,926 million.

Capital Management

The calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR) is in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 10/15/PBI/2008 dated September 24, 2008. Under these provisions, the Company is required to provide minimum capital of 8% of risk weighted assets, which consists of risk weighted assets for Credit, Market and Operational Risk based on predetermined criteria.

The Company is required to take into consideration market risk as stipulated in Bank Indonesia Regulation. 9/13/PBI/2007 dated November 1, 2007, since the Company has total assets of Rp 10,000,000,000,000 (ten trillion rupiah) or more. The calculation is performed using the standard method in accordance with the said regulation.

The Company has applied Circular Letter of Bank Indonesia No. 9/33/DPNP regarding Guideline for the Use of Standard Method in Calculation of Minimum Capital Commercial Bank by calculating Market Risk.

The calculation of Operational Risk for CAR purpose's, is based the basic indicator approach in accordance to Circular Letter BI. No. 11/3/DPNP dated January 27, 2009. Effective January 1, 2011, the operational risk capital charges is based on 15% of average gross income over the last three years.

The Company's CAR as of and December 31, 2011 and 2010, are 12.27%, and 17.84%, respectively. CAR as of December 31, 2011 and 2010 has been calculated in accordance with Bank Indonesia Regulation.

Perhitungan rasio kecukupan modal pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

The calculation of CAR as of December 31, 2011 and 2010 is as follows:

	2011 Rp 000.000	2010 Rp 000.000	
Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit	4.521.452	2.912.933	Total risk weighted assets by taking into account credit risk
Modal inti	515.521	486.671	Core capital
Modal pelengkap	56.958	34.807	Supplementary capital
Jumlah modal inti dan pelengkap	572.479	521.478	Total core and supplementary capital
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang tersedia untuk risiko kredit	12,66%	17,90%	Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) available by taking into account credit risk
Jumlah ATMR untuk risiko pasar	143.857	9.821	Total weighted assets including market risk
Modal inti yang dialokasikan untuk mengantisipasi risiko pasar	-	-	Core capital allocated to anticipate market risk
Jumlah modal	572.479	521.478	Total capital
ATMR untuk risiko kredit atas seluruh surat berharga dalam trading book yang telah diperhitungkan risiko spesifik	8.488	7.360	Risk weighted assets by taking into account credit risk for all securities in trading book which are accounted for specific risk
Jumlah ATMR risiko kredit dan risiko pasar	4.665.309	2.922.754	Total risk weighted assets for credit and market risks
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang tersedia setelah memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar	12,27%	17,84%	Minimum capital adequacy ratio by taking into account credit risk and market risk available

Rasio utang bersih terhadap modal pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Ratio of net debt to equity as of December 31, 2011 and 2010 are as follows:

	31 Desember/December 31		
	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Jumlah simpanan dan simpanan dari bank lain	5.839.985	3.757.343	Total deposits and deposits from other banks
Dikurangi: kas dan setara kas	1.349.149	957.139	Less: cash and cash equivalents
Utang bersih	4.490.836	2.800.204	Net debt
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemegang saham	557.634	521.420	Total equity attributable to stockholders
Rasio utang terhadap modal	805,34%	537,03%	Net debt to equity ratio

Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi.

Group managed the capital structure and make an adjustment on the capital structure regarding the changes in economic condition.

19. Tambahan Modal Disetor

19. Additional Paid-in Capital

	2011 Rp '000	2010 Rp '000	
Saldo awal	127.419	27.446	Beginning balance
Penerimaan dari penerbitan 1.014.630.713 saham melalui Penawaran Umum Terbatas I	-	101.463	Proceeds from issuance of 1,014,630,713 shares through Limited Public Offering I
Biaya emisi saham	-	(1.490)	Share issuance costs
Saldo akhir	<u>127.419</u>	<u>127.419</u>	Ending balance

20. Pendapatan Bunga

20. Interest Income

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Rupiah			Rupiah
Kredit	413.962	281.799	Loans
Efek-efek	44.229	38.728	Securities
Penempatan pada bank lain	10.954	7.677	Placements with other banks
Giro pada Bank Indonesia	<u>1.927</u>	<u>207</u>	Demand deposits with Bank Indonesia
Jumlah	<u>471.072</u>	<u>328.411</u>	Subtotal
Mata uang asing			Foreign Currencies
Kredit	18.692	8.367	Loans
Penempatan pada bank lain	430	433	Placements with other banks
Efek-efek	<u>118</u>	<u>-</u>	Securities
Jumlah	<u>19.240</u>	<u>8.800</u>	Subtotal
Jumlah	<u>490.312</u>	<u>337.211</u>	Total

21. Beban Bunga

21. Interest Expense

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Rupiah			Rupiah
Deposito berjangka	249.207	168.203	Time deposits
Tabungan	17.045	11.873	Savings
Giro	13.972	8.158	Demand deposits
Premi Penjaminan Pemerintah (Catatan 35e)	8.910	6.235	Premium on Government guarantee (Note 35e)
Simpanan dari bank lain	<u>5.049</u>	<u>4.220</u>	Deposits from other banks
Jumlah	<u>294.183</u>	<u>198.689</u>	Subtotal
Mata uang asing			Foreign Currencies
Deposito berjangka	3.242	2.429	Time deposits
Giro	1.454	130	Demand deposits
Simpanan dari bank lain	<u>11</u>	<u>-</u>	Deposits from other banks
Jumlah	<u>4.707</u>	<u>2.559</u>	Subtotal
Jumlah	<u>298.890</u>	<u>201.248</u>	Total

22. Pendapatan Lainnya

	2011	2010
	Rp '000.000	Rp '000.000
Keuntungan atas penjualan aset tetap - bersih (Catatan 11)	6.606	818
Keuntungan atas penjualan agunan yang diambil alih - bersih (Catatan 12)	2.333	1.901
Keuntungan atas penjualan properti terbengkalai (Catatan 12)	194	350
Lain-lain	3.931	1.921
	<u>13.064</u>	<u>4.990</u>

22. Other Revenues

Gain on sale of premises and equipment - net (Note 11)	818
Gain on sale of foreclosed properties - net (Note 12)	1.901
Gain on sale of abandoned properties (Note 12)	350
Others	1.921
Total	<u>4.990</u>

23. Beban Umum dan Administrasi

	2011	2010
	Rp '000.000	Rp '000.000
Penyusutan (Catatan 11)	16.585	10.588
Perbaikan dan pemeliharaan Prasarana	13.747	3.586
Prasarana	10.390	7.304
Imbalan pasti pasca-kerja (Catatan 31)	8.094	4.606
Sewa kantor	8.017	4.450
Perjalanan dan transportasi	5.689	3.258
Publikasi	4.591	3.568
Alat-alat tulis dan perlengkapan kantor	4.575	1.939
Latihan dan pendidikan	3.571	2.700
Asuransi	2.725	2.103
Administrasi bank	1.221	117
Jasa profesional	498	912
Lain-lain	12.060	8.450
	<u>91.763</u>	<u>53.581</u>

23. General and Administrative Expenses

Depreciation (Note 11)	10.588
Repairs and maintenance	3.586
Utilities	7.304
Defined-benefit post-employment benefits (Note 31)	4.606
Rental	4.450
Travel and transportation	3.258
Publications	3.568
Stationery and office supplies	1.939
Training and education	2.700
Insurance	2.103
Bank charges	117
Professional fees	912
Others	8.450
Total	<u>53.581</u>

Lain-lain termasuk beban keanggotaan klub, keamanan, keperluan komputer, representasi, beban pembukaan cabang, dan perijinan.

Others include club membership fees, security expenses, computer supplies, entertainment expenses, branch opening expenses, and license.

24. Beban Lainnya

Beban lainnya terdiri dari beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan denda, pemeliharaan agunan yang diambil alih, estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, dan lain-lain.

24. Other Expenses

Other expenses consist of expenses in relation with penalties, maintenance of foreclosed properties, estimated losses on commitment and contingencies, and others.

25. Pajak Penghasilan

- a. Beban (penghasilan) pajak Perusahaan terdiri dari:

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Pajak kini	10.550	12.575	Current tax
Pajak tangguhan	1.611	(3.055)	Deferred tax
Jumlah	<u>12.161</u>	<u>9.520</u>	Total

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	<u>48.375</u>	<u>37.813</u>	Income before tax per statements of comprehensive income
Perbedaan temporer :			Temporary differences:
Pencadangan (pemulihan):			Provision for (reversal of allowance of):
Penurunan nilai aset non produktif	(3.305)	(24)	Impairment losses on non-earning assets
Imbalan pasti pasca-kerja - bersih	6.581	2.480	Defined-benefit post employment expense - net
Penyusutan	777	261	Depreciation
Lain-lain	(10.498)	9.592	Others
Jumlah - Bersih	<u>(6.445)</u>	<u>12.309</u>	Total - Net
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban pajak	-	26	Tax expense
Kesejahteraan karyawan	33	24	Benefits-in-kind
Lain-lain	238	129	Others
Jumlah - Bersih	<u>271</u>	<u>179</u>	Total - Net
Laba kena pajak	<u>42.201</u>	<u>50.301</u>	Taxable income
Beban pajak kini	10.550	12.575	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar dimuka	<u>10.036</u>	<u>10.573</u>	Less prepaid income tax
Utang pajak kini (Catatan 16)	<u>514</u>	<u>2.002</u>	Current tax payable (Note 16)

Laba kena pajak Perusahaan tahun 2010 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan kepada Kantor Pajak.

The Company's taxable income in 2010 is in accordance with the corporate income tax return filed with the Tax Office.

c. Pajak Tangguhan

Rincian dari aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2010/ January 1 2010	Penyesuaian/ Adjustment *)	Dikreditkan (dibebankan) dalam laporan laba rugi komprehensif Credited (charged) to statement of comprehensive income for the year	31 Desember 2010/ December 31, 2010	Dikreditkan (dibebankan) dalam laporan laba rugi komprehensif Credited (charged) to statement of comprehensive income for the year	31 Desember 2011/ December 31, 2011	
	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	
Cadangan kerugian penurunan nilai penghapusan aset produktif	1.818	(720)	660	1.758	(1.758)	-	Allowance for impairment losses on earning assets
Cadangan kerugian penurunan nilai penghapusan aset non produktif	1.845	-	(28)	1.817	(826)	991	Allowance for impairment losses on non-earning assets
Imbalan pasti pasca-kerja	1.804	-	620	2.424	1.645	4.069	Defined-benefit post-employment reserve
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	588	-	-	588	-	588	Provision for commitments and contingencies
Kredit yang diberikan	-	-	688	688	183	871	Loans
Cadangan bonus	-	-	1.050	1.050	(1.050)	-	Bonus allowance
Akumulasi penyusutan aset tetap	(122)	-	65	(57)	195	138	Accumulated depreciation of premises and equipment
Jumlah	<u>5.933</u>	<u>(720)</u>	<u>3.055</u>	<u>8.268</u>	<u>(1.611)</u>	<u>6.657</u>	Total

*) Penyesuaian terhadap saldo laba pada tanggal 1 Januari 2010 (Catatan 2b)

*) Adjustment on retained earnings on January 1, 2010 (Note 2b)

Pada bulan September 2008, Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan direvisi melalui penerbitan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang revisi tersebut mengatur perubahan tarif pajak penghasilan badan, dari sebelumnya tarif progresif menjadi tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009 dan sebesar 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya.

In September 2008, Law No. 7 Year 1983 regarding "Income Tax" has been revised with Law No. 36 Year 2008. The revised Law stipulates changes in corporate income tax rate from progressive tax rates to a flat rate of 28% for fiscal year 2009 and 25% for fiscal year 2010 onwards.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku dalam laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax per statements of comprehensive income is as follows:

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	<u>48.375</u>	<u>37.813</u>	Income before tax per statements of comprehensive income
Pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	<u>12.094</u>	<u>9.453</u>	Tax expense at effective tax rates
Pengaruh pajak atas beban yang tidak dapat dikembangkan menurut fiskal:			Tax effect of permanent differences :
Beban pajak	-	7	Tax expense
Kesejahteraan karyawan	7	6	Benefits-in-kind
Lain-lain	<u>60</u>	<u>32</u>	Others
Jumlah - Bersih	<u>67</u>	<u>45</u>	Net
Jumlah	12.161	9.498	Subtotal
Koreksi atas pajak tangguhan	-	<u>22</u>	Adjustment on deferred tax
Jumlah Beban Pajak	<u>12.161</u>	<u>9.520</u>	Total tax expense

26. Laba per Saham Dasar

	2011 Rp '000.000	2010 Rp '000.000
Laba bersih		
Laba bersih untuk perhitungan laba per saham dasar	36.214	28.293
Jumlah saham		
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk perhitungan laba per saham	3.756.875.883	3.212.033.089
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	9,60	8,81

26. Basic Earnings per Share

Net income
Net income for the computation of basic earnings per share
Number of shares
Weighted average number of shares for the computation of basic earnings per share
Basic earnings per share (in full Rupiah)

27. Sifat dan Transaksi Pihak berelasi

Sifat dari Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah karyawan kunci, individu (perorangan) dan perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan. Adapun pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan pemegang saham
 Johnny Wiraatmaja, PT Blue Cross Indonesia, Sjerra Salim, Syamsuar Halim, dan PT Mitra Wadah Kencana.
- b. Hubungan kepemilikan/pemegang saham yang sama
 Standard Commerce Serv., PT Danpac Resources, PT Pilarmas Investindo, PT Millenium Pharmacon International Tbk, PT Danpac Investindo, PT Blue Cross Indonesia, PT Danpac Pharma, PT Panwin Bullion, PT Duta Indah Propertindo, PT Gerbangraya Alam Permai dan PT Bumiputera Alam Lestari.
- c. Hubungan kepengurusan
 Dana Pensiun Bank Windu (dahulu Dana Pensiun Multicor).
- d. Hubungan keluarga dengan pemegang saham dan pengurus
 PT Anugrah Prima Perdana, PT Pancar Pelangi Sakti, PT OTP (Sawmill), PT Hutan Bersama, PT Nusa Kencana Abadi, PT Bina Plaspac Indonesia, PT Putera Kusuma Perkasa, PT Jabalu Media Internusa, dan PT Asuransi Purwanjasa, PT Danpac Resources Kalbar, PT Steril Medical Indonesia dan PT Asuransi Central Asia.

27. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Nature of Relationship

Related parties are key management personnel, individual and companies which have direct or indirect relationship with the Company both in ownership or structure of organization. The related parties are as follows:

- a. Relationship through stockholders
 Johnny Wiraatmaja, PT Blue Cross Indonesia, Sjerra Salim, Syamsuar Halim, and PT Mitra Wadah Kencana.
- b. Relationship through ownership/similar stockholders
 Standard Commerce Serv., PT Danpac Resources, PT Pilarmas Investindo, PT Millenium Pharmacon Int'l Tbk, PT Danpac Investindo, PT Blue Cross Indonesia, PT Danpac Pharma, PT Panwin Bullion, PT Duta Indah Propertindo, PT Gerbangraya Alam Permai and PT Bumiputera Alam Lestari.
- c. Relationship through management
 Dana Pensiun Bank Windu (formerly Dana Pensiun Multicor).
- d. Relationship through families of stockholders and management
 PT Anugrah Prima Perdana, PT Pancar Pelangi Sakti, PT OTP (Sawmill), PT Hutan Bersama, PT Nusa Kencana Abadi, PT Bina Plaspac Indonesia, PT Putera Kusuma Perkasa, PT Jabalu Media Internusa, PT Asuransi Purwanjasa, PT Danpac Resources Kalbar, PT Steril Medical Indonesia and PT Asuransi Central Asia.

- e. Hubungan manajemen dan karyawan kunci Perusahaan.

- e. Management and key management personnel.

Transaksi-transaksi dengan Pihak Berelasi

Transactions with Related Parties

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan juga melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi.

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties.

Tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perusahaan, yang didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1 "Benturan Kepentingan".

There are no transactions with related parties that directly or indirectly related with main business of the Company and identified as conflict of interest based on BAPEPAM-LK Regulation No. IX.E.1 "Conflict of Interest".

- a. Transaksi aset dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- a. Asset account balances and transactions with related parties are as follows:

	2011		2010		
	Jumlah/ Total Rp '000.000	Persentase Terhadap Jumlah Aset/ Percentage to Total Assets %	Jumlah/ Total Rp '000.000	Persentase Terhadap Jumlah Aset/ Percentage to Total Assets %	
Aset					Assets
Kredit (Catatan 8)					Loans (Note 8)
PT Anugrah Prima Perdana	14.345	0,22	10.377	0,24	PT Anugrah Prima Perdana
PT Jabalu Media Internusa	4.804	0,07	7.100	0,16	PT Jabalu Media Internusa
PT Verena Multifinance	-	-	3.428	0,08	PT Verena Multifinance
PT Pancar Pelangi Sakti	1.660	0,03	1.762	0,04	PT Pancar Pelangi Sakti
Lain-lain (dibawah Rp 1.000 juta)	14.194	0,22	13.262	0,30	Others (each below Rp 1,000 million)
	35.003	0,54	35.929	0,82	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima (Catatan 10)	95	0,00	81	0,00	Interest receivable (Note 10)
Jumlah	35.098	0,54	36.010	0,82	Total

- b. Transaksi liabilitas dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- b. Liability account balances and transactions with related parties are as follows:

	2011		2010		
	Jumlah/ Total Rp '000.000	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities %	Jumlah/ Total Rp '000.000	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities %	
Liabilitas					Liabilities
Simpanan (Catatan 14)	697.755	11,84	111.249	2,91	Deposits (Note 14)
Liabilitas lain-lain (Catatan 17)	993	0,02	263	0,01	Other liabilities (Note 17)
Jumlah	698.748	11,86	111.512	2,92	Total

- c. Saldo transaksi komitmen dan kontinjensi dengan pihak berelasi adalah sebesar Rp 2.167 juta dan Rp 2.153 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 (Catatan 28).

- c. Commitments and contingencies transactions with related parties amounted to Rp 2,167 million and Rp 2,153 million as of December 31, 2011 and 2010 (Note 28).

- d. Renumerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen kunci oleh Perusahaan selama tahun 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011	2010	
	Rp '000.000	Rp '000.000	
Imbalan kerja jangka pendek			Short-term benefits
Direksi	8.414	8.293	Directors
Komisaris	1.428	1.166	Commissionners
Komite Audit	120	120	Audit Committee
Karyawan kunci	15.633	9.658	Key management personnel
	<u>25.595</u>	<u>19.237</u>	
Imbalan kerja jangka panjang			Long-term benefits
Direksi	2.385	1.342	Directors
Karyawan kunci	2.659	1.681	Key management personnel
	<u>5.044</u>	<u>3.023</u>	
Jumlah	<u><u>30.639</u></u>	<u><u>22.260</u></u>	Total

- d. Renumerasions provided to directors and key management by the Company during 2011 and 2010 are as follows:

- e. Selama tahun 2011 Perusahaan menjual aset tetap kepada pihak berelasi dengan nilai tercatat Rp 21.918 juta pada harga jual Rp 27.980 juta.

- e. During 2011, the Company has sold premises and equipment to related parties with a net book value amounting to Rp 21,918 million for Rp 27,980 million.

28. Komitmen dan Kontinjensi

Perusahaan memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut:

	2011	2010	
	Rp '000.000	Rp '000.000	
Komitmen			Commitments
Liabilitas Komitmen			Commitment Liabilities
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	1.025.577	517.294	Unused loan facilities
Irrevocable L/C	81.135	53.162	Irrevocable L/C
Jumlah Liabilitas Komitmen	<u><u>1.106.712</u></u>	<u><u>570.456</u></u>	Total Commitment Liabilities
Kontinjensi			Contingencies
Tagihan Kontinjensi			Contingent Receivables
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8.314	6.369	Past due interest revenues
Liabilitas Kontinjensi			Contingent Liabilities
Bank garansi yang diberikan	66.311	73.695	Bank guarantee issued
Liabilitas Kontinjensi - Bersih	<u><u>57.997</u></u>	<u><u>67.326</u></u>	Contingent Liabilities - Net

28. Commitments and Contingencies

The Company has commitments and contingent receivables and liabilities as follows:

Saldo transaksi komitmen dan kontinjensi dengan pihak berelasi adalah sebesar Rp 2.167 juta dan Rp 2.153 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 (Catatan 27).

Commitments and contingencies transactions with related parties amounted to Rp 2,167 million and Rp 2,153 million as of December 31, 2011 and 2010 (Note 27).

29. Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing

29. Assets and Liabilities Denominated in Foreign Currencies

- a. Posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

- a. The balances of assets and liabilities denominated in foreign currencies at statement of financial position dates are as follows:

		2011		2010		
		Nominal/ <i>Nominal</i>	Ekuiv. Rp/ <i>Equiv. in Rp</i>	Nominal/ <i>Nominal</i>	Ekuiv. Rp/ <i>Equiv. in Rp</i>	
			Rp '000.000		Rp '000.000	
Aset						
Kas	USD	900.398	8.164	1.174.241	10.580	Cash
	SGD	361.566	2.525	366.697	2.576	
	HKD	-	-	1.010	1	
Giro pada Bank Indonesia	USD	4.400.000	39.897	400.000	3.604	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - bersih	USD	4.935.412	44.752	15.963.176	143.829	Demand deposits with other banks - net
	EUR	273.688	3.206	440.670	5.296	
	SGD	471.808	3.295	766.515	5.385	
	JPY	1.047.223	122	127.900	14	
	HKD	34.850	41	-	-	
	AUD	39.487	364	-	-	
Kredit yang diberikan - bersih	USD	34.728.136	314.897	22.917.563	206.487	Loans - net
	SGD	2.684.099	18.745	1.332.924	9.365	
Tagihan akseptasi - bersih	USD	160.558	1.456	363.844	3.278	Acceptances receivable - net
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	USD	52.264	474	49.060	442	Interest receivable
	SGD	3.623	25	319	2	
Aset lain-lain - bersih	USD	-	-	12.501	113	Other assets - net
	AUD	-	-	10.000	92	
Jumlah Aset			437.963		391.064	Total Assets
Liabilitas						
Liabilitas segera	USD	6.254	57	2.345.663	21.134	Liabilities immediately payable
Simpanan	USD	44.363.782	402.268	37.591.431	338.699	Deposits
	EUR	251.038	2.941	447.044	5.373	
	JPY	996.250	116	990.750	110	
	SGD	3.332.051	23.270	1.974.211	13.871	
Utang pajak	USD	4.912	45	4.370	39	Tax payable
	SGD	1.083	8	512	6	
Liabilitas akseptasi	USD	160.558	1.456	363.844	3.278	Acceptances payable
Liabilitas lain-lain	USD	42.735	387	330.415	2.977	Other liabilities
	EUR	-	-	107	1	
	SGD	1.386	10	526	3	
Jumlah Liabilitas			430.558		385.491	Total Liabilities
Aset (Liabilitas) - Bersih			7.405		5.573	Net Assets (Liabilities)

Saldo giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, kredit dan tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

The amount of demand deposits with other banks, placements with other banks, loans, and acceptances receivable were presented net of allowance for impairment losses.

Jumlah aset moneter - bersih pada tanggal 31 Desember 2011 dengan menggunakan kurs tanggal 28 Maret 2012, tanggal penyelesaian laporan keuangan, adalah sebesar Rp 7.526 juta.

The total net monetary assets as of December 31, 2011 if converted using the exchange rate on March 28, 2012, the date of completion of these financial statements, amounted to Rp 7,526 million.

b. Posisi Devisa Neto (PDN)

Berikut ini adalah posisi devisa neto Perusahaan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia:

2011				
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif/ <i>Statements of Financial Position and Administrative Accounts</i>				
Mata Uang	Aset/Assets Rp '000.000	Liabilitas/Liabilities Rp '000.000	Nilai Bersih Absolut/ Net Absolute Amount Rp '000.000	Currency
Dolar Amerika Serikat	409.821	404.213	5.608	U.S. Dollar
Dolar Singapura	24.595	23.294	1.301	Singapore Dollar
Dolar Hong Kong	41	-	41	Hong Kong Dollar
Dolar Australia	364	-	364	Australian Dollar
Euro	3.206	2.941	265	Euro
Yen Jepang	122	116	6	Japan Yen
	<u>438.149</u>	<u>430.564</u>	<u>7.585</u>	

2010				
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif/ <i>Statements of Financial Position and Administrative Accounts</i>				
Mata Uang	Aset/Assets Rp '000.000	Kewajiban/Liabilities Rp '000.000	Nilai Bersih Absolut/ Net Absolute Amount Rp '000.000	Currency
Dolar Amerika Serikat	367.337	366.136	1.201	U.S. Dollar
Dolar Singapura	17.330	13.914	3.416	Singapore Dollar
Dolar Hong Kong	1	-	1	Hong Kong Dollar
Dolar Australia	92	-	92	Australian Dollar
Euro	5.243	5.374	131	Euro
Yen Jepang	14	110	96	Japan Yen
	<u>390.017</u>	<u>385.534</u>	<u>4.937</u>	

Posisi Devisa Neto (PDN) pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Rasio PDN Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar 1,30% dan 1,48%.

The above Net Open Position (NOP) as of December 31, 2011 and 2010 was computed in accordance with Bank Indonesia Regulation. The ratios of NOP as of December 31, 2011 and 2010 are 1.30% and 1.48%, respectively.

30. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas keuangan

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

30. Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Fair value is defined as the amount at which the financial instruments could be exchanged in a current transaction between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction, other than in a force sale or liquidation. Fair value is obtained from quotes prices, discounted cash flow model, as appropriate.

Karena sifat jangka pendek dari transaksi, nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan berikut mendekati estimasi nilai pasar wajar pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010:

- a. Kas
- b. Giro pada Bank Indonesia
- c. Giro pada bank lain
- d. Penempatan pada bank lain
- e. Tagihan akseptasi
- f. Pendapatan bunga yang masih akan diterima
- g. Aset lain-lain
- h. Liabilitas segera
- i. Liabilitas akseptasi
- j. Liabilitas lain-lain

Nilai wajar efek-efek, kecuali Sertifikat Bank Indonesia dan Bank Indonesia Intervensi adalah berdasarkan harga kuotasi pasar. Nilai wajar Sertifikat Bank Indonesia dan Bank Indonesia Intervensi adalah mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

Nilai wajar kredit yang diberikan adalah berdasarkan arus kas diskonto menggunakan suku bunga pasar yang berlaku pada 31 Desember 2011 dan 2010.

Simpanan dan simpanan dari bank lain mempunyai fitur dapat ditarik sewaktu waktu, sehingga nilai wajarnya mendekati jumlah terutang yang didiskontokan pada saat penarikan, yang sama dengan nilai tercatatnya.

31. Imbalan Pasca-Kerja

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003.

Perhitungan aktuarial terakhir atas cadangan imbalan pasti pasca-kerja dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, tertanggal 27 Februari 2012.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasti pasca-kerja tersebut masing-masing sebanyak 849 karyawan pada tahun 2011 serta 676 karyawan pada tahun 2010.

Due to the short-term nature of the transactions, the carrying amounts of the following current financial assets and financial liabilities approximate the estimated fair market values as of December 31, 2011 and 2010:

- a. Cash
- b. Demand deposits with Bank Indonesia
- c. Demand deposits with other banks
- d. Placements with other banks
- e. Acceptances receivable
- f. Interest receivables
- g. Other assets
- h. Liabilities immediately payable
- i. Acceptance payable
- j. Other liabilities

Fair value of securities, except Bank Indonesia Certificates and Bank Indonesia Intervention, is based on quoted market prices. Fair value of Bank Indonesia Certificates and Bank Indonesia Intervention are approximately the same as carrying amount because of short term nature.

Fair value of loans was determined by discounting future cash flows using prevailing market interest rate as at December 31, 2011 and 2010.

Deposits and deposits from other banks have a demand feature, thus, the fair value is approaching the amount payable on demand discounted from the first date that the amount could be required to be paid which is equal to carrying amount.

31. Post-Employment Benefits

The amount of post-employment benefits is determined based on Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003 (Law No. 13/ 2003).

The latest actuarial valuation report, dated February 27, 2012 on the defined post-employment benefits was from PT Dian Artha Tama, an independent actuary.

Number of eligible employees is 849 in 2011 and 676 employees in 2010.

Rekonsiliasi nilai kini cadangan imbalan pasti dengan jumlah cadangan imbalan pasti pasca-kerja pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

A reconciliation of the present value of defined-benefit reserve to the amount of defined-benefit post-employment reserve presented in the statement of financial position is as follows:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
	Rp '000.000	Rp '000.000	
Nilai kini cadangan imbalan pasti	27.219	18.281	Present value of defined-benefit reserve
Keuntungan aktuarial yang tidak diakui	<u>(10.943)</u>	<u>(8.586)</u>	Unrecognized actuarial loss
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	<u><u>16.276</u></u>	<u><u>9.695</u></u>	Defined-benefit post-employment reserve

Rincian dari beban cadangan imbalan pasti pasca-kerja adalah sebagai berikut:

The details of the defined-benefit post-employment expense are as follows:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
	Rp '000.000	Rp '000.000	
Beban jasa kini	5.916	2.618	Current service cost
Beban bunga	1.097	1.313	Interest cost
Kerugian aktuarial	<u>1.081</u>	<u>675</u>	Actuarial losses
Jumlah	<u><u>8.094</u></u>	<u><u>4.606</u></u>	Total

Mutasi cadangan imbalan pasti pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Movements of defined-benefit post-employment reserve are as follows:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
	Rp '000.000	Rp '000.000	
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja awal tahun	9.695	7.215	Defined-benefit post-employment reserve at the beginning of the year
Beban imbalan pasti pasca-kerja tahun berjalan	8.094	4.606	Defined-benefit post-employment expense during the year
Pembayaran selama tahun berjalan	<u>(1.513)</u>	<u>(2.126)</u>	Payments during the year
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja akhir tahun	<u><u>16.276</u></u>	<u><u>9.695</u></u>	Defined-benefit post-employment reserve at the end of the year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan imbalan pasti pasca-kerja yang diakui pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah memadai dan memenuhi ketentuan sesuai Undang-undang No. 13 tahun 2003.

Management believes that defined-benefit post-employment reserve as of December 31, 2011 and 2010 is adequate and in compliance with the requirements of Law No. 13/2003.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasti pasca-kerja:

Principal actuarial assumptions used in the valuation of the defined post-employment benefits are as follows:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Tingkat diskonto	6%	8%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8%	8%	Future salary increases
Persentase karyawan yang memilih pensiun dini			Proportion of employees option for early retirement
- Umur 18 - 44 tahun	8%	3%	- Age 18 - 44 years
- Umur 45 - 54 tahun	1%	1%	- Age 45 - 54 years

32. Kontinjensi

Perusahaan dan anggota bank sindikasi lainnya ("Sindikasi") sedang menghadapi tuntutan hukum dari PT Geria Wijaya Prestige (GWP) sehubungan dengan penyitaan dan/atau pelelangan tanah dan bangunan GWP, sesuai dengan kasus No. 490/Pdt.G/1998.Jkt.Pst. Pada tanggal 16 Mei 2000, Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan keputusan No. 880/Pdt/1999/PT.DKI yang berisi sebagai berikut :

- a. Sindikasi telah dinyatakan kalah karena melakukan pengambilalihan dan/atau pelelangan tanah dan bangunan GWP yang berlokasi di Denpasar, Bali ("Hotel Sol Elite Paradiso"); dan
- b. Sindikasi mempunyai liabilitas untuk membayar denda sebesar Rp 20.000 juta kepada GWP, dimana porsi Perusahaan adalah sebesar Rp 2.353 juta.

Berkaitan dengan keputusan Pengadilan Tinggi tersebut, Sindikasi telah mengajukan banding (Memori Kasasi) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI). Pada tanggal 11 Juni 2002, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Keputusan No. 3140 K/Pdt/2001 yang menyatakan menolak permohonan kasasi Sindikasi. Sehubungan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, pada tanggal 9 Januari 2003, Sindikasi telah mengajukan Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI. Atas permohonan Memori Peninjauan Kembali ini, Mahkamah Agung RI mengeluarkan keputusan yang diterima oleh Perusahaan pada tanggal 20 September 2007 dimana GWP dimenangkan atas kasus ini.

GWP mengajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 108/2007. Eks tanggal 14 Oktober 2008 hanya menghukum 3 bank dari 7 bank sindikasi untuk melaksanakan keputusan sebelumnya yaitu membayar denda sebesar Rp 20.000 juta. Perusahaan mengajukan keberatan atas rencana pelaksanaan eksekusi tersebut pada Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan Surat penetapan DAFT No.108/2007.EKS tanggal 15 Juli 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencabut penetapan No. 108/2007 tanggal 7 Mei 2009, dan kembali kepada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 880/Pdt.G/1999/PT.DKI.

Manajemen berkeyakinan bahwa permasalahan tersebut di atas akan dapat diselesaikan melalui negosiasi dengan pihak debitur (GWP). Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Pengadilan Tinggi belum mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan Perusahaan.

32. Contingencies

The Company and other bank members of the syndication ("the Syndicate") filed a case against PT Geria Wijaya Prestige (GWP) regarding the confiscation and/or auction of the latter's property as stated in case No. 490/Pdt.G/1998.Jkt.Pst. On May 16, 2000, the Jakarta High Court issued verdict No. 880/PdU1999/PT.DKI indicating the following:

- a. The Syndicate has lost the case in confiscation and/or auction of the property of GWP in Denpasar, Bali ("Hotel Sol Elite Paradiso"); and
- b. The Syndicate has an obligation to pay a penalty of Rp 20,000 million to GWP in which the Company's share is Rp 2,353 million.

In relation with the verdict mentioned above, the Syndicate submitted an appeal to the Supreme Court. On June 11, 2002, the Supreme Court issued Decree No. 3140K/Pdt/2001 which stated its rejection of the appeal of the Syndicate. In relation to the said decree, on January 9, 2003, the Syndicate has submitted a "Memorandum of Judicial Review" to the Supreme Court. Based on decision of Supreme Court received on September 20, 2007, GWP has won the case.

GWP has filed the case to the Civil Court at Central Jakarta whereas based on decision of Civil court at Central Jakarta No. 108/2007. Eks dated October 14, 2008 has only obligated three of seven syndicated banks to pay a penalty of Rp 20,000 million. The Company has submitted an appeal for the execution to the High Court.

Based on Decision Letter DAFT No. 108/2007.EKS dated July 15, 2009, the Civil Court at Central Jakarta revoked Decision No. 108/2007 dated May 7, 2009, and return to Decision of Subprime Court's DKI Jakarta Nomor: 880/Pdt.G/1999/PT.DKI.

Management believes that the case will be settled through negotiation with GWP. As of the date of completion of these financial statements, the High Court has not issued the decision yet regarding the appeal that was submitted by the Company.

33. Informasi Segmen

Informasi segmen Perusahaan disajikan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, yakni pemasaran, kredit, treasury, dan ekspor-impor.

33. Segment Information

The Company's segment information is presented based on its business activities, namely marketing, credit, treasury, and trade finance.

		2011							
		Laporan Posisi Keuangan/Statement of financial position							
		Pemasaran/ Marketing	Kredit/ Credit	Treasuri/ Treasury	Ekspor-impor/ Trade Finance	Jumlah/ Total			
		Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000			
Aset							Assets		
Aset Segmen		470.829	4.571.031	1.143.616	1.456	6.186.932	Segment assets		
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan							265.862	Unallocated assets	
Jumlah Aset							6.452.794	Total Assets	
Liabilitas							Liabilities		
Liabilitas Segmen		5.831.327	-	26.342	4.335	5.862.004	Segment liabilities		
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan							33.156	Unallocated liabilities	
Jumlah Liabilitas							5.895.160	Total Liabilities	

		2011							
		Laporan Laba Rugi Komprehensif/Statement of comprehensive income							
		Pemasaran/ Marketing	Kredit/ Credit	Treasuri/ Treasury	Ekspor-impor/ Trade Finance	Jumlah/ Total			
		Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000			
Pendapatan							Revenues		
Pendapatan Bunga		2.458	432.654	55.200	-	490.312	Interest revenues		
Pendapatan Lainnya		12.106	2.036	7.424	2.581	24.147	Other revenues		
Jumlah Pendapatan		14.564	434.690	62.624	2.581	514.459	Total revenues		
Beban							Expenses		
Beban Bunga		293.830	-	5.060	-	298.890	Interest expense		
Beban Lainnya		-	8.863	-	(532)	8.331	Other expenses		
Jumlah Beban		293.830	8.863	5.060	(532)	307.221	Total expenses		
Hasil Segmen - Bersih		(279.266)	425.827	57.564	3.113	207.238	Segment results - net		
Pendapatan yang Tidak Dapat Dialokasikan							16.370	Unallocated income	
Beban yang Tidak Dapat Dialokasikan							175.233	Unallocated expense	
Laba Sebelum Pajak							48.375	Income before tax	
Beban Pajak							(12.161)	Tax expense	
Laba bersih							36.214	Net income	

		2010							
		Laporan Posisi Keuangan/Statement of financial position							
		Pemasaran/ Marketing	Kredit/ Credit	Treasuri/ Treasury	Ekspor-impor/ Trade Finance	Jumlah/ Total			
		Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000			
Aset							Assets		
Aset Segmen		454.062	2.915.407	725.150	3.278	4.097.897	Segment assets		
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan							256.563	Unallocated assets	
Jumlah Aset							4.354.460	Total Assets	
Liabilitas							Liabilities		
Liabilitas Segmen		3.662.038	5.760	131.658	6.987	3.806.443	Segment liabilities		
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan							26.597	Unallocated liabilities	
Jumlah Liabilitas							3.833.040	Total Liabilities	

		2010					
		Laporan Laba Rugi Komprehensif/Statement of comprehensive income					
	Pemasaran/ Marketing	Kredit/ Credit	Treasuri/ Treasury	Ekspor-impor/ Trade Finance	Jumlah/ Total		
	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000		
Pendapatan						Revenues	
Pendapatan Bunga	22.986	290.166	24.059	-	337.211	Interest revenues	
Pendapatan Lainnya	5.530	1.546	37.318	1.191	45.585	Other revenues	
Jumlah Pendapatan	28.516	291.712	61.377	1.191	382.796	Total revenues	
Beban						Expenses	
Beban Bunga	197.027	-	4.221	-	201.248	Interest expense	
Beban Lainnya	-	29.193	174	271	29.638	Other expenses	
Jumlah Beban	197.027	29.193	4.395	271	230.886	Total expenses	
Hasil Segmen - Bersih	(168.511)	262.519	56.982	1.191	151.910	Segment results - net	
Pendapatan yang Tidak Dapat Dialokasikan					5.014	Unallocated income	
Beban yang Tidak Dapat Dialokasikan					119.111	Unallocated expense	
Laba Sebelum Pajak					37.813	Income before tax	
Beban Pajak					(9.520)	Tax expense	
Laba bersih					28.293	Net income	

34. Manajemen Risiko

Kegiatan usaha Perusahaan sebagai bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Oleh karena itu, kegiatan operasional Perusahaan dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, maka Perusahaan tidak memiliki kompleksitas yang tinggi atas penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003, bank umum konvensional diwajibkan untuk menerapkan delapan (8) jenis risiko dan lima (5) peringkat penetapan penilaian peringkat risiko yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2010.

a. Pengelolaan Risiko Kredit

Penyaluran kredit oleh Perusahaan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, peraturan Bank Indonesia, dan kebijakan perkreditan yang disusun oleh manajemen. Komite Kredit merupakan komite tertinggi yang membantu Direksi dalam pengawasan pengelolaan risiko kredit melalui keputusan dan rekomendasi yang dikeluarkannya. Secara periodik, Komite Kredit melakukan rapat antara lain untuk memantau BMPK dan kualitas kredit, serta kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai aset. Perusahaan selalu memonitor penyebaran risiko yang timbul sejalan dengan pertumbuhan sektor ekonomi dimana Perusahaan melakukan kegiatan bisnisnya. Batasan ditetapkan secara spesifik berdasarkan nasabah dan sektor industri untuk menghindari konsentrasi risiko kredit yang berlebihan. Batasan tersebut juga diterapkan bagi nasabah individu atau korporasi.

34. Risk Management

The Company's activities as a bank deals with risks associated with its function as intermediary institution. Thus, the operations are organized carefully to prevent loss from operations of the Company.

Based on Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 dated May 19, 2003, the Company's application of its risk management policies is not highly complicated.

Based on Bank Indonesia Regulation No. 11/25/PBI/2009 concerning amendment of Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003, conventional banks are required to apply eight (8) type of risks and five (5) grades to value risks which should be applied since July 1, 2010.

a. Management of Credit Risk

The loans are distributed by the Company prudently in accordance with Bank Indonesia regulations, and loan policies which were prepared by the management. Loan Committee is the highest committee who helps the Directors in monitoring the management of credit risk through its decisions and recommendations. Loan Committee holds a meeting regularly to monitor Legal Lending Limit and loan quality, and the adequate allowance for impairment losses on assets. The Company monitors the spread of risk in relation with the growth of economic sectors where the Company's business focuses. The limit is applied specifically based on customers and industrial sectors to avoid the high credit risk. The limit is also applied to individual or corporate customers.

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010:

Below is exposure of statement of financial position related to credit risk as of December 31, 2011 and 2010:

	2011		
	Jumlah Bruto/ <i>Total Gross</i>	Jumlah Neto/ <i>Total Net</i>	
	Rp '000.000	Rp '000.000	
<i>Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</i>			<i>Financial asset of fair value through profit and loss</i>
Obligasi korporasi	121.669	121.669	Corporate bond
<i>Investasi dimiliki hingga jatuh tempo</i>			<i>Held to maturity investments</i>
Obligasi korporasi	1.375	1.375	Corporate bond
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>			<i>Loans and receivables</i>
Giro pada bank lain	60.096	60.096	Demand deposits with other banks
Kredit yang diberikan	4.626.933	4.555.043	Loans
Tagihan akseptasi	1.456	1.456	Acceptances receivable
Pendapatan bunga yang masih harus diterima	16.876	16.876	Interest receivable
Aset lain-lain	2.928	2.928	Other assets
Jumlah	4.831.333	4.759.443	Total
	2010		
	Jumlah Bruto/ <i>Total Gross</i>	Jumlah Neto/ <i>Total Net</i>	
	Rp '000.000	Rp '000.000	
<i>Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</i>			<i>Financial assets of fair value through profit and loss</i>
Obligasi korporasi	91.826	91.826	Corporate bond
<i>Investasi dimiliki hingga jatuh tempo</i>			<i>Held to maturity investments</i>
Obligasi korporasi	1.375	1.375	Corporate bond
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>			<i>Loans and receivables</i>
Giro pada bank lain	161.835	161.835	Demand deposits with other banks
Penempatan pada bank lain	435.000	435.000	Placements with other banks
Kredit yang diberikan	2.962.103	2.905.446	Loans
Tagihan akseptasi	3.278	3.278	Acceptances receivable
Pendapatan bunga yang masih harus diterima	10.800	10.800	Interest receivable
Aset lain-lain	7.149	7.149	Other assets
Jumlah	3.673.366	3.616.709	Total

b. Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko ini disebabkan oleh pergerakan variabel pasar yang dapat merugikan portofolio yang dimiliki Perusahaan yaitu suku bunga dan nilai tukar. Ruang lingkup manajemen risiko pasar antara lain meliputi aktivitas fungsional kegiatan treasury, dan investasi dalam bentuk surat berharga, penyediaan dana dan kegiatan pendanaan. *Asset and Liability Committee (ALCO)* merupakan komite yang membantu Direksi dalam mengawasi dan mengelola risiko pasar. Perusahaan juga menetapkan kebijakan limit terhadap aktivitas treasury untuk menghindari terjadinya konsentrasi portofolio pada suatu instrumen ataupun *counterparty* tertentu, sehingga terjadi diversifikasi pengelolaan aset dan liabilitas.

b. Management of Market Risk

Market risk is caused by the movements in market variables namely; interest and exchange rate which can cause losses on the Company's portfolio. The scope of this risk includes treasury activities and investment in securities, or funding. *Asset and Liability Committee (ALCO)* is the committee which will help the Directors in monitoring and managing market risk. The Company also implements limit policy in treasury activities to avoid portfolio concentration in one instrument or specific counterparty therefore, there will be diversification in assets and liabilities.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010:

The following table sets out the carrying amount by maturity of the Company's financial assets and liabilities that are exposed to interest rate risk maturity as of December 31, 2011 and 2010:

	2011		2010		
	Rata-rata Suku Bunga Efektif/ Average of <i>Effective Interest rate</i> %	Jumlah/ <i>Total</i> Rp '000.000	Rata-rata Suku Bunga Efektif/ Average of <i>Effective Interest rate</i> %	Jumlah/ <i>Total</i> Rp '000.000	
Aset					Assets
Giro pada bank lain					Demand deposits with other banks
Rupiah	3,00	8.316	3,00	7.311	Rupiah
Mata Uang Asing	0,50	51.780	0,50	154.524	Foreign currencies
Penempatan pada bank lain	-	-	5,98	435.000	Placement with other banks
Efek- efek -					Securities -
Sertifikat Bank Indonesia	4,50	249.431		196.110	Certificate of Bank Indonesia
Bank Indonesia Intervensi	4,54	770.253	-	-	Bank Indonesia Intervention
Obligasi Korporasi	11,42	107.482	11,96	93.201	Corporate bonds
Obligasi Pemerintah	7,30	15.562	-	-	Government bond
Kredit yang diberikan					Loans
Rupiah	14,00	4.290.623	13,00	2.744.427	Rupiah
Mata Uang Asing	6,00	336.310	6,00	217.676	Foreign currencies
Liabilitas					Liabilities
Simpanan					Deposits
Rupiah	1,74 - 7,50	5.385.097	2,40 - 7,58	3.267.634	Rupiah
Mata Uang Asing	0,13 - 1,67	428.595	0,13 - 1,30	358.051	Foreign currency
Simpanan dari bank lain	8,45	26.293	8,45	131.658	Deposit from other bank

Posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing serta rincian Posisi Devisa Neto (PDN) Perusahaan diungkapkan pada Catatan 29.

The balances of assets and liabilities denominated in foreign currencies and net open position's of the Company as disclosed in Note 29.

c. Pengelolaan Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul dari kemungkinan kerugian disebabkan oleh ketidakmampuan Perusahaan memenuhi liabilitas yang telah jatuh waktu. Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan melalui suatu strategi likuiditas antara lain mencakup penetapan *pricing* dan *gapping* terhadap sumber dana dan kredit, analisis kecukupan modal serta investasi Perusahaan dalam portofolio dan surat berharga. Perusahaan senantiasa memelihara kemampuan likuiditasnya untuk melakukan akses pasar uang dengan memelihara hubungan dengan bank-bank koresponden.

c. Management of Liquidity Risk

Liquidity risk arises from possible losses due to the inability of Company to fulfill its obligation as it falls due. Liquidity risk is being managed through application of liquidity strategies such as the decision of pricing and gapping of fund resources and loans, analysis of sufficient capital and investments in portfolio and securities. The Company maintains its liquidity ability to access financial market through its relationships with the other correspondent banks.

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk
Notes to Financial Statements
December 31, 2011 and 2010
and for the Years then Ended

Berikut adalah jadwal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010:

The table below summarizes the maturity profile of financial assets and financial liabilities based on contractual undiscounted payment as of December 31, 2011 and 2010:

	2011						Jumlah/ Total	Biaya transaksi/ Transaction cost	Nilai Tercatat/ Carrying amount	
	Sampai dengan 1 bulan/ Less than 1 month	> 1 bulan s.d. 3 bulan/ > 3 months	> 3 bulan s.d. 6 bulan/ > 6 months	> 6 bulan s.d. 12 bulan/ > 12 months	> 12 bulan s.d. 5 tahun/ > 5 years	> 5 tahun s.d. > 5 years				
	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	
Aset	Assets									
Kas	108.067	-	-	-	-	-	108.067	-	108.067	Cash
Giro pada Bank Indonesia	410.733	-	-	-	-	-	410.733	-	410.733	Demand deposit with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	60.096	-	-	-	-	-	60.096	-	60.096	Demand deposit with other banks
Efek-efek	1.141.353	-	-	-	705	670	1.142.728	-	1.142.728	Securities
Kredit yang diberikan	222.242	197.080	525.342	1.181.024	1.557.924	961.654	4.645.266	18.333	4.626.933	Loans
Tagihan akseptasi	1.456	-	-	-	-	-	-	-	1.456	Acceptances receivable
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	16.876	-	-	-	-	-	16.876	-	16.876	Interest receivable
Aset lain-lain	928	-	2.000	-	-	-	2.928	-	2.928	Other assets
Jumlah aset	1.961.751	197.080	527.342	1.181.024	1.558.629	962.324	6.388.150	18.333	6.369.817	Total Assets
Liabilitas	Liabilities									
Liabilitas segera lainnya	1.504	-	-	-	-	-	1.504	-	1.504	Liabilities Immediately payable
Simpanan	4.603.497	761.867	403.357	44.971	-	-	5.813.692	-	5.813.692	Deposits
Simpanan dari bank lain	26.293	-	-	-	-	-	26.293	-	26.293	Deposit from other banks
Liabilitas akseptasi	1.456	-	-	-	-	-	1.456	-	1.456	Acceptances payable
Liabilitas lain-lain	28.133	-	-	-	-	-	28.133	-	28.133	Other liabilities
Jumlah liabilitas	4.660.883	761.867	403.357	44.971	-	-	5.871.078	-	5.871.078	Total Liabilities
Aset (Liabilitas) - Bersih	(2.699.132)	(564.787)	123.985	1.136.053	1.558.629	962.324	517.072	18.333	498.739	Assets (Liabilities) - net

	2010						Jumlah/ Total	Biaya transaksi/ Transaction cost	Nilai Tercatat/ Carrying amount	
	Sampai dengan 1 bulan/ Less than 1 month	> 1 bulan s.d. 3 bulan/ > 3 months	> 3 bulan s.d. 6 bulan/ > 6 months	> 6 bulan s.d. 12 bulan/ > 12 months	> 12 bulan s.d. 5 tahun/ > 5 years	> 5 tahun s.d. > 5 years				
	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	Rp '000.000	
Aset	Assets									
Kas	68.077	-	-	-	-	-	68.077	-	68.077	Cash
Giro pada Bank Indonesia	292.227	-	-	-	-	-	292.227	-	292.227	Demand deposit with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	161.835	-	-	-	-	-	161.835	-	161.835	Demand deposit with other banks
Penempatan pada bank lain	435.000	-	-	-	-	-	435.000	-	435.000	Placement with other banks
Efek-efek	287.936	-	-	-	705	670	289.311	-	289.311	Securities
Kredit yang diberikan	205.949	211.333	320.032	628.503	1.122.093	481.942	2.969.852	7.749	2.962.103	Loans
Tagihan akseptasi	3.278	-	-	-	-	-	3.278	-	3.278	Acceptances receivable
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	10.800	-	-	-	-	-	10.800	-	10.800	Interest receivable
Aset lain-lain	1.165	4.250	-	-	1.734	-	7.149	-	7.149	Other assets
Jumlah aset	1.466.267	215.583	320.032	628.503	1.124.532	482.612	4.237.529	7.749	4.229.780	Total Assets
Liabilitas	Liabilities									
Liabilitas segera lainnya	25.116	-	-	-	-	-	25.116	-	25.116	Liabilities Immediately payable
Simpanan	2.944.698	425.832	173.409	81.746	-	-	3.625.685	-	3.625.685	Deposits
Simpanan dari bank lain	131.658	-	-	-	-	-	131.658	-	131.658	Deposit from other banks
Liabilitas akseptasi	3.278	-	-	-	-	-	3.278	-	3.278	Acceptances payable
Liabilitas lain-lain	23.437	-	-	-	-	-	23.437	-	23.437	Other liabilities
Jumlah liabilitas	3.128.187	-	-	-	-	-	3.809.174	-	3.809.174	Total Liabilities
Aset (Liabilitas) - Bersih	(1.661.920)	215.583	320.032	628.503	1.124.532	482.612	428.355	7.749	420.606	Assets (Liabilities) - net

- | | |
|---|--|
| <p>d. Pengelolaan Risiko Operasional</p> <p>Perusahaan berupaya untuk mengantisipasi serta mengendalikan seluruh faktor yang berpotensi menimbulkan risiko operasional, antara lain dengan memastikan bahwa setiap personil memiliki kualifikasi dan terlatih untuk fungsi yang dilakukan dan memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dilakukan berdasarkan ketentuan, sistem, dan prosedur yang telah ditentukan.</p> | <p>d. Management of Operational Risk</p> <p>The Company anticipates and controls all factors which may result to operational risks such as ensuring that all personnel are qualified and have been trained to perform their functions and ensuring that all operational activities are based on approved regulation, system, and procedures.</p> |
| <p>e. Pengelolaan Risiko Hukum</p> <p>Perusahaan selalu memastikan bahwa seluruh kegiatan dan hubungan kerja dengan pihak ketiga telah didasarkan pada aturan maupun persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Perusahaan dari segi hukum termasuk antisipasi terhadap potensi tuntutan dari pihak eksternal.</p> | <p>e. Management of Legal Risk</p> <p>The Company ensures that all activities and working relationships with third parties are done in accordance with regulations and laws to avoid possible lawsuits from external parties.</p> |
| <p>f. Pengelolaan Risiko Kepatuhan</p> <p>Risiko kepatuhan dapat berdampak pada pengenaan denda dan sanksi ataupun kehilangan reputasi Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan melakukan pemantauan terhadap keselarasan atas seluruh aktivitas di lingkungan Perusahaan terhadap peraturan dan ketentuan eksternal maupun kebijakan dan prosedur internal.</p> <p>Peran Satuan Kerja Kepatuhan dan <i>Good Corporate Governance</i> merupakan hal penting, khususnya dalam memastikan dipatuhinya ketentuan-ketentuan eksternal dan internal terhadap keputusan-keputusan bisnis yang diambil.</p> | <p>f. Management of Compliance Risk</p> <p>The Company ensures that all its activities are in compliance with regulations, external and internal policies and procedures to avoid penalties for non-compliance and negative impact on reputation of the Company of being non-compliant with regulations and internal policies and procedures.</p> <p>The Compliance and Good Corporate Governance Unit plays an important role in ensuring the compliance with external and internal regulations in making business decisions.</p> |
| <p>g. Pengelolaan Risiko Reputasi</p> <p>Risiko reputasi dapat berdampak langsung pada berkurangnya kepercayaan nasabah sehingga jumlah nasabah ataupun pendapatan Perusahaan menurun. Dalam mengelola risiko reputasi, Perusahaan berupaya untuk menjaga reputasi dengan memberikan pelayanan terbaik dengan menangani keluhan dan memberikan kepuasan kepada nasabah untuk menghindari munculnya keluhan tersebut di media massa.</p> | <p>g. Management of Reputation Risk</p> <p>The reputation risk, if not addressed, may result to loss of customers' trust, thus, decreasing the number of customers and income. In addressing reputation risk, the Company deals with customers' complaints and satisfy the customers in order to avoid complaints at public information.</p> |

h. Pengelolaan Risiko Strategik

Risiko strategik timbul antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Dalam mengelola risiko strategik, Perusahaan melakukan identifikasi pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa. Perusahaan melakukan pencatatan perubahan kinerja akibat tidak terealisasinya pelaksanaan strategi, melakukan pengendalian keuangan untuk melakukan pemantauan realisasi dengan target yang tercapai.

Penilaian risiko Perusahaan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dilakukan melalui proses *self-assessment* untuk menghasilkan profil risiko yang terdiri dari *inherent risk* yaitu risiko yang melekat pada aktivitas bank dan *risk control system* yaitu pengendalian terhadap risiko inheren. Sesuai dengan kriteria ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang berlaku, penilaian risiko dilakukan terhadap delapan jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategik.

Hasil penilaian profil risiko Perusahaan yang disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 19 Januari 2012, menunjukkan bahwa peringkat risiko secara keseluruhan bisnis Perusahaan dinilai rendah dengan kecenderungan tren stabil.

35. Informasi Lainnya

- a. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aset produktif pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar 1,99% dan 1,35%.
- b. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Perusahaan (secara bruto) pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah masing-masing sebesar 3,17% dan 2,08%, sedangkan secara neto masing-masing adalah sebesar 2,49% dan 1,12%.

h. Management of Strategic Risk

Strategic risk is by decision and application of improper strategic, uncensored businesses decisions and unresponsive bank's action against with external changes. In addressing strategic risk, the Company identifies functional activities from loan, treasury, investment, operation and services. The Company records the change of performance as result of unrealized strategic application, the control of financial position by monitoring realization of target.

The Company's risks assessment which is submitted to Bank Indonesia is evaluated through self-assessment process by making a risk profile which consists of risks inherent to the bank industry as well as the corresponding controls to address those risks. According to Bank Indonesia regulation, on the basis of Company's measurement and business complexity, the risks are evaluated on the basis of eight types of risk namely; credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk and compliance risk, law risk, reputation risk, and strategic risk.

The results of the evaluation of risk profile of the Company which has been submitted to Bank Indonesia on January 19, 2012, indicated that the aggregate risk of Company's business is low-assessed with tendency of stable trend.

35. Other Information

- a. The ratio of earning assets to total earning assets as of December 31, 2011 and 2010 is 1.99% and 1.35%, respectively.
- b. The ratio of Non-Performing Loans (NPL) of the Company (at gross) as of December 31, 2011 and 2010 is 3.17% and 2.08%, respectively, while the ratio at net is 2.49% and 1.12%, respectively.

c. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, tidak terdapat penyediaan dana kepada pihak berelasi dan pihak ketiga yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Perusahaan.

d. Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah dan penyesuaian terhadap Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang "Tindak Pidana Pencucian Uang", Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)" yang telah diubah dua kali dengan perubahan terakhir berdasarkan PBI No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003. Sesuai peraturan tersebut, Perusahaan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening dan transaksi nasabah, mengidentifikasi dan menerapkan manajemen risiko atas prinsip mengenal nasabah, dan melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi transaksi yang mencurigakan selambatnya 7 hari setelah diketahui oleh Perusahaan. Perusahaan wajib memiliki sistem informasi yang memadai untuk memungkinkan pelaksanaan secara efektif.

Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah. Perusahaan telah membentuk unit kerja khusus dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan sesuai dengan peraturan tersebut. Pada saat ini, manajemen Perusahaan masih terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut.

e. Jaminan Pemerintah terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum

Sejak tahun 2005, program penjaminan Pemerintah dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

c. As of December 31, 2011 and 2010, there are no loans granted to related and third parties which exceeded the Company's Legal Lending Limit (LLL).

d. Know Your Customer Principles

Within the frameworks of the adoption of "Know Your Customer Principles" and in conformity with Law No. 15 of 2002, dated April 17, 2002 which has been amended by Law No. 25 of 2003 dated October 13, 2003, regarding "Money Laundering Act" Bank Indonesia issued Bank Indonesia Regulation No. 3/10/PBI/2001 dated June 18, 2001, regarding "Application of Know Your Customer Principles" which has been amended twice, and the latest amendment was based on Bank Indonesia Regulation No. 5/21/PBI/2003 dated October 17, 2003. Based on the Regulation, to adopt the "Know Your Customer Principles", the Company is required to have written policies of accepting and identifying its customers' accounts and transactions, identify and apply risk management of know your customer principles, and to report to Bank Indonesia within 7 days after being detected by the Company, any suspicious transactions that occurred. The Company is required to have a sufficient information system to ensure effective adoption.

The Company's Directors are responsible for the implementation of the above matters. The Company has established a special task force and has appointed officers who report directly to the Compliance Director, in accordance with the regulation's requirement. Currently, the Company's management is still in the process of making simultaneous adjustments and improvements of the "Know Your Customer Principles".

e. Government Guarantee on Obligations of Private Banks

Since 2005, the Government guarantee program was carried out by the Deposit Guarantor Agency.

LPS akan membayarkan klaim penjaminan yang layak dibayar setelah melalui prosedur rekonsiliasi dan/atau verifikasi sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) yang berlaku.

The Deposit Guarantor Agency will repay the qualified guaranteed claims based on results of reconciliation and/or verification procedures in accordance with prevailing Deposit Guarantor Agency Regulations.

- f. Pada tahun 2011, Perusahaan melakukan penjualan atas beberapa aset tetap dan agunan yang diambil alih kepada PT Mega Agung Mandiri (MAM), pihak ketiga, melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dua diantara aset yang dijual kepada MAM tersebut telah dijual oleh MAM kepada pihak berelasi Perusahaan.

- f. In 2011, the Company has sold some of premises and equipments and foreclosed properties to the PT Mega Agung Mandiri (MAM), a third party, through the Sale and Purchase Agreement (PPJB). Two of the assets that sold to MAM has been sold by MAM to the Company's related parties.

36. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2011, sebagai berikut:

36. Reclassification of Accounts

Certain accounts in the 2010 financial statements have been reclassified to conform with the 2011 financial statement presentation. A summary of such accounts is as follows:

	Sesudah Reklasifikasi/ After <i>Reclassification</i> Rp '000.000	Sebelum Reklasifikasi/ Before <i>Reclassification</i> Rp '000.000	
Laporan posisi keuangan			Statement of financial position
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	7.031	Estimated losses on commitments and contingencies
Liabilitas lain-lain	30.746	23.445	Other liabilities
Laporan laba rugi komprehensif			Statement of comprehensive income
Provisi dan komisi selain kredit	10.549	1.545	Provision and commission other than loans
Pendapatan operational lainnya- lain-lain	-	9.004	Other operating revenue - others
Pendapatan lainnya	4.990	-	Other revenues
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	2.672	Estimated losses on commitments and contingencies
Beban lainnya	3.515	-	Other expenses
Pendapatan non operasional	-	4.990	Non operation revenues
Beban non operasional	-	843	Non operation expenses

Reklasifikasi diatas tidak mempengaruhi laporan perubahan ekuitas Perusahaan tahun 2010.

The above reclassifications did not affect the 2010 statements of changes in equity of the Company.

37. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Standar-standar akuntansi keuangan tersebut akan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

37. Prospective Accounting Pronouncements

The Indonesian Institute of Accountants has issued the following Revised Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations (ISAK). These standards will be applicable to financial statements with annual period begin on or before January 1, 2012 as follows:

PSAK

1. PSAK No. 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
2. PSAK No. 13 (Revisi 2011), Properti Investasi
3. PSAK No. 16 (Revisi 2011), Aset Tetap
4. PSAK No. 18 (Revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
5. PSAK No. 24 (Revisi 2010), Imbalan Kerja
6. PSAK No. 26 (Revisi 2011), Biaya Pinjaman
7. PSAK No. 28 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
8. PSAK No. 30 (Revisi 2011), Sewa
9. PSAK No. 33 (Revisi 2011), Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. PSAK No. 34 (Revisi 2010), Kontrak Konstruksi
11. PSAK No. 36 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
12. PSAK No. 45 (Revisi 2011), Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
13. PSAK No. 46 (Revisi 2010), Pajak Penghasilan
14. PSAK No. 50 (Revisi 2010), Instrumen Keuangan: Penyajian
15. PSAK No. 53 (Revisi 2010), Pembayaran Berbasis Saham
16. PSAK No. 55 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
17. PSAK No. 56 (Revisi 2011), Laba Per Saham
18. PSAK No. 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan
19. PSAK No. 61, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah

PSAK

1. PSAK No. 10 (Revised 2010), The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
2. PSAK No. 13 (Revised 2011), Investment Property
3. PSAK No. 16 (Revised 2011), Property, Plant and Equipment
4. PSAK No. 18 (Revised 2010), Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
5. PSAK No. 24 (Revised 2010), Employee Benefits
6. PSAK No. 26 (Revised 2011), Borrowing Costs
7. PSAK No. 28 (Revised 2011), Accounting for Loss Insurance
8. PSAK No. 30 (Revised 2011), Leases
9. PSAK No. 33 (Revised 2011), Accounting of Land Stripping Activities and Environmental Management on General Mining
10. PSAK No. 34 (Revised 2010), Construction Contracts
11. PSAK No. 36 (Revised 2011), Accounting for Life Insurance
12. PSAK No. 45 (Revised 2011), Financial Reporting for Non-profit Organization
13. PSAK No. 46 (Revised 2010), Income Taxes
14. PSAK No. 50 (Revised 2010), Financial Instruments: Presentation
15. PSAK No. 53 (Revised 2010), Share Based Payment
16. PSAK No. 55 (Revised 2011), Financial Instruments: Recognition and Measurement
17. PSAK No. 56 (Revised 2011), Earnings per Share
18. PSAK No. 60, Financial Instruments: Disclosures
19. PSAK No. 61, Accounting of Government Grants and Disclosure of Government Assistance

20. PSAK No. 62, Kontrak Asuransi
21. PSAK No. 63, Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi
22. PSAK No. 64, Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi Pada Pertambangan Sumber Daya Mineral

ISAK

1. ISAK No. 13, Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
2. ISAK No. 15, PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum, dan Interaksinya
3. ISAK No. 16, Perjanjian Konsesi Jasa
4. ISAK No. 18, Bantuan Pemerintah – Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
5. ISAK No. 19, Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63, Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
6. ISAK No. 20, Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya
7. ISAK No. 22, Perjanjian Konsesi Jasa
8. ISAK No. 23, Sewa Operasi - Insentif
9. ISAK No. 24, Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan suatu Bentuk Legal Sewa
10. ISAK No. 25, Hak atas Tanah
11. ISAK No. 26, Penilaian Ulang Derivatif Melekat

PPSAK

1. PPSAK No. 7, Pencabutan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat
2. PPSAK No. 8: Pencabutan PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian.
3. PPSAK No. 9, Pencabutan ISAK 5: Interpretasi atas Par.14 PSAK 50 (1998) tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual

20. PSAK No. 62, Insurance Contract
21. PSAK No. 63, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
22. PSAK No. 64, Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

ISAK

1. ISAK No. 13, Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
2. ISAK No. 15, PSAK 24 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements, and Their Interaction
3. ISAK No. 16, Service Concession Agreement
4. ISAK No. 18, Government Assistance – No Specific Relation with Operating Activity
5. ISAK No. 19, Applying the Restatement Approach under PSAK 63, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
6. ISAK No. 20, Income Taxes-Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
7. ISAK No. 22, Service Concession Arrangements: Disclosures
8. ISAK No. 23, Operating Leases-Incentives
9. ISAK No. 24, Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease
10. ISAK No. 25, Landrights
11. ISAK No. 26, Reassessment of Embedded Derivatives

PPSAK

1. PPSAK No. 7, Withdrawal of PSAK 44: Accounting for Real Estate Development Activities
2. PPSAK No. 8: Withdrawal of PSAK 27: Accounting for Cooperatives
3. PPSAK No. 9, Withdrawal of ISAK 5: Interpretation on Par.14 PSAK 50 (1998) Regarding Reporting of Changes in Fair Value of Available for Sale Investment Securities

4. PPSAK No. 11, Pencabutan PSAK 39:
Akuntansi Kerja Sama Operasi

Perusahaan masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK revisi di atas dan dampak terhadap laporan keuangan dari penerapan PSAK dan ISAK revisi tersebut belum dapat ditentukan.

4. PPSAK No. 11, Withdrawal PSAK 39:
Accounting for Operation Cooperation

The Company is still evaluating the effects of these revised PSAKs, PPSAKs and ISAKs and have not yet determined the related effects on the financial statements.

